

**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**DETERMINAN KINERJA KEUANGAN KABUPATEN  
/KOTA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI  
DI PROVINSI BENGKULU**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Manajemen Dalam Manajemen  
Bidang Minat Manajemen Keuangan**

**Disusun Oleh :**

**HERISISTAM**

**NIM. 500017387**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA  
JAKARTA  
2015**

## ABSTRACT

### DETERMINANTS FINANCIAL PERFORMANCE REGENCIES/CITY ON ECONOMIC GROWTH IN THE PROVINCE BENGKULU

Herisistam

[herisistam5@gmail.com](mailto:herisistam5@gmail.com)

Graduate Studies Program  
Indonesia Open University

The purposes of this research are to analyze financial performance of regencies/city at Bengkulu Province fiscal years 2009 till 2013 and the influence of financial performance on counties' economics growth. This research is a quantitative research involving documentatary analysis to get Realization Report of Budgets and Expenditures fiscal years 2010 till 2014 all of counties in Bengkulu Province. Method of analysis data uses formula of each financial ratios to know the counties' financial performance and multiple linier regression to know the influence of that financial performance on the economics growth of each counties.

Based on the analysis that has been done the results are as follows: (1) the ratio of self-sufficiency with the level of performance is very low (5.94); (2) the ratio of effectiveness with effective performance level (98.82); (3) the ratio of efficiency with less efficient performance levels (91.80); (4) The ratio of activity (shopping harmony) with mismatched levels of performance (24.89); (5) Debt Service Coverage Ratio (DSCR) or the ratio of debt fulfillment capabilities with increased performance levels (1.18); and (6) the ratio of growth to show increased levels of performance (10.70). The influence of the financial performance of the district / city in the province of Bengkulu on the economic growth of each region as follows: (a) self-sufficiency ratio of positive and significant effect on the economic growth of each region; (B) the ratio of effectiveness does not significantly influence the economic growth of each region; (C) the efficiency ratio significantly positive effect on the economic growth of each region; (D) the ratio of activity was significantly positive effect on the economic growth of each region; (E) the ratio of DSCR no significant effect on the economic growth of each region; (F) the growth rate significantly positive effect on the economic growth of each region; and (g) simultaneously, the financial performance of the district / city in the province of Bengkulu based sixth regional financial ratios affect the economic growth of each region.

**Keywords:** Financial Performance; County's Financial Ratios; Regencies/City; Domestic Income of Gross Regional; Growth Economics

## ABSTRAK

### DETERMINAN KINERJA KEUANGAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI BENGKULU

Herisistam  
[herisistam5@gmail.com](mailto:herisistam5@gmail.com)

Program Pascasarjana  
Universitas Terbuka

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi untuk memperoleh data sekunder berupa data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRAPBD) tahun anggaran 2010 s.d. 2014 seluruh daerah di Provinsi Bengkulu. Data dianalisis dengan menggunakan rumus dari masing-masing rasio keuangan daerah untuk mengetahui kinerja keuangan daerah dan regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut : (1) rasio kemandirian dengan tingkat kinerja sangat rendah (5,94); (2) rasio efektivitas dengan tingkat kinerja efektif (98,82); (3) rasio efisiensi dengan tingkat kinerja kurang efisien (91,80); (4) rasio aktivitas (keserasian belanja) dengan tingkat kinerja tidak serasi (24,89); (5) *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) atau rasio kemampuan pemenuhan hutang dengan tingkat kinerja meningkat (1,18); dan (6) rasio pertumbuhan dengan tingkat kinerja menunjukkan meningkat (10,70). Pengaruh kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah sebagai berikut (a) rasio kemandirian berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah; (b) rasio efektivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah; (c) rasio efisiensi berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah; (d) rasio aktivitas berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah; (e) rasio DSCR tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah; (f) rasio pertumbuhan berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah; dan (g) secara simultan, kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu berdasarkan keenam rasio keuangan daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan; Rasio Keuangan Daerah; Kabupaten/Kota; Pendapatan Domestik Regional Bruto; Pertumbuhan Ekonomi

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER MANAJEMEN KEUANGAN**

**PERYATAAN**

TAPM yang berjudul Determinan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Bengkulu, Juni 2015  
Yang Menyatakan,

METERAI  
TEMPEL  
049C9ADF164731891

6000  
ENAM RIBU RUPIAH

( Herisistam )  
NIM. 500017387

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA

Jl. Raya , Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418  
Telp. 021.7415050, Fax 021.7415588

Kepada  
Yth. Direktur PPs UT  
Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe  
Tangerang 15418

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya selaku pembimbing TAPM dari Mahasiswa,

Nama/NIM : Herisistam/500017387  
Judul TAPM : Determinan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Terhadap  
Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa TAPM dari mahasiswa yang bersangkutan sudah/~~baru~~\* selesai 100 % sehingga dinyatakan ~~sudah layak uji/belum layak uji~~\* dalam Ujian Sidang Tugas Akhir Program Magister (TAPM).

Demikian keterangan ini dibuat untuk menjadikan periksa.

Bengkulu, 8 Juni 2015

Pembimbing I

Pembimbing II.



(Dr. Ety Puji Lestari)



(Ojat Darodjat., M.BUS., Ph.D)

\*) Coret yang tidak perlu

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Raya , Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418  
Telp. 021.7415050, Fax 021.7415588

**PENGESAHAN**

Nama : Herisistam

NIM : 500017387

Program Studi : Magister Manajemen Keuangan

Judul TAPM : Determinan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Terhadap  
Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister  
(TAPM) Manajemen Keuangan Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Jumat / 19 Juni 2015

Waktu : 09.00 s.d. 10.30 WIB

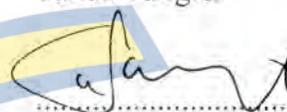
Dan telah dinyatakan LULUS

**PANITIA PENGUJI TAPM**

Ketua Komisi Penguji

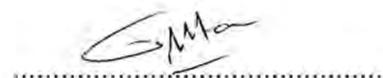
Nama : Dr. Darmanto, M.Ed.

Tanda Tangan



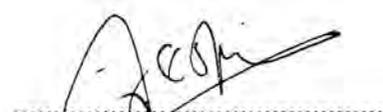
Penguji Ahli

Nama : Dr. Ginta Ginting, M.B.A.



Pembimbing I

Nama : Dr. Etty Puji Lestari, S.E., M.Si.



Pembimbing II

Nama : Ojat Darodjat, M.BUS., Ph.D.



## PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Determinan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Terhadap  
Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu

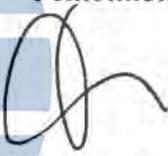
Penyusun TAPM : Herisistam

NIM : 500017387

Program Studi : Magister Manajemen Keuangan

Menyetujui:

Pembimbing I, Pembimbing II,

Dr. Etty Puji Lestari, S.E., M.Si. Ojat Darodjat, M.BUS., Ph.D.

Mengetahui,

Ketua Bidang Direktur Program Pascasarjana,  
Ilmu Ekonomi dan Manajemen Program Magister Manajemen,

Mohamad Nasoha, S.E., M.Sc.  
NIP. 19781111 200501 1 001

Suciati, M.Sc., Ph.D.  
NIP. 19520213 198503 2 001

## RIWAYAT HIDUP

- Nama : Herisistam
- NIM : 500017387
- Program Studi : Magister Manajemen Keuangan
- Tempat/Tanggal Lahir : Simpang Perigi/27-07-1979
- Riwayat Pendidikan : Lulus SD Negeri 1 Seluma pada tahun 1991  
Lulus SLTP Negeri 1 Seluma pada tahun 1994  
Lulus SLTA Negeri 1 Seluma pada tahun 1997  
Lulus S1 Universitas Prof. DR. Hazairin, S.H.  
Bengkulu pada tahun 2007
- Riwayat Pekerjaan : Tahun 2001 s.d. 2015 sebagai Fungsional Umum di  
Lembaga Pemasayarakatan Klas IIA Curup.  
Tahun 2015.1 sebagai Tutor Online di Fakultas Ekonomi  
Universitas Terbuka

Bengkulu, Juni 2015

Herisistam  
NIM. 500017387

## KATA PENGANTAR

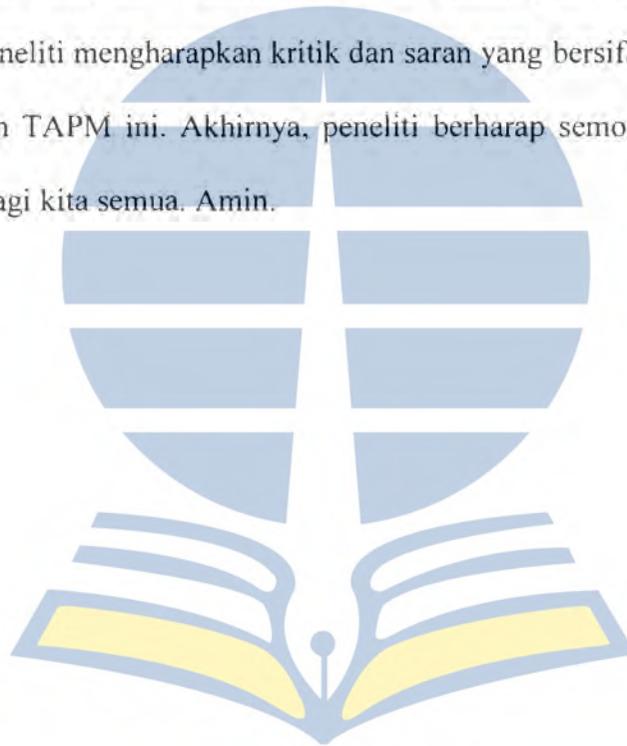
Alhamdulillah syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat-Nya yang telah membimbing dan memberikan kesempatan kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan penulisan TAPM ini dengan lancar. Penulisan TAPM ini merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh pada program Pascasarjana Universitas Terbuka.

Dalam mempersiapkan, menyusun hingga menyelesaikan TAPM ini, peneliti telah banyak mendapatkan bantuan, pengarahan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang kesemuanya itu sangat besar artinya dalam penyusunan TAPM ini, maka dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D. selaku Rektor Universitas Terbuka.
2. Suciati, M.Sc., Ph.D. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Terbuka.
3. Dr. Sandra Sukmaning Adji, M.Ed., M.Pd. selaku Ketua Komisi Penguji yang telah memberikan masukan dan saran bagi kesempurnaan TAPM ini.
4. Dr. Ginta Ginting, M.B.A. selaku Penguji Ahli yang telah memberikan masukan dan saran bagi kesempurnaan TAPM ini.
5. Ibu Dr. Etty Puji Lestari, S.E., M.Si. selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan, sehingga peneliti mampu menyelesaikan TAPM ini.
6. Bapak Ojat Darodjat, M.BUS., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar membimbing serta memberikan arahan kepada peneliti.

7. Bapak Nasoha, S.E., M.Sc. selaku Ketua Bidang Ilmu Ekonomi dan Manajemen, Program Magister Manajemen Universitas Terbuka.
8. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Karim dan Ibu Zumrawati yang selalu memberikan semangat dan doa setiap langkahku.
9. Istriku Desi Andriani, S.Sos. dan anak-anakku (Kekey, Filzah, Freya) tercinta yang selalu menyemangati dan menemaniku dalam keadaan apapun.
10. Pihak-pihak yang telah memberikan andil terhadap penyusunan TAPM ini.

Peneliti menyadari bahwa TAPM ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan TAPM ini. Akhirnya, peneliti berharap semoga TAPM ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.



## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT .....	ii
ABSTRAK .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
LEMBAR LAYAK UJI .....	v
PENGESAHAN .....	vi
PERSETUJUAN .....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR GRAFIK .....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori .....	9
2.1.1 Kinerja .....	9
2.1.1.1 Definisi kinerja .....	9
2.1.1.2 Pengukuran kinerja .....	10
2.1.2 Keuangan daerah .....	11
2.1.2.1 Definisi keuangan daerah .....	11
2.1.2.2 Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah .....	12
2.1.3 Kinerja keuangan daerah .....	13
2.1.3.1 Definisi kinerja keuangan daerah .....	13

2.1.3.2	Aspek dan tolak ukur kinerja keuangan daerah .....	15
2.1.3.3	Pengukuran kinerja keuangan daerah .....	17
2.1.3.4	Kegunaan rasio keuangan sebagai indikator kinerja keuangan daerah .....	19
2.1.4	Pertumbuhan ekonomi .....	34
2.1.4.1	Definisi pertumbuhan ekonomi .....	34
2.1.4.2	Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) ....	35
2.1.5	Pengaruh rasio keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi .....	39
2.1.5.1	Hubungan rasio kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi .....	39
2.1.5.2	Hubungan rasio efektivitas keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi .....	40
2.1.5.3	Hubungan rasio efisiensi keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi .....	41
2.1.5.4	Hubungan rasio aktivitas terhadap pertumbuhan Ekonomi .....	42
2.1.5.5	Hubungan <i>Debt Service Coverage Ratio</i> (DSCR) Atau rasio kemampuan pemenuhan hutang Terhadap pertumbuhan ekonomi .....	43
2.1.5.6	Hubungan rasio pertumbuhan terhadap pertumbuhan ekonomi .....	44
2.2	Review Penelitian Terdahulu ( <i>Theoretical Mapping</i> ) .....	44
2.3	Kerangka Konsep .....	46
2.4	Pengembangan Hipotesis .....	47
2.4.1	Rasio kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi .....	47
2.4.2	Rasio efektivitas keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi .....	48
2.4.3	Rasio efisiensi keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi .....	49
2.4.4	Rasio aktivitas dan pertumbuhan ekonomi .....	49

2.4.5 <i>Debt Service Coverage Ratio</i> (DSCR) atau rasio kemampuan pemenuhan hutang dan pertumbuhan ekonomi .....	50
2.4.6 Rasio pertumbuhan dan pertumbuhan ekonomi .....	50

### BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian .....	52
3.2 Populasi dan Sampel .....	53
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	54
3.4 Definisi Operasional dan Metode Pengumpulan Variabel .....	54
3.5 Metode Analisis Data .....	58
3.5.1 Kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu ...	59
3.5.1.1 Rasio kemandirian keuangan daerah .....	59
3.5.1.2 Rasio efektivitas keuangan daerah .....	59
3.5.1.3 Rasio efisiensi keuangan daerah .....	59
3.5.1.4 Rasio aktivitas keuangan daerah .....	60
3.5.1.5 <i>Debt Service Coverage Ratio</i> (DSCR) atau rasio kemampuan pemenuhan hutang .....	61
3.5.1.6 Rasio pertumbuhan keuangan daerah .....	61
3.5.2 Pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi .....	62
3.5.2.1 Statistik deskriptif .....	62
3.5.2.2 Uji asumsi klasik .....	62
3.5.2.3 Analisis regresi linier berganda .....	65
3.5.2.4 Pengujian hipotesis .....	66

### BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian .....	69
4.1.1 Gambaran umum kabupen/kota di Provinsi Bengkulu .....	69
4.1.2 Deskripsi data .....	70
4.1.3 Analisis data .....	71
4.1.3.1 Analisis kinerja keuangan kabupaten/kota di	

Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013.	72
4.1.3.2 Pengaruh kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu terhadap pertumbuhan ekonomi daerah .....	91
4.2 Pembahasan .....	100
4.2.1 Kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 .....	100
4.2.2 Pengaruh kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 terhadap pertumbuhan ekonomi .....	110
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan .....	116
5.2 Saran .....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	118



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Konseptual .....	Halaman 46
------------	---------------------------	---------------



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Kriteria Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah ..... 24
Tabel 2.2	Kriteria Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah ..... 25
Tabel 2.3	Kriteria Tingkat Efisiensi Keuangan Daerah ..... 27
Tabel 2.4	Kriteria Tingkat Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan terhadap PAD ..... 30
Tabel 2.5	Penelitian Terdahulu ..... 44
Tabel 3.1	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ..... 57
Tabel 4.1	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013 ..... 72
Tabel 4.2	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Rasio Efektivitas Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013 ..... 74
Tabel 4.3	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Rasio Efisiensi Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013 ..... 75
Tabel 4.4	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Rasio Belanja Rutin terhadap PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013 ..... 77
Tabel 4.5	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Rasio Belanja Pembangunan terhadap PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013 ..... 78
Tabel 4.6	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Rasio Aktivitas Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013 ..... 80
Tabel 4.7	Rekapitulasi Hasil Penghitungan DSCR Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013 ..... 82
Tabel 4.8	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Rasio Penerimaan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013 ..... 83
Tabel 4.9	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013 ..... 85
Tabel 4.10	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013 ..... 86
Tabel 4.11	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Rasio Pertumbuhan Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013 ..... 88
Tabel 4.12	Rekapitulasi Rata-rata Hasil Penghitungan Rasio Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013 ..... 90
Tabel 4.13	Statistik Deskriptif ..... 92
Tabel 4.14	Hasil Uji Normalitas ..... 93
Tabel 4.15	Hasil Uji Multikolinearitas ..... 93
Tabel 4.16	Hasil Uji Autokorelasi ..... 95

Tabel 4.17 Hasil Regresi Linier Berganda .....	95
Tabel 4.18 Hasil Uji F ( <i>F-Test</i> ) .....	97
Tabel 4.19 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	98
Tabel 4.20 Hasil Uji t .....	98



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1. Grafik <i>Scatter Plot</i> .....	Halaman 94
--	------------



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Tabulasi Data Hasil Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013
- Lampiran 2 Tabulasi Data Hasil Penghitungan Rasio Efektivitas Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013
- Lampiran 3 Tabulasi Data Hasil Penghitungan Rasio Efisiensi Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013
- Lampiran 4 Tabulasi Data Hasil Penghitungan Rasio Aktivitas (Keseserasian Belanja) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013
- Lampiran 5 Hasil Penghitungan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013
- Lampiran 6 Tabulasi Data Hasil Penghitungan Rasio Pertumbuhan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013
- Lampiran 7 Pendapatan Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d 2013
- Lampiran 8 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d 2013 Berdasarkan Nilai Pendapatan Domestik Bruto (PDRB)
- Lampiran 9 Statistik Deskriptif
- Lampiran 10 Hasil Uji Normalitas
- Lampiran 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) dan Autokorelasi
- Lampiran 12 Hasil Uji Heteroskedastisitas
- Lampiran 13 Hasil Uji F (*F-Test*)
- Lampiran 14 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Suprasto, 2003). Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya merupakan bentuk pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah. Namun, untuk urusan pemerintahan tertentu, seperti urusan politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, serta moneter dan fiskal nasional masih diatur oleh pemerintah pusat melalui kementerian.

Menurut Bastian (2006: 38), "Tujuan program otonomi daerah adalah untuk menciptakan kehidupan politik yang lebih demokratis, menciptakan sistem yang lebih menjamin pemerataan dan keadilan, memungkinkan setiap daerah menggali potensi **natural (sumber daya alam)** dan **kultural (budaya)** yang dimiliki, dan kesiapan menghadapi tantangan globalisasi, serta yang sangat penting adalah tetap terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)". Dengan kata lain, pemerintah ingin melaksanakan isi dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu dengan melaksanakan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Makna luas di sini adalah otonomi dilaksanakan untuk seluruh daerah dalam wilayah NKRI. Makna nyata di sini adalah implementasi otonomi harus terlihat dalam setiap

aspek pemerintahan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat. Makna bertanggung jawab di sini adalah pemerintah daerah yang diberi kewenangan untuk mengurus daerah sendiri bertanggung jawab terhadap pemerintah daerah berdasarkan laporan keuangan tiap tahun anggaran yang akan diaudit oleh eksternal auditor yang bersifat independen, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dengan sistem pemerintahan desentralisasi yang direalisasikan dalam bentuk otonomi daerah yang mulai efektif dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2001. Artinya, sejak tanggal tersebut, otonomi daerah sudah resmi dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, walapun belum secara menyeluruh.

Penyelenggaraan otonomi daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengemban misi utama yang bukan hanya melimpahkan kewenangan pelaksanaan pembangunan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), namun yang terpenting adalah bagaimana melakukan efisiensi dan efektivitas terhadap berbagai sumber daya keuangan daerah. Artinya, pemerintah daerah diharapkan mampu menggunakan sumber daya keuangan daerah dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efisien (sesuai kebutuhan) dan efektif (tepat guna dan tepat sasaran).

Agar misi utama dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dapat terlaksana dengan baik, maka menurut Bastian (2006: 6), “diperlukan suatu laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya agar dapat menggambarkan seluruh sumber daya keuangan daerah berikut dengan analisis prestasi pengelolaan sumber daya keuangan daerah itu sendiri”. Laporan keuangan pemerintah daerah disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRAPBD) yang memuat 3 (tiga) komponen utama keuangan; tiga komponen keuangan tersebut adalah, (1) Pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah; (2) Belanja yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja tidak Terduga, dan Transfer; dan (3) Pembiayaan yang meliputi Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah identik dengan adanya tuntutan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah dalam kerangka otonomi memerlukan prasyarat berupa tata pemerintahan yang baik dan bersih. Tata pemerintahan yang baik dan bersih adalah tata pemerintahan yang terdiri atas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dibidangnya dan jauh dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), sehingga mampu bekerja sesuai dengan amanat rakyat. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara.

Selain *good governance*, penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh di tengah masyarakat yang

heterogen. Oleh karena itu, otonomi daerah diharapkan mampu menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan bersifat efisien dan efektif, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan, karena dalam proses pembangunan, masyarakat merupakan bagian dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang akan terlibat langsung dalam tahapan penilaian dan evaluasi hasil pembangunan. Selain itu, peran serta masyarakat diharapkan dalam menjaga hasil pembangunan yang telah ada.

Dalam Pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan kecakapan yang tinggi bagi pimpinan daerah (gubernur, bupati/walikota) agar alokasi dan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan daerah. Meskipun potensi suatu daerah kurang, tetapi dengan strategi yang tepat yang diterapkan oleh kepala daerah untuk memanfaatkan bantuan dari pusat dalam memberdayakan daerahnya, maka akan dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang ada.

Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota dalam mengelola dan menggunakan keuangan daerah dalam bentuk APBD dilakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2007). Analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan informasi yang penting, terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah pemerintah

daerah berhasil mengelola keuangannya dengan baik, serta memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya terhadap pertumbuhan daerah masing-masing. Analisis kinerja keuangan pada APBD dilakukan dengan melakukan analisis rasio keuangan yang meliputi (1) Rasio Kemandirian atau Rasio Desentralisasi Fiskal, (2) Rasio Efektivitas, (3) Rasio Efisiensi, (4) Rasio Aktivitas terhadap PAD yang terdiri atas Rasio Belanja Rutin dan Rasio Belanja Pembangunan, (5) *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) atau Rasio Kemampuan Pemenuhan Hutang, dan (6) Rasio Pertumbuhan yang terdiri atas Rasio Penerimaan PAD, Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan, dan Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan.

Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada perusahaan perusahaan swasta, sedangkan pada lembaga publik (sektor publik), khususnya pemerintah daerah pada tingkat provinsi, kabupaten/kota masih sangat terbatas, sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang berlaku mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, maka analisis rasio keuangan terhadap APBD perlu dilaksanakan (Mardiasmo, 2002). Hal ini bertujuan agar hasil dari analisis rasio keuangan daerah tersebut dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan dan mensejahterakan masyarakatnya untuk masa yang akan datang, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Sebagai bentuk pemerintahan daerah yang berbeda yang berada dalam satu wilayah administratif Provinsi Bengkulu, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota,

namun masing-masing memiliki kewenangan otonomi terhadap wilayahnya masing-masing, yaitu Pemerintah Provinsi Bengkulu dibawah oleh seorang gubernur, Pemerintah Kota Bengkulu dibawah oleh walikota, dan pemerintah kabupaten-kabupaten di Provinsi Bengkulu dibawah oleh seorang bupati, tentunya masing-masing sumber keuangan daerah yang terdapat dalam LRAPBD yang berasal dari PAD, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain dari Pendapatan yang Sah akan berbeda dalam penggunaannya terhadap belanja daerah, khususnya terhadap alokasi belanja langsung.

Besarnya dana yang dianggarkan dari APBD oleh pemerintah daerah berupa PAD dan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam bentuk belanja langsung akan menyebabkan perbedaan dalam hal pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang akan diketahui dengan parameter laju pertumbuhan ekonomi melalui indikator Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) (Kuncoro, 2004). Menurut Kuznets (dalam Arsyad, 2010: 46), "Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu negara (daerah) untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya yang terwujud dengan adanya kenaikan pengeluaran daerah secara terus-menerus yang disertai dengan kemajuan teknologi serta adanya penyesuaian kelembagaan, sikap, dan ideologi yang dibutuhkannya". Artinya, PAD, DAU, dan pertumbuhan ekonomi akan berimplikasi terhadap besarnya dana APBD yang dialokasikan untuk belanja langsung.

Penelitian mengenai analisis kinerja keuangan telah banyak dilakukan, namun yang meneliti pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi masih sedikit. Penelitian yang dilakukan oleh Hamzah (2008) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur membuktikan bahwa rasio efisiensi secara langsung berpengaruh

positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Ani (2014) menunjukkan bahwa rasio efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh rasio efisiensi keuangan daerah dari kedua penelitian tersebut menunjukkan dua hasil yang berbeda. Penelitian mengenai pengaruh DSCR terhadap pertumbuhan ekonomi daerah masih sedikit dilakukan penelitian oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013?
2. Apakah kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013 berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013.
2. Menganalisis pengaruh kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013 terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

## 1.4 Manfaat Penelitian

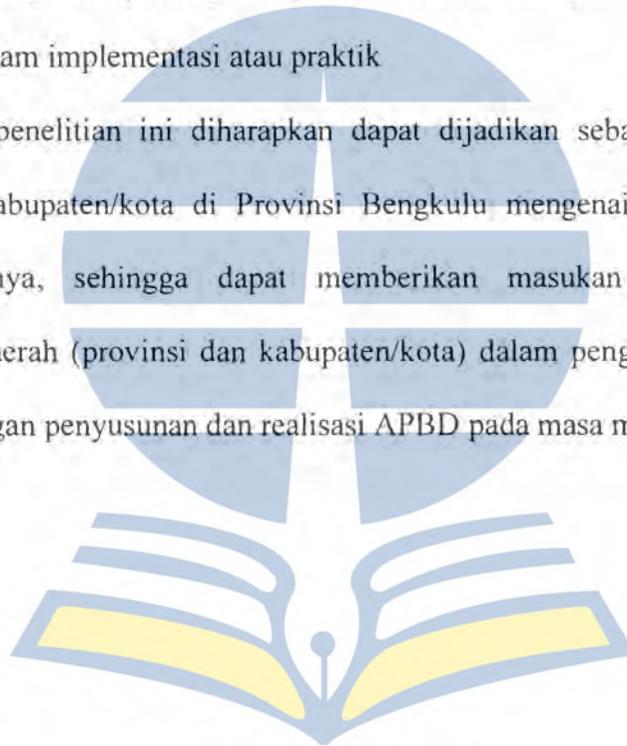
Penelitian yang peneliti lakukan ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri, maupun bagi para pembaca atau pihak-pihak lain yang berkepentingan, yaitu:

### 1. Manfaat akademis

Penelitian ini erat hubungannya dengan Mata Kuliah Manajemen Keuangan, sehingga dengan melakukan penelitian ini diharapkan peneliti dan semua pihak yang berkepentingan dapat lebih memahaminya.

### 2. Manfaat dalam implementasi atau praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu mengenai kinerja keuangan pemerintahannya, sehingga dapat memberikan masukan dan saran bagi pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan penyusunan dan realisasi APBD pada masa mendatang.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

Dalam bab ini akan dibahas lebih dalam mengenai kinerja, keuangan daerah, dan pertumbuhan ekonomi. Teori-teori yang melandasi penelitian ini dijabarkan dengan referensi atau keterangan tambahan yang akan dikumpulkan selama penelitian.

##### 2.1.1 Kinerja

###### 2.1.1.1 Definisi kinerja

Kinerja sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan kegiatan atau program kerja. Menurut Poerwadarminta (2002: 82), kinerja didefinisikan sebagai “Sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan kerja (tentang peralatan)”. Menurut Mulyadi (2001: 337), “Kinerja adalah keberhasilan personil, tim, atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategik yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan”.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi,

pengeluaran hasil kerja organisasi, keputusan pelanggan, serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Suprasto, 2003).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dinyatakan bahwa kinerja adalah pencapaian hasil dari suatu kegiatan atau program kerja yang telah disusun dan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan atau program kerja tersebut dengan suatu tolok ukur yang dijadikan sebagai acuan tingkat keberhasilan. Dengan kata lain, kinerja dapat diartikan sebagai gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misinya.

#### 2.1.1.2 Pengukuran kinerja

Pengukuran kinerja adalah suatu indikator keuangan atau non keuangan dari suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan atau hasil uang yang dicapai dari suatu aktivitas, proses, atau unit organisasi. Dalam mengukur keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi harus dapat dicatat dan diukur. Pengukuran ini tidak hanya dilakukan pada masukan (*input*) program, namun juga pada keluaran-manfaat (*output-advantages*) dari program tersebut (Halim, 2002).

Menurut Stout (dalam Bastian, 2006: 275), “Pengukuran/penilaian kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian dari pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi dan visi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses”.

Berdasarkan kedua pendapat di atas dapat dinyatakan bahwa penilaian kinerja merupakan proses mengukur sampai sejauh mana manajemen dapat

mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan atau seberapa baik seseorang melakukan pekerjaan yang ditugaskan. Penilaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan atau program kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, lembaga, atau perusahaan.

## 2.1.2 Keuangan daerah

### 2.1.2.1 Definisi keuangan daerah

Keuangan daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan sebagai kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, kekayaan daerah dalam hal ini dapat berupa barang (tanah, bangunan gedung, dan aset tidak bergerak lainnya) ataupun dalam bentuk uang (Mamesah dalam Halim, 2007).

Semua hak berdasarkan pengertian di atas adalah hak untuk memungut semua sumber-sumber penerimaan pemerintah daerah, seperti pajak, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain, seperti DAU dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi.

Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Manajemen keuangan daerah adalah pengorganisasian dalam pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan yang dimiliki oleh daerah dalam rangka mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut yang biasanya tertuang dalam rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait (Halim, 2007).

#### 2.1.2.2 Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah

Menurut Halim (dalam Wahyuni, 2008: 4), prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah meliputi:

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Artinya, tidak ada hal-hal yang ditutupi dalam ketiga tahapan tersebut. Dalam ketiga tahapan tersebut dilibatkan pihak-pihak lain sebagai pemangku kepentingan (*stakeholders*).
2. Akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan atau penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Artinya, pertanggungjawaban publik dalam bentuk laporan keuangan yang dapat diaudit, baik oleh internal auditor, yaitu inspektorat maupun oleh eksternal auditor, yaitu BPK-RI di daerah.
3. Nilai uang (*value for money*), yaitu penerapan 3 (tiga) prinsip dalam proses penganggaran, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
  - a. Ekonomi; pembelian barang dan jasa dengan kualitas tertentu pada harga terbaik. Artinya, barang dan jasa yang dibeli dengan mengeluarkan sejumlah dana harus sesuai dengan kualitasnya.

- b. Efisiensi; suatu produk atau hasil kerja tertentu dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Artinya, pencapaian kinerja dengan mengefisienkan penggunaan dana yang ada.
- c. Efektivitas; hubungan antar keluaran (hasil) dengan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Artinya, hasil yang dicapai harus sesuai dengan dana, waktu, dan tenaga yang dikorbankan untuk melaksanakannya.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan memerlukan sumber dana (modal) untuk membiayai pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) tersebut terhadap barang-barang publik (*public goods*) dan jasa pelayanannya. Dalam melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan publik, pemerintah daerah dapat membiayai dari sumber PAD, Dana Perimbangan, maupun Pinjaman Daerah. Kecilnya PAD dibanding dengan kebutuhan pembangunan, maka dalam beberapa hal, pemerintah daerah memerlukan pinjaman untuk digunakan pada proyek-proyek yang dapat menghasilkan pendapatan.

### 2.1.3 Kinerja keuangan daerah

#### 2.1.3.1 Definisi kinerja keuangan daerah

Dalam Pasal 1 ayat 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi,

pengeluaran hasil kerja organisasi, keputusan pelanggan, serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Suprasto, 2003).

Menurut Batafor (2011: 37), “Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat baik. Begitupun sebaliknya, apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya dapat dikatakan buruk dan sangat buruk”.

Syamsi (dalam Susantih dan Saftiana, 2008: 6) menyatakan bahwa “Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah guna memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya roda pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan dan mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang diatur dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Otonomi daerah menuntut adanya kemampuan pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan yang tidak tergantung kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### 2.1.3.2 Aspek dan tolak ukur kinerja keuangan daerah

Menurut Mardiasmo (2002: 30), dalam otonomi daerah terdapat 2 (dua) aspek kinerja keuangan daerah yang dituntut agar lebih baik dibandingkan dengan sebelum otonomi daerah yang disebut sebagai Reformasi Pembiayaan yang terdiri atas:

1. Daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan menggali berbagai sumber PAD. Kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksanaannya merupakan momentum dimulainya pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah secara penuh.
2. Manajemen pengeluaran daerah harus sesuai dengan azas otonomi daerah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus lebih akuntabel dan transparan yang tentunya menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah. Artinya, keuangan daerah dikelola dan digunakan secara efektif dan efisien.

Reformasi manajemen sektor publik terkait dengan perlunya digunakan model manajemen pemerintahan yang baru yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, karena perubahan ini tidak hanya perubahan paradigma, namun juga perubahan manajemen. Manajemen sektor publik berorientasi kinerja, bukan berorientasi pada kebijakan yang membawa konsekuensi pada perubahan pendekatan anggaran yang selama ini dikenal dengan pendekatan anggaran

tradisional (*traditional budget*) menjadi penganggaran berbasis kinerja (*performance budget*).

Menurut Halim (2007: 81), dalam penilaian indikator kinerja sekurang-kurangnya ada 4 (empat) tolak ukur penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu:

1. Penyimpangan antara realisasi anggaran dengan target yang ditetapkan dalam APBD. Artinya, kinerja keuangan daerah yang baik adalah kinerja yang mampu merealisasikan target pendanaan yang telah ditetapkan, yaitu minimal sekitar 80% dari yang telah ditargetkan.
2. Efisiensi biaya. Artinya, dalam membiayai suatu program atau kegiatan di daerah, pemerintah daerah menghemat penggunaan sumber dana yang ada.
3. Efektivitas program. Artinya, dalam membiayai suatu program atau kegiatan pembangunan di daerah agar diusahakan program tersebut tepat guna dan tepat sasaran, sehingga penggunaan dana yang ada tidak merupakan praktik penghamburan dana dengan modus dapat menjalankan tindakan korupsi.
4. Pemerataan dan keadilan. Artinya, penggunaan keuangan daerah dalam rangka pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus dilakukan secara merata dan adil, yaitu pembangunan dilaksanakan di seluruh pelosok daerah tanpa membedakan bentuk pembangunan yang dilaksanakan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penyimpangan antara realisasi anggaran dengan target yang ditetapkan akan dapat diketahui dalam bentuk LRAPBD tiap tahunnya. Efisiensi biaya akan dapat diketahui dari rasio antara pendapatan daerah yang terdiri atas PAD, Dana Perimbangan, Dana Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan jumlah pengeluaran daerah

berupa pengeluaran pembiayaan. Efektivitas program pembangunan yang dilaksanakan dapat diketahui dari implementasinya, baik dari segi waktu dan biaya. Pemerataan dan keadilan merupakan konsep pembangunan yang harus difaksanakan oleh pemerintah daerah dalam menggunakan dana APBD, yaitu merata untuk setiap daerah dan setiap sektor pembangunan dan dapat dirasakan oleh setiap masyarakat dalam rangka mensejahterakan kehidupan mereka.

#### 2.1.3.3 Pengukuran kinerja keuangan daerah

Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi, dan sebagainya. Pelayanan publik diberikan oleh pemerintah daerah melalui SKPD yang terkait dengan program atau kegiatan tertentu, karena masyarakat merupakan salah satu *stakeholders* organisasi sektor publik, sehingga pemerintah daerah tidak hanya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat saja, tetapi juga kepada masyarakat luas. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka diperlukan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu manajer publik dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat juga dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi (Mardiasmo, 2002).

Pengukuran kinerja dan indikator merupakan bagian dari proses manajemen strategi. Oleh karena itu, sebagai suatu elemen manajerial, kinerja merupakan kunci sukses suatu organisasi. Keputusan strategis disusun melalui kebijakan untuk mencapai sasaran dan target yang diinginkan. Pencapaian sasaran dan target membutuhkan informasi tentang aktual kinerja yang diharapkan dengan

membandingkannya terhadap sasaran yang telah ditetapkan (*setting objectives*). Informasi yang diharapkan harus tersusun secara sistematis dan merupakan desain pengukuran kinerja dan indikator yang terurai dan jelas.

Ada beberapa pemikiran untuk membangun organisasi pemerintah daerah melalui pengukuran kinerja pada setiap aktivitas kegiatannya, baik rutin dan pembangunan, dari sektor sampai dengan proyek. Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan pengambilan keputusan, sebagai alat untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Halim (dalam Kurniati, 2012) menyatakan bahwa pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD atau rasio keuangan daerah yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2007).

Suprasto (dalam Kurniati, 2012) menyatakan rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik, khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas, sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan

akuntabel, maka analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan (Mardiasmo, 2002).

#### 2.1.3.4 Kegunaan rasio keuangan sebagai indikator kinerja keuangan daerah

Hasil analisis rasio keuangan digunakan sebagai tolak ukur untuk (Mahmudi, 2011: 46-50):

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Berdasarkan hasil dari analisis rasio keuangan daerah akan diketahui tingkat kemandirian keuangan daerah.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah. Berdasarkan hasil dari analisis rasio keuangan daerah akan diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi keuangan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya. Berdasarkan hasil dari analisis rasio keuangan daerah akan diketahui apakah pemerintah daerah aktif atau tidak membelanjakan dana yang ada untuk kegiatan pembangunan.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah. Berdasarkan hasil dari analisis rasio keuangan daerah akan diketahui sumber manakah yang memberikan kontribusi terbesar dan terkecil dalam pembentukan pendapatan daerah yang terdiri atas PAD, Pendapatan Transfer (transfer pemerintah pusat (Dana Perimbangan) dan transfer pemerintah provinsi untuk kabupaten/kota), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.
5. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Berdasarkan hasil

dari analisis rasio keuangan daerah akan diketahui apakah daerah mengalami pertumbuhan atau tidak dalam perolehan pendapatan. Selain itu, juga akan diketahui apakah daerah mengalami pertumbuhan atau tidak dalam hal pengeluaran keuangan daerah. Hal ini dapat dilakukan dalam rentang waktu tertentu, misalnya 5 tahun atau 10 tahun terakhir. Hasilnya akan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan oleh pemerintah daerah untuk masa yang akan datang.

Menurut Mardiasmo (2002: 186), "Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel serta manfaat yang dapat diambil dan dirasakan oleh pemerintah daerah, maka analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan". Analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta (Halim, 2002).

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana preferensi (kecenderungan) yang terjadi. Selain itu, analisis rasio keuangan pada APBD dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah dinyatakan

bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD meliputi:

1. DPRD; badan yang memberikan otorisasi kepada pemerintah daerah untuk mengelola laporan keuangan daerah. Namun, lembaga ini dapat menerima atau menolak laporan keuangan yang diajukan oleh pemerintah daerah.
2. Badan eksekutif; merupakan badan penyelenggara pemerintahan yang menerima otorisasi pengelolaan keuangan daerah dari DPRD, seperti gubernur, bupati/walikota, serta pimpinan SKPD dan unit kerja pemerintah daerah lainnya, seperti Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD). Setiap LRAPBD harus ditandatangani oleh kepala daerah dan disahkan oleh DPRD.
3. Badan Pengawas Keuangan; badan yang melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Lembaga-lembaga yang termasuk dalam badan ini meliputi inspektorat jenderal (irjen) yang bertindak selaku internal auditor serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan BPK-RI yang bertindak selaku eksternal auditor.
4. Investor, kreditor, dan donatur; sebagai pihak yang menyediakan sumber keuangan bagi pemerintah daerah. Ketiga pihak tersebut dapat bertindak sebagai rekanan kerja (pihak ketiga) dalam suatu kegiatan pembangunan di daerah.
5. Analisis ekonomi dan pemerhati pemerintah daerah; pihak-pihak yang menaruh perhatian atas aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah, seperti lembaga pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), ilmuwan (dosen), peneliti (mahasiswa), dan lain-lain.

6. Rakyat; kelompok masyarakat yang menaruh perhatian terhadap aktivitas pemerintah, khususnya yang menerima pelayanan pemerintah daerah atau yang menerima produk dan jasa dari pemerintah daerah. Kelompok masyarakat ini seperti Kelompok Tani dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang dibina oleh SKPD terkait.
7. Pemerintah pusat; untuk menilai pertanggungjawaban gubernur, bupati/walikota sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dalam hal ini, pertanggungjawaban yang diberikan oleh kepala daerah adalah pertanggungjawaban secara vertikal.

Dengan demikian dalam organisasi pemerintah (sektor publik) untuk mengukur kinerja keuangan pemerintahannya dilakukan analisis rasio keuangan daerah terhadap APBD berdasarkan data yang terdapat dalam LRAPBD. Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah (Halim, 2007: 71) yang meliputi (1) Rasio Kemandirian atau Rasio Desentralisasi Fiskal, (2) Rasio Efektivitas, (3) Rasio Efisiensi, (4) Rasio Aktivitas terhadap PAD yang terdiri atas Rasio Belanja Rutin dan Rasio Belanja Pembangunan, (5) *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* atau Rasio Kemampuan Pemenuhan Hutang, dan (6) Rasio Pertumbuhan yang terdiri atas Rasio Penerimaan PAD, Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan, dan Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan. Keenam rasio keuangan daerah tersebut diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah atau rasio desentralisasi fiskal menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan

pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD yang diterima daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber pendapatan yang lain, misalnya bantuan pusat ataupun dari pinjaman.

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini (Mahmudi, 2011: 87):

$$\frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100$$

Total PAD adalah hasil penjumlahan dari komponen Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Halim, 2002).

Total Pendapatan Daerah merupakan hasil penjumlahan komponen-komponen sebagai berikut:

1. PAD,
2. Pendapatan Transfer yang terdiri atas:
  - a. Transfer pemerintah pusat (Dana Perimbangan) yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil bukan Pajak (sumber daya alam), DAU, dan DAK,
  - b. Transfer pemerintah provinsi (untuk kabupaten/kota). Untuk pemerintah provinsi hanya bersumber dari transfer pemerintah pusat (Dana Perimbangan).
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah,

Berdasarkan persamaan di atas dapat dinyatakan bahwa semakin besar total PAD terhadap total pendapatan daerah, maka rasio kemandirian keuangan

daerah akan semakin besar atau sebaliknya. Kriteria tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1  
Kriteria Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat Kinerja Keuangan	Kemandirian (%)
Sangat Tinggi	> 50
Tinggi	40 s.d. 50
Sedang	30 s.d. 40
Rendah	15 s.d. 30
Sangat Rendah	0 s.d. 15

Sumber: Mahmudi, 2011: 87

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah tergolong sangat tinggi dengan nilai rasio > 50%, tinggi dengan nilai rasio 40 s.d. 50%, sedang dengan nilai rasio 30 s.d. 40%, rendah dengan nilai rasio 15 s.d. 30%, dan sangat rendah dengan nilai rasio 0 s.d. 15%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama dari pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, atau sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD.

## 2. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi nyata (riil) daerah. Artinya, rasio ini merupakan hasil perbandingan (nisbah) antara PAD yang terealisasi dengan PAD yang

ditargetkan. Rasio efektivitas keuangan daerah dihitung menggunakan persamaan berikut ini (Mahmudi, 2011: 89):

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Anggaran Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Realisasi penerimaan PAD adalah total PAD yang mampu dicapai (dikumpulkan) dari jumlah yang ditargetkan. Target penerimaan PAD adalah total PAD yang ditargetkan untuk dikumpulkan dalam 1 tahun periode anggaran. Kinerja keuangan daerah yang baik, yaitu penerimaan PAD yang direalisasikan sama jumlahnya dengan PAD yang ditargetkan, sehingga akan berpotensi untuk menghasilkan nilai rasio keuangan ini sebesar 100%.

Berdasarkan persamaan di atas dapat dinyatakan bahwa semakin besar realisasi penerimaan PAD terhadap target penerimaan PAD, maka rasio efektivitas keuangan daerah akan semakin besar atau sebaliknya. Kriteria tingkat efektivitas keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2  
Kriteria Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah

Tingkat Kinerja Keuangan	Efektivitas (%)
Sangat Efektif	> 100
Efektif	90 s.d. 100
Cukup Efektif	80 s.d. 90
Kurang Efektif	60 s.d. 80
Tidak Efektif	0 s.d. 60

Sumber: Mahmudi, 2011: 89

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa tingkat efektivitas keuangan daerah tergolong sangat efektif dengan nilai rasio >100%, efektif dengan nilai rasio 90 s.d. 100%, cukup efektif dengan nilai rasio 80 s.d. 90%, kurang efektif dengan nilai rasio 60 s.d. 80%, dan tidak efektif dengan nilai rasio 0 s.d. 60%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio efektivitas keuangan daerah, maka

daerah telah menggunakan PAD secara efektif dalam membiayai kegiatan atau program kerja dalam rangka melaksanakan pembangunan dan mensejahterakan masyarakatnya atau sebaliknya. Semakin besar anggaran PAD yang mampu dicapai dari target yang telah direncanakan, maka kinerja SKPD, khususnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah akan semakin baik. Dengan kata lain, daerah tersebut telah menggunakan anggaran PAD secara efektif dan tepat sasaran bagi kegiatan pembangunan.

### 3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Utama (dalam Batafor, 2011: 46) menyatakan bahwa “Rasio efisiensi keuangan daerah merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan”. Pada sektor pelayanan masyarakat (publik) adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dengan pengorbanan seminimal mungkin. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil dengan biaya yang terendah atau dengan biaya minimal dan diperoleh hasil sesuai dengan yang diinginkan.

Rasio efisiensi keuangan daerah dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini (Mahmudi, 2011: 91):

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Realisasi belanja daerah adalah total belanja daerah yang mampu direalisasikan dari total yang dianggarkan. Dalam LRAPBD, belanja daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja tidak Terduga. Anggaran

belanja daerah adalah total belanja daerah yang direncanakan untuk dilakukan oleh pemerintah daerah dalam 1 tahun periode anggaran.

Berdasarkan persamaan di atas dapat dinyatakan bahwa semakin besar realisasi belanja daerah terhadap anggaran belanja daerah, maka rasio efisiensi keuangan daerah akan semakin kecil atau sebaliknya. Kriteria tingkat efisiensi keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.3  
Kriteria Tingkat Efisiensi Keuangan Daerah

Tingkat Kinerja Keuangan	Efisiensi (%)
Sangat Efisien	0 s.d. 60
Efisien	60 s.d. 80
Cukup Efisien	80 s.d. 90
Kurang Efisien	90 s.d. 100
Tidak Efisien	> 100

Sumber: Mahmudi, 2011: 91

Tabel 2.3 menunjukkan bahwa tingkat efisiensi keuangan daerah tergolong sangat efisien dengan nilai rasio 0 s.d. 60%, efisien dengan nilai rasio 60 s.d. 80%, cukup efisien dengan nilai rasio 80 s.d. 90%, kurang efisien dengan nilai rasio 90 s.d. 100%, dan tidak efisien dengan nilai rasio > 100%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah, maka hasil pembangunan daerah akan dapat dirasakan oleh masyarakat atau sebaliknya. Oleh karena itu, dalam perhitungannya, nilai yang diinginkan adalah realisasi belanja daerah < anggaran belanja daerah.

#### 4. Rasio Aktivitas (Keserasian Belanja Daerah)

Rasio aktivitas (keserasian belanja daerah) adalah rasio keuangan daerah yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Rasio aktivitas terdiri atas (a) Rasio Belanja Rutin terhadap PAD dan (b) Rasio Belanja

Pembangunan terhadap PAD. Secara lengkap kedua rasio di atas diuraikan sebagai berikut:

a) Rasio Belanja Rutin terhadap PAD

Rasio belanja rutin terhadap PAD adalah rasio keuangan daerah yang merupakan hasil nisbah (perbandingan) antara total belanja rutin yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap total APBD yang diterima. Artinya, rasio ini menggambarkan seberapa besar belanja rutin yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam 1 tahun periode anggaran.

Rasio belanja rutin dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini:

$$\frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Total belanja rutin adalah total belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dilakukan secara rutin tiap tahunnya. Artinya, pemerintah daerah selalu mengalokasikan sebagian dana APBD untuk melakukan belanja ini. Dalam LRAPBD, belanja rutin termasuk kedalam belanja operasi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan. Total APBD adalah hasil penjumlahan dari keempat komponen pembentuk APBD yang meliputi (1) PAD, yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, (2) Dana Perimbangan, (3) Pinjaman Daerah, dan (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Berdasarkan persamaan di atas dapat dinyatakan bahwa semakin besar rasio belanja rutin terhadap total APBD, artinya pemerintah daerah

mengalokasikan anggaran dana yang besar dari PAD untuk belanja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan belanja untuk anggota DPRD atau sebaliknya.

b) Rasio Belanja Pembangunan terhadap PAD

Rasio belanja pembangunan terhadap PAD adalah rasio keuangan daerah yang menggambarkan belanja untuk pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah dengan menggunakan dana yang diterima dari APBD yang bersumber dari (1) PAD, yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, (2) Dana Perimbangan, (3) Pinjaman Daerah, dan (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Rasio belanja pembangunan terhadap PAD dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini:

$$\frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Total belanja pembangunan adalah total belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk kegiatan pembangunan. Dalam LRAPBD, belanja pembangunan termasuk ke dalam belanja modal yang meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya. Semua komponen tersebut tidak selalu tetap (ada) tiap tahun anggaran, terutama untuk komponen Belanja Aset Lainnya. Total APBD adalah hasil penjumlahan dari keempat komponen pembentuk APBD yang meliputi (1) PAD, yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, (2) Dana Perimbangan, (3) Pinjaman Daerah, dan (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Berdasarkan persamaan di atas dapat dinyatakan bahwa semakin besar rasio belanja pembangunan terhadap total APBD, maka semakin tinggi tingkat belanja pembangunan terhadap PAD, artinya pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dana yang besar dari PAD dalam melakukan belanja modal, baik berupa barang maupun jasa untuk kepentingan jalannya pemerintahan atau sebaliknya.

Kriteria tingkat belanja rutin dan belanja pembangunan terhadap PAD dapat dilihat pada Tabel 2.4

Tabel 2.4  
Kriteria Tingkat Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan terhadap PAD

Tingkat Kinerja Keuangan	Aktivitas (%)
Sangat Serasi	> 50
Serasi	40 s.d. 50
Cukup Serasi	30 s.d. 40
Tidak Serasi	15 s.d. 30
Sangat Tidak Serasi	0 s.d. 15

Sumber: Hersey dan Blanchard dalam Dwiranra, 2007: 51

Tabel 2.4 menunjukkan bahwa tingkat belanja rutin dan belanja pembangunan terhadap PAD tergolong sangat serasi dengan nilai rasio > 50%, serasi dengan nilai rasio 40 s.d. 50%, cukup serasi dengan nilai rasio 30 s.d. 40%, tidak serasi dengan nilai rasio 15 s.d. 30%, dan sangat tidak serasi dengan nilai rasio 0 s.d. 15%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat belanja rutin dan tingkat belanja pembangunan terhadap PAD mengandung arti bahwa pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dana yang besar dari PAD dalam melakukan belanja belanja rutin dan pembangunan atau sebaliknya.

### 5. *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) atau Rasio Kemampuan Pemenuhan Hutang

*Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) atau rasio kemampuan pemenuhan hutang adalah rasio keuangan daerah yang merupakan hasil perbandingan (nisbah) antara penjumlahan PAD, Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya serta DAU setelah dikurangi Belanja Wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo.

DSCR dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini:

$$\frac{(PAD + BD + DAU) - BW}{\text{Total Pengeluaran Daerah} \times \text{SBI}}$$

PAD merupakan hasil penjumlahan Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Bagian Daerah dari PBB merupakan hasil penjumlahan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil bukan Pajak (sumber daya alam). DAU adalah dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) yang berhubungan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan merupakan implikasi dari adanya penyerahan kewenangan pusat kepada daerah. Belanja Wajib dapat disamakan dengan belanja rutin (belanja operasi). SBI merupakan singkatan dari suku bunga Sertifikat Bank Indonesia.

Berdasarkan persamaan di atas dapat dinyatakan bahwa semakin besar selisih antara hasil penjumlahan PAD, Bagian Daerah dan DAU dengan Belanja Wajib atau Belanja Rutin, maka DSCR akan semakin besar atau sebaliknya.

Secara spesifik, kriteria tingkat DSCR belum memiliki ketentuan yang jelas (pasti) sampai sekarang, namun dalam penelitian ini, kriteria yang digunakan untuk rasio ini adalah jika DSCR bernilai positif (+), maka daerah memiliki kemampuan untuk mengembalikan hutang pada tahun anggaran yang sama. Sebaliknya, jika DSCR bernilai negatif (-), maka daerah tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan hutang pada tahun anggaran yang sama. Artinya, pemerintah daerah baru akan dapat mengembalikan hutang pada tahun-tahun berikutnya.

#### 6. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan adalah rasio keuangan daerah yang bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode keperiode berikutnya (dari tahun ke tahun berikutnya). Pertumbuhan yang dimaksud disini adalah pertumbuhan pendapatan asli daerah, total pendapatan daerah, total belanja rutin, dan total belanja pembangunan dari suatu periode.

Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian. Rasio ini dapat dihitung dengan periode tertentu, misalnya tiap 5 tahun atau 10 tahun, tergantung dengan kebutuhan.

Rasio pertumbuhan terdiri atas 3 (tiga) rasio sebagai berikut:

a) Rasio Penerimaan PAD

Rasio penerimaan PAD merupakan hasil perbandingan (nisbah) antara selisih realisasi penerimaan PAD tahun berjalan ( $i$ ) dengan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya ( $r$ ) terhadap realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya ( $r$ ). Rasio penerimaan PAD dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } i - r}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } r} \times 100\%$$

Berdasarkan persamaan di atas dapat dinyatakan bahwa semakin besar realisasi penerimaan PAD pada tahun berjalan ( $i$ ), maka rasio penerimaan PAD akan semakin besar atau sebaliknya.

b) Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan

Rasio pertumbuhan total pendapatan merupakan hasil perbandingan (nisbah) antara selisih realisasi penerimaan total pendapatan tahun berjalan ( $i$ ) dengan realisasi penerimaan total pendapatan tahun sebelumnya ( $r$ ) terhadap realisasi penerimaan total pendapatan tahun sebelumnya ( $r$ ). Rasio pertumbuhan total pendapatan dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan } \sum \text{Pendapatan } i - r}{\text{Realisasi Penerimaan } \sum \text{Pendapatan } r} \times 100\%$$

Berdasarkan persamaan di atas dapat dinyatakan bahwa semakin besar realisasi penerimaan total pendapatan tahun berjalan ( $i$ ), maka rasio pertumbuhan total pendapatan akan semakin besar atau sebaliknya.

c) Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan

Rasio pertumbuhan belanja pembangunan merupakan hasil perbandingan (nisbah) antara selisih realisasi belanja pembangunan tahun berjalan ( $i$ ) dengan realisasi belanja pembangunan tahun sebelumnya ( $r$ ) terhadap realisasi belanja pembangunan tahun sebelumnya ( $r$ ). Rasio pertumbuhan belanja pembangunan dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini:

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Pembangunan } i - r}{\text{Realisasi Belanja Pembangunan } r} \times 100\%$$

Berdasarkan persamaan di atas dapat dinyatakan bahwa semakin besar realisasi belanja pembangunan pada tahun berjalan ( $i$ ), maka rasio pertumbuhan belanja pembangunan akan semakin besar atau sebaliknya.

#### 2.1.4 Pertumbuhan ekonomi

##### 2.1.4.1 Definisi pertumbuhan ekonomi

Menurut Kuznets (dalam Arsyad, 2010: 46), "Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu negara (daerah) untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya yang terwujud dengan adanya kenaikan pengeluaran (*output*) daerah secara terus-menerus yang disertai dengan kemajuan teknologi serta adanya penyesuaian kelembagaan, sikap, dan ideologi yang dibutuhkannya".

Suryana (2000: 70) menyatakan bahwa "Pertumbuhan ekonomi adalah proses pembangunan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan hasil pendapatan". Menurut Asfia (2006: 173), "Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi terjadinya perkembangan *Gross National Product* (GNP) potensial yang mencerminkan adanya pertumbuhan *output* per kapita dan meningkatnya standar hidup masyarakat".

Menurut Arsyad (2010: 50), “Suatu wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan PDRB riil di wilayah tersebut”. Apabila tingkat pertumbuhan ekonomi bernilai negatif berarti kegiatan perekonomian menunjukkan penurunan, sebaliknya jika tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut bernilai positif berarti kegiatan perekonomian mengalami peningkatan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dinyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan perekonomian di suatu daerah yang menyebabkan bertambahnya produksi barang dan jasa dan kemakmuran masyarakat yang meningkat.

#### 2.1.4.2 Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Najiah (2013: 16), “Pendapatan Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu daerah”. Asfia (2006: 89) menyatakan bahwa “Pendapatan Domestik Regional Bruto merupakan indikator ekonomi makro suatu daerah yang menggambarkan ada atau tidaknya perkembangan perekonomian daerah. Dengan menghitung PDRB secara teliti, maka dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai keberhasilan pembangunan di suatu daerah yang memperlihatkan laju pertumbuhan ekonomi yang mewakili peningkatan produksi pada berbagai sektor lapangan usaha yang ada”.

Berdasarkan kedua pendapat di atas dapat dinyatakan bahwa PDRB adalah angka yang ditunjukkan oleh besarnya tingkat pertumbuhan produk domestik regional bruto suatu daerah yang diukur atas dasar harga konstan.

Menurut Sukirno (2008: 8), penghitungan PDRB dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) metode:

#### 1. Metode langsung

Penghitungan metode langsung ini dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran (Sukirno, 2008).

##### a. PDRB dengan Pendekatan Produksi (*Production Approach*)

PDRB dengan pendekatan produksi adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi pada suatu jangka waktu tertentu. Pendekatan produksi adalah penghitungan nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu sektor ekonomi dengan cara mengurangi biaya dari total produksi bruto sektor atau subsektor tersebut (Tarigan, 2005).

Pendekatan produksi banyak digunakan untuk memperkirakan nilai tambah dari kegiatan/sektor yang produksinya berbentuk fisik/barang. Artinya, pendekatan ini sesuai untuk kegiatan industri manufaktur. PDRB menurut pendekatan produksi terbagi atas sembilan lapangan usaha, yaitu pertanian, industri, pertambangan, listrik dan air minum, bangunan, dan konstruksi, perdagangan, angkutan, lembaga keuangan, dan jasa (Suryana, 2000).

Untuk menghitung PDRB dengan Pendekatan Produksi digunakan persamaan berikut ini (Suryana, 2000: 113):

$$\text{NTB} = \text{NP} - \text{BA}$$

Keterangan:

NTB = Nilai Tambah Bruto = PDRB

NP = Nilai Produksi = PAD

BA = Biaya Antara = Pembiayaan *Netto*

b. PDRB dengan Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

PDRB dengan pendekatan pendapatan adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut dalam proses produksi di suatu wilayah pada jangka waktu tertentu (setahun). Penghitungan PDRB dengan pendekatan ini diperoleh dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi yang komponennya terdiri dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan ditambah dengan penyusutan dan pajak langsung yang diperoleh daerah (Sukirno, 2008).

Untuk menghitung PDRB dengan Pendekatan Pendapatan digunakan persamaan berikut (Sukirno, 2008: 93):

$$NTB = PL + U + P + S$$

Keterangan:

NTB = Nilai Tambah Bruto = PDRB

PL = Pajak Langsung = Pendapatan Pajak Daerah

U = Upah = Belanja Pegawai

P = Penyusutan = Pengeluaran Pembiayaan (PP)

S = Surplus = Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

c. PDRB dengan Pendekatan Pengeluaran (*Expend Approach*)

PDRB dengan pendekatan pengeluaran adalah jumlah seluruh pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor bersih di suatu wilayah. Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini dilakukan dengan bertitik tolak dari penggunaan akhir barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik (Tarigan, 2005).

Untuk menghitung PDRB dengan Pendekatan Pengeluaran digunakan persamaan berikut (Tarigan, 2005: 122):

$$\text{NTB} = \text{KRTLS} + \text{KP} + \text{PMTDB} + \text{PSEB}$$

Keterangan:

NTB = Nilai Tambah Bruto = PDRB  
 KRTLS = Konsumsi Rumah Tangga dan Lembaga Swasta  
 KP = Konsumsi Pemerintah = Belanja Modal  
 PMTDB = Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto  
 PSEB = Perubahan Stok dan Ekspor Bersih

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa penghitungan PDRB dengan metode langsung dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Walaupun pendekatan perhitungan yang digunakan berbeda, namun akan menghasilkan nilai perhitungan yang sama.

## 2. Metode tidak Langsung (Metode Alokasi)

Dalam metode tidak langsung (metode alokasi), PDRB suatu wilayah diperoleh dengan menghitung PDRB wilayah tersebut melalui alokasi PDRB wilayah yang lebih luas. Untuk melakukan alokasi PDRB wilayah ini digunakan beberapa alokator, seperti jumlah produksi fisik, tenaga kerja, penduduk, dan alokator tidak langsung lainnya, sehingga dapat diperhitungkan persentase bagian masing-masing daerah (provinsi dan kabupaten/kota) terhadap nilai tambah setiap sektor dan subsektor (Suparmoko, 2002).

Penyajian PDRB dengan metode tidak langsung (metode alokasi) meliputi:

### a. PDRB atas Dasar Harga Berlaku

Semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahunnya, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen PDRB. PDRB atas dasar harga berlaku

menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah (Suparmoko, 2002).

#### b. PDRB atas Dasar Harga Konstan

Akumulasi pendapatan dinilai atas dasar harga tetap, maka perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan produksi riil bukan karena kenaikan harga atau inflasi. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan yang terdapat pada daerah tersebut dari tahun ke tahun (Suryana, 2000).

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa penyajian PDRB dengan menggunakan metode tidak langsung terdiri atas PDRB atas dasar harga berlaku yang menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah dan PDRB atas dasar harga konstan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor yang terdapat pada daerah tersebut dari tahun ke tahun.

Dalam penelitian ini akan digunakan penghitungan PDRB kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu dengan metode langsung, khususnya dengan pendekatan pendapatan, yaitu jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut dalam proses produksi di suatu wilayah pada jangka waktu tertentu (setahun).

#### 2.1.5 Pengaruh rasio keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi

##### 2.1.5.1 Hubungan rasio kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi

Menurut Saragih (2003: 33), "Peningkatan PAD sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi". Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif

mempunyai kemungkinan untuk meningkatkan PAD-nya. Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki pendapatan per kapita yang lebih baik (Harianto dan Adi, 2007). Apabila penerimaan PAD suatu daerah meningkat, maka dana yang dimiliki pemerintah daerah juga akan meningkat yang tentunya akan memberikan keuntungan kepada daerah, karena dana tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerahnya, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah tersebut meningkat pula. Peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka masyarakat dapat memberdayakan kemampuan dirinya dalam rangka menghasilkan barang dan jasa yang bernilai ekonomis yang akan mampu memberikan kontribusi pada peningkatan PAD daerah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada hubungan timbal balik antara PAD dengan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Implikasi dari adanya hubungan tersebut, maka rasio kemandirian keuangan daerah juga memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

#### 2.1.5.2 Hubungan rasio efektivitas keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2008) dan Ani (2014) dan membuktikan bahwa rasio efektivitas berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio efektivitas keuangan daerah, maka pertumbuhan ekonomi daerah akan semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah rasio efektivitas keuangan daerah, maka pertumbuhan ekonomi daerah akan semakin tinggi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada hubungan timbal balik antara efektivitas dengan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Implikasi dari adanya hubungan tersebut, maka rasio efektivitas keuangan daerah juga memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

#### 2.1.5.3 Hubungan rasio efisiensi keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi

Hamzah (2008) membuktikan bahwa rasio efisiensi berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Putro (2010) menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Yustikasari (2010) menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap alokasi belanja modal pada provinsi di Pulau Jawa. Hasil penelitian membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk peningkatan yang berkelanjutan (kontinuitas) terhadap PDRB (Kuncoro, 2004). Syarat fundamental untuk pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pengadaaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertumbuhan penduduk. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya yang dilakukan oleh pemerintah daerah diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Belanja modal termasuk bagian dari alokasi belanja langsung. Namun, secara lengkap, alokasi belanja langsung terdiri atas 3 (tiga) komponen yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Alokasi belanja langsung tidak dipengaruhi secara parsial oleh komponen belanja yang

terdapat didalamnya. Artinya, ketiga komponen belanja tersebut akan mempengaruhi secara simultan alokasi belanja langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada hubungan timbal balik antara belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Implikasi dari adanya hubungan tersebut, maka rasio efisiensi keuangan daerah juga memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

#### 2.1.5.4 Hubungan rasio aktivitas terhadap pertumbuhan ekonomi

Rasio aktivitas bertujuan untuk menggambarkan aktivitas pemerintah daerah dalam melakukan belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Rasio aktivitas terdiri atas (1) Rasio Belanja Rutin terhadap PAD dan (2) Rasio Belanja Pembangunan terhadap PAD. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengelola keuangan daerah secara dengan baik berdasarkan skala prioritas. Berdasarkan banyak fakta di lapangan (daerah), aktivitas belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah mayoritas mengandalkan Dana Transfer dari pemerintah pusat atau Dana Perimbangan dalam melakukan kegiatan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas erat kaitannya dengan belanja modal.

Patikawa (2011) menguji pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pasca pelaksanaan undang-undang otonomi daerah pada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa rasio aktivitas yang terdiri atas rasio keserasian belanja operasional (rasio belanja rutin terhadap PAD) dan rasio keserasian belanja modal (rasio belanja pembangunan terhadap PAD) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.

Rahmawati (2010) menguji pengaruh PAD terhadap alokasi belanja langsung pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah. Pemerintah daerah yang memiliki PAD tinggi, maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga semakin tinggi.

Prakosa (2008) menguji pengaruh PAD terhadap prediksi belanja daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara empiris penelitian ini membuktikan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap prediksi belanja daerah. Putro (2010) menguji pengaruh PAD terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Implikasi dari keempat hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa rasio aktivitas berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.1.5.5 Hubungan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) atau rasio kemampuan pemenuhan hutang terhadap pertumbuhan ekonomi

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa DSCR menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya (hutang) dengan menggunakan dana yang diperoleh dari PAD, pendapatan dari PBB, dan BPHTB.

Hal ini menunjukkan bahwa DSCR erat kaitannya total pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah. Pendapatan utama pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintahan tetap berasal dari PAD. Telah diuraikan di atas bahwa PAD erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, maka

implikasinya adalah DSCR juga memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

#### 2.1.5.6 Hubungan rasio pertumbuhan terhadap pertumbuhan ekonomi

Penelitian yang dilakukan oleh Najjah (2013) membuktikan bahwa PAD dan Dana Perimbangan sebagai sumber pendapatan daerah berpengaruh terhadap pembentukan PDRB, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Implikasi hasil penelitian ini dapat dikaitkan dengan rasio pertumbuhan, sehingga dapat dinyatakan bahwa rasio pertumbuhan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah.

## 2.2 Review Penelitian Terdahulu (*Theoretical Mapping*)

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, penelitian sejenis yang pernah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 2.5

Tabel 2.5  
Penelitian Terdahulu

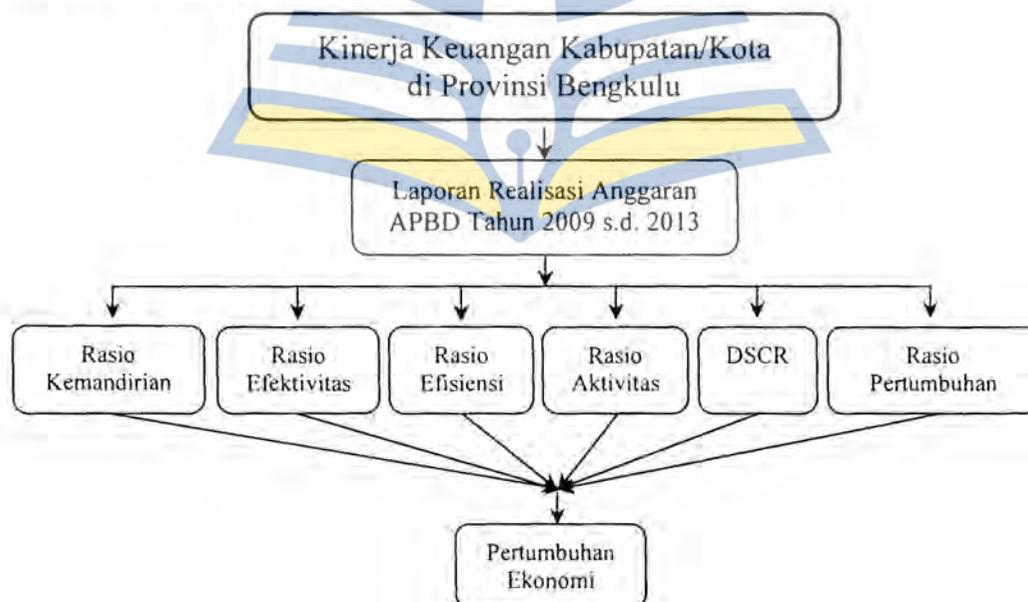
No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Azhar (2008)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah	Desentralisasi Fiskal, Upaya Fiskal, Tingkat Kemampuan Pembiayaan	Kinerja keuangan yang diukur melalui desentralisasi fiskal, upaya fiskal, dan tingkat kemampuan pembiayaan memiliki perbedaan-perbedaan, namun untuk tingkat efisiensi penggunaan anggaran tidak memiliki perbedaan yang signifikan.
2	Alkaf (2009)	Analisis Rasio Kinerja Keuangan Daerah Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan	Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Aktivitas, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kontribusi	Rasio Kemandirian selama lima tahun cukup mandiri dalam pengelolaan keuangan daerah walaupun tahun 2003 dan 2005 mengalami penurunan kinerja tapi masih dibatas normal, Rasio Efektivitas dan Efisiensi selama lima tahun cukup efektif dalam merealisasikan PAD berdasarkan potensi riil daerah dan cukup efisien uang

				yang dikeluarkan dalam memungut PAD dibandingkan pendapatan PAD-nya, Rasio Aktivitas sangat baik karena Pemda tidak melakukan pinjaman keluar instansi daerah, Rasio Pertumbuhan, tingkat kinerja selama 5 tahun cukup baik karena tingkat pertumbuhan sangat cepat, Rasio Kontribusi, tingkat kontribusi penerimaan komponen dalam PAD selama 5 tahun cukup baik diatas 70%. Jadi kinerja keuangan daerah Kota Banjarbaru selama 5 tahun cukup baik
3	Solikhah (2011)	Analisis Kemampuan Kemandirian Keuangan Daerah dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2000-2009	Rasio Kemampuan Daerah, Rasio Kemandirian Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi	Rasio kemampuan keuangan daerah dengan rata-rata 6,68% yang tergolong rendah. Rasio kemandirian keuangan daerah dengan rata-rata 7,84% mempunyai hubungan instruktif. Kemampuan keuangan daerah berpengaruh negatif, tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, artinya semakin tinggi tingkat kemampuan daerah tidak akan mengurangi pertumbuhan ekonomi. Kemandirian daerah berpengaruh positif dan signifikan, artinya semakin tinggi rasio kemandirian daerah, maka akan menambah tingkat pertumbuhan ekonomi
4	Boedi (2012)	Analisis Kinerja Keuangan pada APBD Pemerintah Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan	Rasio Kemandirian, Rasio Aktivitas, DSCR, rasio Desentralisasi Fiskal	Kinerja keuangan pada APBD Pemerintah Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan masih bergantung pada pemerintah pusat, walaupun efektivitas PAD-nya dikategorikan sangat efektif. Tingkat kemandirian rendah sekali, sehingga Pemda Kabupaten Banjar diharapkan agar berusaha lebih keras lagi meningkatkan pendapatan, terutama PAD-nya, seperti pajak dan retribusi daerah, sektor pertambangan, dan sektor-sektor lainnya yang memiliki potensi untuk ditingkatkan

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah jumlah rasio keuangan daerah yang digunakan sebagai variabel independen (bebas) yang meliputi 6 (enam) rasio, (1) Rasio Kemandirian atau Rasio Desentralisasi Fiskal, (2) Rasio Efektivitas, (3) Rasio Efisiensi, (4) Rasio Aktivitas terhadap PAD yang terdiri atas Rasio Belanja Rutin dan Rasio Belanja Pembangunan, (5) *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) atau Rasio Kemampuan Pemenuhan Hutang, dan (6) Rasio Pertumbuhan yang terdiri atas Rasio Penerimaan PAD, Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan, dan Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan. Hasil perhitungan dari masing-masing rasio keuangan akan dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah sebagai variabel dependen (terikat).

### 2.3 Kerangka Konsep

Berdasarkan rumusan masalah, maka kerangka konsep dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1



Gambar 2.1  
Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 menunjukkan bahwa kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu diketahui melalui 6 (enam) indikator kinerja sebagai variabel penelitian yang meliputi (1) Rasio Kemandirian atau Rasio Desentralisasi Fiskal, (2) Rasio Efektivitas, (3) Rasio Efisiensi, (4) Rasio Aktivitas terhadap PAD yang terdiri atas Rasio Belanja Rutin dan Rasio Belanja Pembangunan, (5) *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) atau Rasio Kemampuan Pemenuhan Hutang, dan (6) Rasio Pertumbuhan yang terdiri atas Rasio Penerimaan PAD, Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan, dan Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan. Keenam rasio keuangan tersebut diketahui dengan mengolah data sekunder berupa data LRAPBD tahun anggaran periode 2009 s.d. 2013. Selanjutnya keenam rasio keuangan daerah tersebut akan diteliti pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah.

## 2.4 Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1 Rasio kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi

Penelitian yang dilakukan oleh Solikhah (2011) membuktikan Kemandirian daerah berpengaruh positif dan signifikan, artinya semakin tinggi rasio kemandirian daerah, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Ani (2014) membuktikan bahwa rasio kemandirian menunjukkan bahwa berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio kemandirian, maka pertumbuhan ekonomi daerah tersebut juga akan semakin

tinggi. Sebaliknya, semakin rendah rasio kemandirian, maka pertumbuhan ekonomi daerah tersebut juga akan semakin rendah.

Berdasarkan hasil dari kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengembangan hipotesis berdasarkan kedua penelitian di atas yang terkait dengan rasio kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi serta teori-teori yang ada, yaitu:

$H_1$  = Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu

#### 2.4.2 Rasio efektivitas keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi

Penelitian yang dilakukan oleh Hamzah (2008) dan Ani (2014) dan membuktikan bahwa rasio efektivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio efektivitas keuangan daerah, maka pertumbuhan ekonomi daerah akan semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah rasio efektivitas keuangan daerah, maka pertumbuhan ekonomi daerah akan semakin tinggi.

Berdasarkan hasil dari kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa rasio efektivitas keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengembangan hipotesis berdasarkan kedua penelitian di atas yang terkait dengan rasio efektivitas keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi serta teori-teori yang ada, yaitu:

$H_2$  = Rasio efektivitas keuangan daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu

### 2.4.3 Rasio efisiensi keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi

Penelitian yang dilakukan oleh Hamzah (2008) terhadap kabupaten/kota di Jawa Timur membuktikan bahwa rasio efisiensi berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Ani (2014) menunjukkan bahwa rasio efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil kedua penelitian tersebut menemukan hasil yang berlawanan, sehingga secara umum masih perlu diteliti lebih lanjut apakah rasio efisiensi berpengaruh atau tidak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengembangan hipotesis berdasarkan kedua penelitian di atas yang terkait dengan rasio efisiensi keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi serta teori-teori yang ada, yaitu:

$H_3$  = Rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu

### 2.4.4 Rasio aktivitas dan pertumbuhan ekonomi

Rasio aktivitas bertujuan untuk menggambarkan aktivitas pemerintah daerah dalam melakukan belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengelola keuangan daerah secara dengan baik berdasarkan skala prioritas. Selain itu, berdasarkan banyak fakta di lapangan (daerah), aktivitas belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah mayoritas mengandalkan Dana Transfer dari pemerintah pusat atau Dana Perimbangan dalam melakukan kegiatan pembangunan.

Pengembangan hipotesis berdasarkan kedua penelitian di atas yang terkait dengan rasio aktivitas dan pertumbuhan ekonomi serta teori-teori yang ada, yaitu:

$H_4$  = Rasio aktivitas berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu

2.4.5 *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) atau rasio kemampuan pemenuhan hutang dan pertumbuhan ekonomi

Penelitian mengenai DSCR sebagai salah satu rasio kinerja keuangan daerah yang bertujuan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi pinjamannya terhadap pertumbuhan ekonomi tidak pernah dilakukan. DSCR merupakan hasil perbandingan antara penjumlahan PAD, Bagian Daerah dari PBB, BPHTB, penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya serta DAU setelah dikurangi Belanja Wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo.

Semua komponen keuangan di atas tidak ada kaitannya dengan PDRB sebagai indikator utama dalam mengukur pertumbuhan ekonomi di daerah, sehingga dapat dinyatakan bahwa DSCR tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengembangan hipotesis terkait dengan DSCR dan pertumbuhan ekonomi serta teori-teori yang ada, yaitu:

$H_5$  = DSCR berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu

2.4.6 Rasio pertumbuhan dan pertumbuhan ekonomi

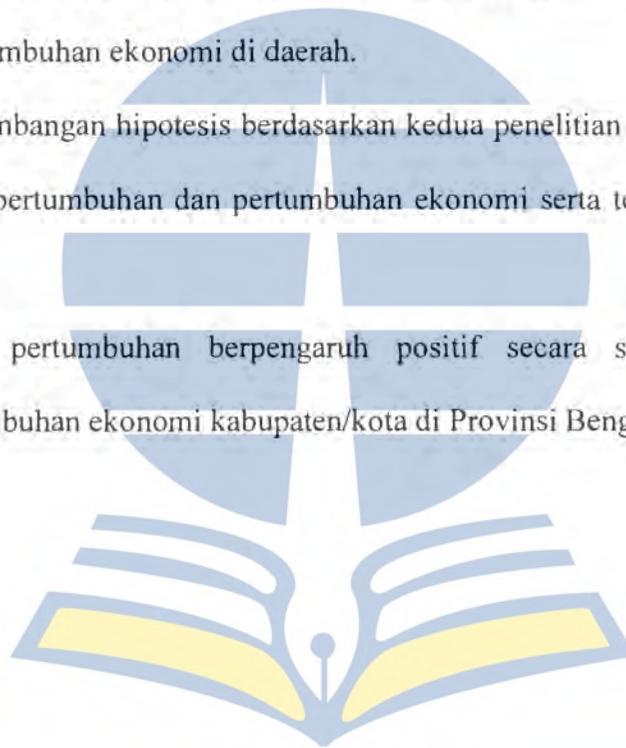
Rasio pertumbuhan merupakan rasio yang erat kaitannya dengan PAD, total pendapatan, dan belanja pembangunan. Jika PAD meningkat, maka akan berimplikasi terhadap peningkatan total pendapatan yang diterima oleh daerah. Dengan terjadinya peningkatan pada total pendapatan, maka seyogyanya pemerintah daerah akan membelanjakannya dalam bentuk belanja pembangunan

(belanja modal). Artinya, jika suatu daerah memiliki peningkatan pendapatan daerah, hal tersebut mengindikasikan bahwa daerah tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Najiah (2013) membuktikan bahwa PAD dan Dana Perimbangan sebagai sumber pendapatan daerah berpengaruh terhadap pembentukan PDRB, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Implikasi hasil penelitian ini dapat dikaitkan dengan rasio pertumbuhan, sehingga dapat dinyatakan bahwa rasio pertumbuhan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah.

Pengembangan hipotesis berdasarkan kedua penelitian di atas yang terkait dengan rasio pertumbuhan dan pertumbuhan ekonomi serta teori-teori yang ada, yaitu:

$H_6 =$  Rasio pertumbuhan berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik variabel-variabel yang diteliti dalam suatu situasi. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengetahui nilai variabel terikat (*dependent variable*) terhadap variabel bebas (*independent variable*), baik satu variabel ataupun lebih, dengan membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain dan dinyatakan dalam bentuk angka, tabel, ataupun grafik, sehingga hasil penelitian dapat dideskripsikan dengan jelas (Sugiyono, 2012).

Penelitian ini dititikberatkan pada pengukuran kinerja kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu yang terdiri atas 11 pemerintah daerah (1 pemerintah provinsi, 1 pemerintah kota, dan 9 pemerintah kabupaten, yaitu Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Lebong, dan Kabupaten Rejang Lebong).

Pengukuran kinerja keuangan daerah dilakukan melalui analisis rasio keuangan daerah yang meliputi 6 (enam) rasio keuangan daerah, yaitu (1) Rasio Kemandirian atau Rasio Desentralisasi Fiskal, (2) Rasio Efektivitas, (3) Rasio Efisiensi, (4) Rasio Aktivitas terhadap PAD yang terdiri atas Rasio Belanja Rutin

dan Rasio Belanja Pembangunan, (5) *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) atau Rasio Kemampuan Pemenuhan Hutang, dan (6) Rasio Pertumbuhan yang terdiri atas Rasio Penerimaan PAD, Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan, dan Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan. Dari keenam rasio keuangan daerah tersebut akan diteliti pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing.

### 3.2 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2012: 59), "Populasi adalah obyek yang akan diteliti". Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bengkulu. Sasaran populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 11 pemerintah daerah, yaitu (1) Provinsi Bengkulu, (2) Kota Bengkulu, (3) Kabupaten Bengkulu Selatan, (4) Kabupaten Bengkulu Tengah, (5) Kabupaten Bengkulu Utara, (6) Kabupaten Mukomuko, (7) Kabupaten Kaur, (8) Kabupaten Seluma, (9) Kabupaten Kepahiang, (10) Kabupaten Lebong, dan (11) Kabupaten Rejang Lebong.

Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *total sampling*. Metode *total sampling* adalah metode penarikan sampel dari seluruh anggota populasi yang ada, sehingga seluruh anggota populasi akan menjadi sampel penelitian. Berdasarkan metode *sampling* ini, maka sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Bengkulu yang berjumlah 11 pemerintah daerah.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu metode (cara) pengumpulan data melalui catatan yang diarsipkan dan dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data tersebut disebut sebagai data sekunder, yaitu data yang telah ada dan dapat digunakan langsung oleh peneliti dalam pengolahan data (hasil penelitian pada Bab IV). Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu yang terdiri atas satu pemerintah provinsi, satu pemerintah kota, dan sembilan pemerintah kabupaten.

Data laporan keuangan dari kesebelas pemerintah kabupaten/kota tersebut berupa LRAPBD hasil pemeriksaan (*audit*) BPK-RI Perwakilan Provinsi Bengkulu tahun pemeriksaan 2010 s.d. 2014. Artinya, data LRAPBD yang digunakan merupakan laporan realisasi anggaran selama 6 (enam) tahun terakhir, yaitu tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014. LRAPBD tahun 2009 dibutuhkan untuk menghitung rasio pertumbuhan.

### 3.4 Definisi Operasional dan Metode Pengukuran Variabel

Agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman konsep, maka definisi operasional dan pengukuran metode variabel dalam penelitian sebagai berikut:

1. Rasio kemandirian keuangan daerah adalah rasio keuangan yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Pengukuran terhadap variabel ini dilakukan dengan

membandingkan antara total PAD dengan total pendapatan daerah dikali 100%. Skala yang digunakan adalah skala rasio.

2. Rasio efektivitas keuangan daerah adalah rasio keuangan yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi nyata (riil) daerah. Pengukuran terhadap variabel ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD berdasarkan potensi riil daerah dikali 100%. Skala yang digunakan adalah skala rasio.
3. Rasio efisiensi keuangan daerah adalah rasio keuangan yang menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan. Pengukuran terhadap variabel ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi belanja daerah dengan anggaran belanja daerah dikali 100%. Skala yang digunakan adalah skala rasio.
4. Rasio aktivitas (keserasian belanja daerah) adalah rasio keuangan yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Pengukuran terhadap variabel ini merupakan nilai rata-rata dari rasio belanja rutin terhadap PAD dan rasio belanja pembangunan terhadap PAD. Skala yang digunakan adalah skala rasio.
5. *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) atau Rasio Kemampuan Pemenuhan Hutang adalah rasio keuangan yang menggambarkan tingkat kemampuan daerah untuk mengembalikan pinjaman (melunasi hutang) kepada pihak ketiga.

Pengukuran terhadap variabel ini dilakukan dengan membandingkan antara hasil penjumlahan PAD, Bagian Daerah dari PBB, BPHTB, penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya serta DAU dikurang Belanja Wajib dengan hasil jumlah antara angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo, lalu dikali 100%. Skala yang digunakan adalah skala rasio.

6. Rasio pertumbuhan adalah rasio keuangan yang bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode keperiode berikutnya (dari tahun ke tahun berikutnya). Pengukuran terhadap variabel ini merupakan nilai rasio rata-rata dari rasio penerimaan PAD, realisasi pertumbuhan total pendapatan, dan realisasi pertumbuhan belanja pembangunan. Skala yang digunakan adalah skala rasio.
7. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya yang terwujud dengan adanya kenaikan pengeluaran daerah secara terus-menerus yang ditujukan untuk peningkatan yang berkelanjutan terhadap PDRB. Penghitungan PDRB dilakukan dengan menggunakan pendekatan pendapatan dengan menjumlahkan Pendapatan Pajak Daerah, Belanja Pegawai, Pengeluaran Pembiayaan, dan SiLPA. Pertumbuhan ekonomi dinyatakan dengan parameter Laju Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan data LRAPBD, pengukuran terhadap PDRB untuk masing-masing tahun anggaran dilakukan dengan menghitung selisih antara total pendapatan dengan total pembiayaan (pengeluaran) untuk masing-masing tahun anggaran.

Untuk mengetahui Laju Pertumbuhan Ekonomi digunakan persamaan berikut ini (Putro, 2010: 9):

$$\text{Laju Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

Berdasarkan persamaan di atas, Laju Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu diperoleh dengan membandingkan PDRB pada satu tahun anggaran yang dihitung ( $\text{PDRB}_t$ ) dengan PDRB tahun sebelumnya ( $\text{PDRB}_{t-1}$ ) dikali 100%, sehingga hasil yang diperoleh dalam satuan % (persentase). Skala yang digunakan adalah skala rasio.

Secara lengkap, definisi operasional dan pengukuran variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1  
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Pengukuran Variabel	Skala Pengukuran
Rasio kemandirian	Rasio keuangan yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah	Perbandingan antara total PAD dengan total pendapatan daerah dikali 100%	Rasio
Rasio efektivitas	Rasio keuangan yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi nyata (riil) daerah	Perbandingan antara realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD berdasarkan potensi riil daerah dikali 100%	Rasio

Rasio efisiensi	Rasio keuangan yang menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan	Perbandingan antara realisasi belanja daerah dengan anggaran belanja daerah dikali 100%	Rasio
Rasio aktivitas	Rasio keuangan yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal	Nilai rata-rata dari rasio belanja rutin terhadap PAD dan rasio belanja pembangunan terhadap PAD	Rasio
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	Rasio keuangan yang menggambarkan tingkat kemampuan daerah untuk mengembalikan pinjaman (melunasi hutang) kepada pihak ketiga	Nilai rasio rata-rata dari rasio penerimaan PAD, realisasi pertumbuhan total pendapatan, dan realisasi pertumbuhan belanja pembangunan	Rasio
Rasio pertumbuhan	Rasio keuangan yang bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode keperiode berikutnya (dari tahun ke tahun berikutnya)	Nilai rasio rata-rata dari rasio penerimaan PAD, realisasi pertumbuhan total pendapatan, dan realisasi pertumbuhan belanja pembangunan	Rasio
Pertumbuhan Ekonomi	Perkembangan kegiatan perekonomian di suatu daerah yang menyebabkan bertambahnya produksi barang dan jasa dan kemakmuran masyarakat yang meningkat	Data PDRB per kapita harga konstan tahun 2009 s.d. 2013	Rasio

### 3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu dan mengetahui pengaruh

masing-masing rasio keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi pada masing-masing daerah yang diuraikan sebagai berikut:

### 3.5.1 Kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu

Analisis data untuk menghitung kinerja keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu meliputi 6 (enam) indikator yang meliputi:

#### 3.5.1.1 Rasio kemandirian keuangan daerah

Rasio kemandirian keuangan adalah rasio keuangan daerah yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio ini dihitung menggunakan persamaan berikut ini:

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

#### 3.5.1.2 Rasio efektivitas keuangan daerah

Rasio efektivitas keuangan daerah adalah rasio keuangan daerah yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi nyata (riil) daerah. Rasio ini dihitung menggunakan persamaan berikut ini:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD Berdasarkan Potensi Riil Daerah}} \times 100\%$$

#### 3.5.1.3 Rasio efisiensi keuangan daerah

Rasio efisiensi keuangan daerah adalah rasio keuangan daerah yang menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang

dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan.

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

#### 3.5.1.4 Rasio aktivitas keuangan daerah

Rasio aktivitas adalah rasio keuangan daerah yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Rasio aktivitas terdiri atas (1) Rasio Belanja Rutin terhadap PAD dan (2) Rasio Belanja Pembangunan terhadap PAD. Secara lengkap kedua rasio di atas diuraikan sebagai berikut:

##### 1. Rasio belanja rutin terhadap PAD

Rasio belanja rutin terhadap PAD adalah rasio keuangan daerah yang merupakan hasil nisbah (perbandingan) antara total belanja rutin yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap total APBD yang diterima. Artinya, rasio ini menggambarkan seberapa besar belanja rutin yang dilakukan oleh pemerintah daerah tiap tahun anggaran.

Rasio belanja rutin dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini:

$$\frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

##### 2. Rasio belanja pembangunan terhadap PAD

Rasio belanja pembangunan terhadap PAD adalah rasio keuangan daerah yang menggambarkan belanja untuk pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah dengan menggunakan dana yang diterima dari APBD yang bersumber dari (1) PAD, yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik

daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, (2) Dana Perimbangan, (3) Pinjaman Daerah, dan (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Rasio belanja pembangunan terhadap PAD dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini:

$$\frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

3.5.1.5 *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) atau rasio kemampuan pemenuhan hutang

*Debt Service Coverage Ratio* atau rasio kemampuan pemenuhan hutang adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya melunasi hutang terhadap pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga. DSCR dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini:

$$\frac{(\text{PAD} + \text{BD} + \text{DAU}) - \text{BW}}{\text{Total (Pokok Angsuran} + \text{ Bunga} + \text{ Bunga Pinjaman)}} \times 100\%$$

3.5.1.6 Rasio pertumbuhan keuangan daerah

Rasio pertumbuhan adalah rasio keuangan daerah yang bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode keperiode berikutnya (dari tahun ke tahun berikutnya). Rasio ini dapat dihitung dengan periode tertentu.

Rasio pertumbuhan terdiri atas 3 (tiga) rasio sebagai berikut:

1. Rasio penerimaan PAD

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } i - r}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } r} \times 100\%$$

## 2. Realisasi pertumbuhan total pendapatan

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan } \sum \text{Pendapatan } i - r}{\text{Realisasi Penerimaan } \sum \text{Pendapatan } r} \times 100\%$$

## 3. Realisasi pertumbuhan belanja pembangunan

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Pembangunan } i - r}{\text{Realisasi Belanja Pembangunan } r} \times 100\%$$

Keterangan:

$i$  = Tahun yang dihitung (tahun berjalan)

$r$  = Tahun sebelumnya

### 3.5.2 Pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi

Analisis pengaruh kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu menggunakan analisis Regresi Linier Berganda dengan bantuan komputer menggunakan program *Statistical Program for Social Science (SPSS) Version 21 for Windows*. Tahapan-tahapan dalam analisis Regresi Linier Berganda sebagai berikut:

#### 3.5.2.1 Statistik deskriptif

Statistik deskriptif berhubungan dengan metode pengelompokan, peringkasan, dan penyajian data dalam cara yang lebih mudah dimengerti yang biasanya dalam bentuk tabel. Data-data tersebut diringkas dengan baik dan teratur sebagai dasar pengambilan keputusan. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi mengenai data penelitian berupa jumlah data ( $N$ ), nilai maksimum (*maximum*), nilai minimum, dan nilai rata-rata (*mean*).

#### 3.5.2.2 Uji asumsi klasik

Sebelum melakukan regresi terdapat syarat yang harus dilalui, yaitu melakukan uji asumsi klasik. Model regresi harus bebas dari asumsi

penyimpangan klasik yaitu, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi yang diuraikan sebagai berikut:

### 1. Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi memiliki distribusi data normal atau tidak dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (*Kolmogorov-Smirnov Test*) dengan menggunakan data dalam Tabel *One-Sample-Kolmogorov-Smirnov Test*. Nilai yang dilihat dari tabel tersebut adalah nilai *Sig. (Significance)* atau signifikansi.

Ketentuan dalam menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov sebagai berikut (Ghozali, 2013: 97):

- a. Nilai *Asymp. Sig (2-tailed)*  $\geq 0,05$ , artinya data terdistribusi secara normal.
- b. Nilai *Asymp. Sig (2-tailed)*  $< 0,05$ , artinya data terdistribusi secara tidak normal.

### 2. Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) dengan menggunakan data dalam Tabel *Coefficients*. Nilai yang dilihat dari tabel tersebut adalah nilai *Collinearity Statistics* yang terdiri atas nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*). *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. VIF mengukur faktor kenaikan variasi variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013: 94).

Ketentuan dalam uji multikolinieritas sebagai berikut (Ghozali, 2013: 95):

- a. Nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/Tolerance$ ) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance*  $< 0,1$  atau sama dengan nilai  $VIF > 10$ .
- b. Bila nilai *tolerance*  $> 0,1$  atau sama dengan nilai  $VIF < 10$ , berarti tidak ada multikolinieritas antar variabel dalam model regresi.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain dengan menggunakan uji *Glejser* (*Glejser-Test*) dengan meregresikan variabel bebas terhadap nilai residual mutlaknya (Ghozali, 2013).

Ketentuan dalam menggunakan uji *Glejser* sebagai berikut (Ghozali, 2013: 110):

- a. Nilai  $t \geq 0,05$ , tidak terjadi (bebas) heteroskedastisitas dalam model regresi.
- b. Nilai  $t < 0,05$ , terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

### 4. Uji autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya) dengan menggunakan nilai *Durbin-Watson* (DW) (Ghozali, 2013).

Ketentuan dalam uji autokorelasi sebagai berikut (Ghozali, 2013: 108):

- a. Angka DW di bawah -2, artinya terjadi autokorelasi positif.
- b. Angka DW diantara -2 sampai +2, artinya tidak terjadi autokorelasi.
- c. Angka DW di atas +2, artinya terjadi autokorelasi negatif.

### 3.5.2.3 Analisis regresi linier berganda

Analisis kuantitatif bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (*independent variable*) dalam penelitian ini, yaitu (1) Rasio Kemandirian atau Rasio Desentralisasi Fiskal, (2) Rasio Efektivitas, (3) Rasio Efisiensi, (4) Rasio Aktivitas terhadap PAD yang terdiri atas Rasio Belanja Rutin dan Rasio Belanja Pembangunan, (5) *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) atau Rasio Kemampuan Pemenuhan Hutang, dan (6) Rasio Pertumbuhan yang terdiri atas Rasio Penerimaan PAD, Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan, dan Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan terhadap variabel terikat (*dependent variable*), yaitu Pertumbuhan Ekonomi menggunakan analisis Regresi Linear Berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$PE = \alpha + \beta_1 RK + \beta_2 RE + \beta_3 REF + \beta_4 RA + \beta_5 DSCR + \beta_6 RP + \varepsilon$$

Keterangan:

- PE = Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu  
 $\alpha$  = Konstanta  
 $\beta$  = Koefisien regresi  
 RK = Rasio Kemandirian  
 RE = Rasio Efektivitas  
 REF = Rasio Efisiensi  
 RA = Rasio Aktivitas  
 DSCR = *Debt Service Coverage Ratio*  
 RP = Rasio Pertumbuhan  
 $\varepsilon$  = Kesalahan Perkiraan (*Error of Estimation*)

### 3.5.2.4 Pengujian hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji F (*F-test*), uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), dan uji t (*t-test*) yang diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Uji F (uji simultan)

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen dengan menggunakan uji *Analysis of Variance* (ANOVA) (Ghozali, 2013).

Ketentuan dalam uji F sebagai berikut (Ghozali, 2013: 118):

- a. Nilai *Sig. (Significance)*  $\leq 0,05$ , artinya semua variabel independen secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Nilai *Sig. (Significance)*  $> 0,05$ , artinya semua variabel independen secara simultan (bersama-sama) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Dalam penelitian ini, uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara keenam variabel independen yang meliputi Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas, DSCR, dan Rasio Pertumbuhan terhadap variabel dependen, yaitu Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan ketentuan dalam uji F di atas dapat dinyatakan jika nilai *significance*  $\leq 0,05$ , maka keenam rasio keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Sebaliknya, jika nilai *significance*  $> 0,05$ , maka keenam rasio keuangan daerah tidak berpengaruh secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu.

## 2. Uji koefisien determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen yang diketahui dari nilai *Adjusted R Square*. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0-1 (Ghozali, 2013).

Ketentuan dalam uji koefisien determinasi sebagai berikut (Ghozali, 2013: 119):

- a. Nilai  $R^2$  yang besar (mendekati 1), artinya variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.
- b. Nilai  $R^2$  yang kecil (mendekati 0), artinya kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen dipengaruhi oleh variabel-variabel independen lainnya diluar penelitian.

Dalam penelitian ini, uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi keenam rasio keuangan daerah dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan ketentuan dalam uji koefisien determinasi di atas dapat dinyatakan jika nilai  $R^2$  besar (mendekati 1), artinya keenam rasio keuangan daerah memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu.

### 3. Uji t (uji parsial)

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen yang terdapat dalam persamaan regresi secara parsial berpengaruh terhadap nilai variabel dependen, dengan  $\alpha = 0,05$  (5%) yang diketahui dari nilai *Sig.* (*Significance*) atau signifikansi pada Tabel *Coefficients* (Ghozali, 2013).

Kriteria dalam uji t sebagai berikut (Ghozali, 2013: 120):

- c. Nilai *Sig. (Significance)*  $\geq 0,05$ , maka variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- d. Nilai *Sig. (Significance)*  $< 0,05$ , maka variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.

Dalam penelitian ini, uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial (sebagian) masing-masing rasio keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan ketentuan dalam Uji t di atas dapat dinyatakan jika nilai *Sig. (Significance)*  $\geq 0,05$ , maka masing-masing rasio keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Sebaliknya, jika nilai *Sig. (Significance)*  $< 0,05$ , maka masing-masing rasio keuangan daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Nilai yang paling besar merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap variabel dependen dan nilai yang paling kecil merupakan nilai yang memiliki pengaruh terkecil terhadap variabel dependen.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

Dalam subbab ini disajikan mengenai gambaran umum seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, deskripsi data, analisis data kinerja keuangan daerah dan analisis data pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah.

##### 4.1.1 Gambaran umum kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu

Provinsi Bengkulu terdiri atas satu pemerintahan provinsi yang dikepalai oleh gubernur, satu pemerintahan kota yang dikepalai oleh walikota, dan sembilan pemerintahan kabupaten yang dikepalai oleh bupati. Seluruh pemerintahan daerah tersebut meliputi (1) Provinsi Bengkulu, (2) Kota Bengkulu, (3) Kabupaten Bengkulu Selatan, (4) Kabupaten Bengkulu Tengah, (5) Kabupaten Bengkulu Utara, (6) Kabupaten Mukomuko, (7) Kabupaten Kaur, (8) Kabupaten Seluma, (9) Kabupaten Kepahiang, (10) Kabupaten Lebong, dan (11) Kabupaten Rejang Lebong. Dari semua kabupaten tersebut kebanyakan merupakan daerah pemekaran wilayah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu, Provinsi Bengkulu terdiri dari empat daerah tingkat II, yaitu Kotamadya Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Rejang Lebong. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003, Kabupaten

Bengkulu Utara dimekarkan sehingga menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Bengkulu Utara dengan ibukota Argamakmur dan Kabupaten Mukomuko dengan ibukota Mukomuko, dalam regulasi yang sama Kabupaten Bengkulu Selatan dimekarkan sehingga menjadi tiga kabupaten yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan ibukota Manna, Kabupaten Seluma dengan ibukota Tais, dan Kabupaten Kaur dengan ibukota Bintuhan.

Di tahun yang sama, Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 memekarkan wilayahnya sehingga menjadi tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Rejang Lebong dengan ibukota Curup, Kabupaten Lebong dengan ibukota Muara Aman dan Kabupaten Kepahiang dengan ibukota Kepahiang.

Pada tahun 2008, Kabupaten Bengkulu Utara kembali memekarkan wilayahnya menjadi kabupaten baru, yaitu Kabupaten Bengkulu Tengah dengan ibukotanya Karang Tinggi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu dan sejak saat itu pengelolaan wilayah serta pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Mukomuko, dan Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi terpisah.

#### 4.1.2 Deskripsi data

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRAPBD) dari 11 pemerintahan daerah yang terdapat dalam wilayah administratif Provinsi Bengkulu yang dipilih dengan metode *total sampling*. Seluruh sampel dalam penelitian ini terdiri atas 1 pemerintah provinsi, 1 pemerintah kota, dan 9

pemerintah kabupaten. Data LRAPBD tersebut diperoleh dari Kantor BPK-RI Perwakilan Provinsi Bengkulu pada hari Senin, tanggal 06 April 2015. Data sekunder ini merupakan data LRAPBD selama 5 tahun anggaran, yaitu tahun 2009 s.d. 2013, sehingga jumlah seluruh LRAPBD sebagai data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 55 eksemplar.

Data mengenai pertumbuhan ekonomi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu diperoleh dengan menghitung PDRB masing-masing tahun anggaran dengan menggunakan persamaan Laju Pertumbuhan Ekonomi yang dinyatakan dalam satuan % (persen). Penghitungan PDRB dilakukan dengan menggunakan pendekatan pendapatan dengan menjumlahkan Pendapatan Pajak Daerah, Belanja Pegawai, Pengeluaran Pembiayaan, dan SiLPA. Berdasarkan data LRAPBD, pengukuran terhadap PDRB untuk masing-masing tahun anggaran dilakukan dengan menghitung selisih antara total pendapatan dengan total pembiayaan (pengeluaran) untuk masing-masing tahun anggaran.

#### 4.1.3 Analisis data

Data LRAPBD dari kesebelas kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui kinerja keuangan masing-masing daerah dengan menggunakan rumus masing-masing rasio keuangan daerah tersebut. Untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah digunakan analisis Regresi Linier Berganda dengan bantuan aplikasi komputer, yaitu *Statistical Program for Social Science (SPSS) Version 21 for Windows*. Kedua bentuk analisis data dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

#### 4.1.3.1 Analisis kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013

Untuk menganalisis kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 digunakan 6 (enam) rasio keuangan daerah, yaitu (1) Rasio Kemandirian atau Rasio Desentralisasi Fiskal, (2) Rasio Efektivitas, (3) Rasio Efisiensi, (4) Rasio Aktivitas terhadap PAD yang terdiri atas Rasio Belanja Rutin dan Rasio Belanja Pembangunan, (5) *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) atau Rasio Kemampuan Pemenuhan Hutang, dan (6) Rasio Pertumbuhan yang terdiri atas Rasio Penerimaan PAD, Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan, dan Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan. Keenam rasio keuangan daerah tersebut diuraikan sebagai berikut:

##### 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rekapitulasi hasil penghitungan rasio kemandirian keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel 4.1

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013

Keterangan	Tahun Anggaran					Rata-rata/ 5 tahun
	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Provinsi Bengkulu</b>						
Rasio Kemandirian (%)	31,47	35,08	37,78	30,96	30,76	33,21
Kriteria	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Peringkat	1	1	1	1	1	1
<b>Kota Bengkulu</b>						
Rasio Kemandirian (%)	5,67	4,98	6,43	6,16	5,65	5,78
Kriteria	S. Rendah	S. Rendah	S. Rendah	S. Rendah	S. Rendah	S. Rendah
Peringkat	3	2	2	3	3	2
<b>Kab. Bengkulu Selatan</b>						
Rasio Kemandirian (%)	6	3,01	3,11	3,37	4,13	3,92
Kriteria	S. Rendah	S. Rendah	S. Rendah	S. Rendah	S. Rendah	S. Rendah
Peringkat	2	5	4	5	6	4
<b>Kab. Bengkulu Tengah</b>						
Rasio Kemandirian (%)	1,43	0,95	1,14	1,42	1,47	1,28
Kriteria	S. Rendah	S. Rendah	S. Rendah	S. Rendah	S. Rendah	S. Rendah
Peringkat	11	11	11	11	11	11
<b>Kab. Bengkulu Utara</b>						
Rasio Kemandirian (%)	2,95	4,14	2,89	3,97	4,37	3,66

Kriteria Peringkat	S. Rendah 7	S. Rendah 3	S. Rendah 5	S. Rendah 4	S. Rendah 5	S. Rendah 5
Kab. Mukomuko						
Rasio Kemandirian (%)	2,34	2,27	2,23	1,99	2,38	2,24
Kriteria Peringkat	S. Rendah 9	S. Rendah 7	S. Rendah 7	S. Rendah 8	S. Rendah 9	S. Rendah 7
Kab. Kaur						
Rasio Kemandirian (%)	3,08	1,91	1,86	1,80	2,24	2,18
Kriteria Peringkat	S. Rendah 6	S. Rendah 9	S. Rendah 9	S. Rendah 10	S. Rendah 10	S. Rendah 9
Kab. Seluma						
Rasio Kemandirian (%)	1,73	1,58	1,24	2,21	3,05	1,96
Kriteria Peringkat	S. Rendah 10	S. Rendah 10	S. Rendah 10	S. Rendah 7	S. Rendah 7	S. Rendah 10
Kab. Kepahiang						
Rasio Kemandirian (%)	3,28	2,53	2,87	3,25	5,36	3,46
Kriteria Peringkat	S. Rendah 5	S. Rendah 6	S. Rendah 6	S. Rendah 6	S. Rendah 4	S. Rendah 6
Kab. Lebong						
Rasio Kemandirian (%)	2,47	1,92	2,01	1,92	2,73	2,21
Kriteria Peringkat	S. Rendah 8	S. Rendah 8	S. Rendah 8	S. Rendah 9	S. Rendah 8	S. Rendah 8
Kab. Rejang Lebong						
Rasio Kemandirian (%)	4,15	3,47	3,55	7,48	8,42	5,41
Kriteria Peringkat	S. Rendah 4	S. Rendah 4	S. Rendah 3	S. Rendah 2	S. Rendah 2	S. Rendah 3
Rata-rata/tahun (%)	5,87	5,62	5,92	5,87	6,41	5,94

Sumber: Data Diolah, 2015 (Lampiran 1)

Tabel 4.1 menunjukkan rata-rata rasio kemandirian kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun 2009 sebesar 5,87%, tahun 2010 sebesar 5,62% (rasio terendah), tahun 2011 sebesar 5,92%, tahun 2012 sebesar 5,87%, dan tahun 2013 sebesar 6,41% (rasio tertinggi). Selama lima tahun anggaran tersebut, rasio kemandirian mengalami penurunan pada tahun 2010 dan 2012 dengan kriteria sangat rendah.

Secara keseluruhan, rasio kemandirian dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 dengan rata-rata rasio tertinggi adalah Provinsi Bengkulu sebesar 33,21% (sedang), rata-rata rasio terendah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 1,28% (sangat rendah), dan rata-rata rasio selama 5 tahun anggaran tersebut sebesar 5,94% (sangat rendah). Hanya 1 daerah (9,09) dengan kriteria sedang, yaitu Provinsi Bengkulu dan 10 daerah (90,91%) dengan kriteria sangat rendah.

## 2. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rekapitulasi hasil penghitungan rasio efektivitas keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 dapat dilihat pada Tabel 4.2

Tabel 4.2  
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Rasio Efektivitas Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013

Keterangan	Tahun Anggaran					Rata-rata/ 5 tahun
	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Provinsi Bengkulu</b>						
Rasio Efektivitas (%)	85,35	93,11	100,59	100,27	-	94,83
Kriteria	C. Efektif	Efektif	S. Efektif	S. Efektif	-	Efektif
Peringkat	11	9	3	7	-	11
<b>Kota Bengkulu</b>						
Rasio Efektivitas (%)	96,84	98,22	99,34	98,26	-	98,17
Kriteria	Efektif	Efektif	Efektif	Efektif	-	Efektif
Peringkat	8	6	5	10	-	7
<b>Kab. Bengkulu Selatan</b>						
Rasio Efektivitas (%)	101,44	99,62	99,46	101,52	-	100,51
Kriteria	S. Efektif	Efektif	Efektif	S. Efektif	-	S. Efektif
Peringkat	4	5	4	4	-	3
<b>Bengkulu Tengah</b>						
Rasio Efektivitas (%)	100,99	100,69	98,79	99,26	-	99,93
Kriteria	S. Efektif	S. Efektif	Efektif	Efektif	-	Efektif
Peringkat	5	3	9	8	-	4
<b>Kab. Bengkulu Utara</b>						
Rasio Efektivitas (%)	102,54	102,07	101,22	108,20	-	103,51
Kriteria	S. Efektif	S. Efektif	S. Efektif	S. Efektif	-	S. Efektif
Peringkat	2	2	1	1	-	1
<b>Kab. Mukomuko</b>						
Rasio Efektivitas (%)	90,58	91,68	100,83	100,32	-	95,85
Kriteria	Efektif	Efektif	S. Efektif	S. Efektif	-	Efektif
Peringkat	10	10	2	6	-	10
<b>Kab. Kaur</b>						
Rasio Efektivitas (%)	97,13	97,18	98,85	101,02	-	98,55
Kriteria	Efektif	Efektif	Efektif	S. Efektif	-	Efektif
Peringkat	7	7	8	5	-	6
<b>Kab. Seluma</b>						
Rasio Efektivitas (%)	102,72	90,54	96,92	101,76	-	97,99
Klasifikasi	S. Efektif	Efektif	Efektif	S. Efektif	-	Efektif
Peringkat	1	11	11	3	-	8
<b>Kab. Kepahiang</b>						
Rasio Efektivitas (%)	97,36	95,72	98,94	98,90	-	97,73
Kriteria	Efektif	Efektif	Efektif	Efektif	-	Efektif
Peringkat	6	8	7	9	-	9
<b>Kab. Lebong</b>						
Rasio Efektivitas (%)	96,80	102,40	99,23	97,30	-	98,93
Kriteria	Efektif	S. Efektif	Efektif	Efektif	-	Efektif
Peringkat	9	1	6	11	-	5
<b>Kab. Rejang Lebong</b>						
Rasio Efektivitas (%)	102,16	100,03	98,41	103,35	-	100,99
Kriteria	S. Efektif	S. Efektif	Efektif	S. Efektif	-	S. Efektif
Peringkat	3	4	10	2	-	2
Rata-rata/tahun (%)	97,63	97,39	99,33	100,92	-	98,82

Sumber: Data Diolah, 2015 (Lampiran 2)

Tabel 4.2 menunjukkan rata-rata rasio efektivitas kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun 2009 sebesar 97,63%, tahun 2010 sebesar 97,39% (rasio

terendah), tahun 2011 sebesar 99,33%, tahun 2012 sebesar 100,92% (rasio tertinggi), dan tahun 2013 tidak dapat dihitung (ditentukan), karena pos pendapatan daerah dalam bentuk anggaran tidak dicantumkan lagi dalam LRAPBD. Selama empat tahun anggaran tersebut terjadi penurunan rasio efektivitas keuangan daerah, tahun 2010 dengan kriteria efektif.

Secara keseluruhan, rasio efektivitas dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 dengan rata-rata rasio tertinggi adalah Bengkulu Utara sebesar 103,51% (sangat efektif), rata-rata rasio terendah Provinsi Bengkulu adalah sebesar 94,83% (efektif), dan rata-rata rasio selama 5 tahun tersebut sebesar 98,82% (efektif). Terdapat 8 daerah (72,73%) dengan kriteria efektif dan 3 daerah (27,27%) dengan kriteria sangat efektif.

### 3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rekapitulasi hasil penghitungan rasio efisiensi keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 dapat dilihat pada Tabel 4.3

Tabel 4.3

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Rasio Efisiensi Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013

Keterangan	Tahun Anggaran					Rata-rata/ 5 tahun
	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Provinsi Bengkulu</b>						
Rasio Efisiensi (%)	87,15	90,28	85,33	86,78	-	87,39
Kriteria	C. Efisien	K. Efisien	C. Efisien	C. Efisien	-	C. Efisien
Peringkat	2	5	2	3	-	2
<b>Kota Bengkulu</b>						
Rasio Efisiensi (%)	93,75	95,28	96,60	94,37	-	95,05
Kriteria	K. Efisien	K. Efisien	K. Efisien	K. Efisien	-	K. Efisien
Peringkat	6	11	11	6	-	10
<b>Kab. Bengkulu Selatan</b>						
Rasio Efisiensi (%)	94,30	93,97	94,99	94,89	-	94,54
Kriteria	K. Efisien	K. Efisien	K. Efisien	K. Efisien	-	K. Efisien
Peringkat	8	8	10	8	-	7
<b>Kab. Bengkulu Tengah</b>						
Rasio Efisiensi (%)	93,78	87,78	94,14	95,54	-	92,81
Kriteria	K. Efisien	C. Efisien	K. Efisien	K. Efisien	-	K. Efisien
Peringkat	7	1	7	9	-	6
<b>Kab. Bengkulu Utara</b>						
Rasio Efisiensi (%)	104,24	92,80	84,56	97,38	-	94,75
Kriteria	T. Efisien	K. Efisien	C. Efisien	K. Efisien	-	K. Efisien
Peringkat	11	7	1	11	-	9

Kab. Mukomuko						
Rasio Efisiensi	90,86	89,31	94,60	72,93	-	86,93
Kriteria	K. Efisien	C. Efisien	K. Efisien	Efisien	-	C. Efisien
Peringkat	4	3	8	1	-	1
Kab. Kaur						
Rasio Efisiensi	95,74	95,05	94,95	94,68	-	95,11
Kriteria	K. Efisien	K. Efisien	K. Efisien	K. Efisien	-	K. Efisien
Peringkat	10	10	9	7	-	11
Kab. Seluma						
Rasio Efisiensi (%)	90,03	88,27	92,82	82,73	-	88,46
Kriteria	K. Efisien	C. Efisien	K. Efisien	C. Efisien	-	C. Efisien
Peringkat	3	2	4	2	-	3
Kab. Kepahiang						
Rasio Efisiensi (%)	92,90	91,40	93,16	88,31	-	91,44
Kriteria	K. Efisien	K. Efisien	K. Efisien	C. Efisien	-	K. Efisien
Peringkat	5	6	5	4	-	5
Kab. Lebong						
Rasio Efisiensi (%)	84,71	89,37	91,45	89,03	-	88,64
Kriteria	C. Efisien	C. Efisien	K. Efisien	C. Efisien	-	C. Efisien
Peringkat	1	4	3	5	-	4
Kab. Rejang Lebong						
Rasio Efisiensi (%)	94,70	94,64	93,17	96,32	-	94,71
Kriteria	K. Efisien	K. Efisien	K. Efisien	K. Efisien	-	K. Efisien
Peringkat	9	9	6	10	-	8
Rata-rata/tahun (%)	92,92	91,65	92,36	90,27	-	91,80

Sumber: Data Diolah, 2015 (Lampiran 3)

Tabel 4.3 menunjukkan rata-rata rasio efisiensi kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun 2009 sebesar 92,92% (rasio tertinggi), tahun 2010 sebesar 91,65%, tahun 2011 sebesar 92,36%, tahun 2012 sebesar 90,27% (rasio terendah), dan tahun 2013 tidak dapat dihitung, karena anggaran pendapatan daerah tidak dicantumkan lagi dalam LRAPBD. Selama empat tahun anggaran tersebut terjadi penurunan rasio pada tahun 2010 dan 2012.

Secara keseluruhan, rasio efisiensi dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 dengan rata-rata rasio tertinggi adalah Kabupaten Mukomuko sebesar 86,93% (cukup efisien), rata-rata rasio terendah adalah Kabupaten Kaur sebesar 95,11% (kurang efisien), dan rata-rata rasio selama 5 tahun tersebut sebesar 91,80% (kurang efisien). Terdapat 4 daerah (36,36%) dengan kriteria cukup efisien dan 7 daerah (64,64%) dengan kriteria kurang efisien.

#### 4. Rasio Aktivitas (Keserasian Belanja) Daerah

Rasio aktivitas terdiri atas dua rasio, yaitu (1) Rasio Belanja Rutin terhadap PAD dan (2) Rasio Belanja Pembangunan terhadap PAD. Kedua jenis rasio aktivitas tersebut diuraikan sebagai berikut:

##### a. Rasio Belanja Rutin terhadap PAD

Rekapitulasi hasil penghitungan rasio belanja rutin terhadap PAD kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 dapat dilihat pada Tabel 4.4

Tabel 4.4  
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Rasio Belanja Rutin terhadap PAD  
Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013

Keterangan	Tahun Anggaran					Rata-rata/ 5 tahun
	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Provinsi Bengkulu</b>						
RBRPAD (%)	32,50	35,38	33,13	36,70	41,03	35,75
Kriteria	C. Serasi	C. Serasi	C. Serasi	C. Serasi	Serasi	C. Serasi
Peringkat	8	9	11	9	2	8
<b>Kota Bengkulu</b>						
RBRPAD (%)	39,99	40,76	42,48	43,88	38,99	41,22
Kriteria	C. Serasi	Serasi	Serasi	Serasi	C. Serasi	Serasi
Peringkat	3	2	1	1	5	2
<b>Kab. Bengkulu Selatan</b>						
RBRPAD (%)	40,06	44,22	42,00	41,61	45,55	42,69
Kriteria	Serasi	Serasi	Serasi	Serasi	Serasi	Serasi
Peringkat	2	1	2	2	1	1
<b>Kab. Bengkulu Tengah</b>						
RBRPAD (%)	44,15	30,90	36,12	40,59	39,51	38,25
Kriteria	Serasi	C. Serasi	C. Serasi	Serasi	C. Serasi	C. Serasi
Peringkat	1	10	7	4	4	5
<b>Kab. Bengkulu Utara</b>						
RBRPAD (%)	38,79	40,32	37,21	38,69	40,67	39,14
Kriteria	C. Serasi	Serasi	C. Serasi	C. Serasi	Serasi	C. Serasi
Peringkat	4	3	6	6	3	3
<b>Kab. Mukomuko</b>						
RBRPAD (%)	29,48	38,86	37,32	38,80	38,03	36,50
Kriteria	T. Serasi	C. Serasi	C. Serasi	C. Serasi	C. Serasi	C. Serasi
Peringkat	9	5	5	5	7	7
<b>Kab. Kaur</b>						
RBRPAD (%)	34,52	38,53	38,01	38,59	38,86	37,70
Kriteria	C. Serasi	C. Serasi	C. Serasi	C. Serasi	C. Serasi	C. Serasi
Peringkat	6	6	4	7	6	6
<b>Kab. Seluma</b>						
RBRPAD (%)	33,29	37,63	33,60	35,38	37,70	35,52
Kriteria	C. Serasi	C. Serasi	C. Serasi	C. Serasi	C. Serasi	C. Serasi
Peringkat	7	7	10	11	8	9
<b>Kab. Kepahiang</b>						
RBRPAD (%)	28,66	29,82	34,10	36,22	32,05	32,17
Kriteria	T. Serasi	T. Serasi	C. Serasi	C. Serasi	C. Serasi	C. Serasi
Peringkat	10	11	9	10	11	11
<b>Kab. Lebong</b>						
RBRPAD (%)	27,54	36,90	35,91	37,15	37,43	34,99

Kriteria Peringkat	T. Serasi 11	C. Serasi 8	C. Serasi 8	C. Serasi 8	C. Serasi 9	C. Serasi 10
Kab. Rejang Lebong						
RBRPAD (%)	36,92	38,95	40,72	40,94	34,30	38,37
Kriteria Peringkat	C. Serasi 5	C. Serasi 4	Serasi 3	Serasi 3	C. Serasi 10	C. Serasi 4
Rata-rata/tahun (%)	35,08	37,48	37,33	38,96	38,56	37,48

Sumber: Data Diolah, 2015 (Lampiran 4.1)

Keterangan: RBRPAD = Rasio Belanja Rutin terhadap PAD

Tabel 4.4 menunjukkan rata-rata rasio belanja rutin terhadap PAD kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun 2009 sebesar 35,08% (rasio terendah), tahun 2010 sebesar 37,48%, tahun 2011 sebesar 37,33%, tahun 2012 sebesar 38,96% (rasio tertinggi), dan tahun 2013 sebesar 38,56%. Selama lima tahun anggaran tersebut terjadi penurunan rasio pada tahun 2011, 2013.

Secara keseluruhan, rasio belanja rutin terhadap PAD dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 dengan rata-rata rasio tertinggi adalah Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar 42,69% (serasi), rata-rata rasio terendah adalah Kabupaten Kepahiang sebesar 32,17% (cukup serasi), dan rata-rata rasio selama 5 tahun tersebut sebesar 37,48% (cukup serasi). Terdapat 2 daerah (18,18%) dengan kriteria serasi dan 9 daerah (81,82%) dengan kriteria cukup serasi.

#### b. Rasio Belanja Pembangunan terhadap PAD

Rekapitulasi hasil penghitungan Rasio Belanja Pembangunan terhadap PAD kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 dapat dilihat pada Tabel 4.5

Tabel 4.5  
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Rasio Belanja Pembangunan terhadap PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013

Keterangan	Tahun Anggaran					Rata-rata/ 5 tahun
	2009	2010	2011	2012	2013	
Provinsi Bengkulu						
RBPPAD (%)	13,49	8,41	10,64	9,92	8,33	10,16
Kriteria Peringkat	S.T. Serasi 7	S.T. Serasi 10	S.T. Serasi 6	S.T. Serasi 7	S.T. Serasi 9	S.T. Serasi 9

Kota Bengkulu						
RBPPAD (%)	11,23	9,60	6,80	4,79	8,08	8,10
Kriteria	S.T. Serasi					
Peringkat	9	8	11	11	10	11
Kab. Bengkulu Selatan						
RBPPAD (%)	18,27	5,50	7,80	7,32	7,37	9,25
Kriteria	T. Serasi	S.T. Serasi	S.T. Serasi	S.T. Serasi	S.T. Serasi	S.T. Serasi
Peringkat	4	11	10	10	11	10
Kab. Bengkulu Tengah						
RBPPAD (%)	3,98	16,00	15,17	9,55	12,66	11,47
Kriteria	S.T. Serasi	T. Serasi	T. Serasi	S.T. Serasi	S.T. Serasi	S.T. Serasi
Peringkat	11	2	2	8	4	7
Kab. Bengkulu Utara						
RBPPAD (%)	10,83	9,55	10,04	13,07	9,35	10,57
Kriteria	S.T. Serasi					
Peringkat	10	9	7	1	8	8
Kab. Mukomuko						
RBPPAD (%)	20,11	11,62	9,53	10,47	10,63	12,47
Kriteria	T. Serasi	S.T. Serasi	S.T. Serasi	S.T. Serasi	S.T. Serasi	S.T. Serasi
Peringkat	3	5	8	5	7	5
Kab. Kaur						
RBPPAD (%)	16,91	11,37	11,30	10,56	11,46	12,32
Kriteria	T. Serasi	S.T. Serasi	S.T. Serasi	S.T. Serasi	S.T. Serasi	S.T. Serasi
Peringkat	5	6	5	4	6	6
Kab. Seluma						
RBPPAD (%)	15,89	14,18	15,98	10,16	12,94	13,83
Kriteria	T. Serasi	S.T. Serasi	T. Serasi	S.T. Serasi	S.T. Serasi	S.T. Serasi
Peringkat	6	3	1	6	3	4
Kab. Kepahiang						
RBPPAD (%)	23,41	20,12	14,82	12,02	20,22	18,12
Kriteria	T. Serasi	T. Serasi	S.T. Serasi	S.T. Serasi	T. Serasi	T. Serasi
Peringkat	1	1	3	3	2	1
Kab. Lebong						
RBPPAD (%)	23,18	13,27	12,53	12,19	12,47	14,73
Kriteria	T. Serasi	S.T. Serasi	S.T. Serasi	S.T. Serasi	S.T. Serasi	S.T. Serasi
Peringkat	2	4	4	2	5	2
Kab. Rejang Lebong						
RBPPAD (%)	13,48	10,69	8,66	8,53	29,76	14,22
Kriteria	S.T. Serasi	S.T. Serasi	S.T. Serasi	S.T. Serasi	T. Serasi	S.T. Serasi
Peringkat	8	7	9	9	1	3
Rata-rata/tahun (%)	15,53	11,85	11,21	9,87	13,02	12,29

Sumber: Data Diolah, 2015 (Lampiran 4.2)

Keterangan: RBPPAD = Rasio Belanja Pembangunan terhadap PAD

Tabel 4.5 menunjukkan rata-rata rasio belanja pembangunan terhadap PAD kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun 2009 sebesar 15,53% (rasio tertinggi), tahun 2010 sebesar 11,85%, tahun 2011 sebesar 11,21%, tahun 2012 sebesar 9,87% (rasio terendah), dan tahun 2013 sebesar 13,02%. Selama lima tahun anggaran tersebut terjadi penurunan rasio pada tahun 2010, 2011, dan 2012.

Secara keseluruhan, rasio belanja pembangunan terhadap PAD dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 dengan rata-rata rasio tertinggi adalah Kabupaten Kepahiang sebesar 18,12%

(tidak serasi), rata-rata rasio terendah adalah Kota Bengkulu sebesar 8,10% (sangat tidak serasi), dan rata-rata rasio selama 5 tahun tersebut sebesar 12,29% (sangat tidak serasi). Hanya 1 daerah (9,09%) dengan kriteria tidak serasi dan 10 daerah (90,91) dengan kriteria serasi.

Selanjutnya, rekapitulasi hasil penghitungan rasio aktivitas kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 yang terdiri atas rasio belanja rutin terhadap PAD dan rasio belanja pembangunan terhadap PAD dapat dilihat pada Tabel 4.6

**Tabel 4.6**  
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Rasio Aktivitas Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013

Keterangan	Tahun Anggaran					Rata-rata/ 5 tahun
	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Provinsi Bengkulu</b>						
RBRPAD (%)	32,50	35,38	33,13	36,70	41,03	35,75
RBPPAD (%)	13,49	8,41	10,64	9,92	8,33	10,16
Rasio Aktivitas (%)	23,00	21,90	21,89	23,31	24,68	22,95
Kriteria	T. Serasi	T. Serasi	T. Serasi	T. Serasi	T. Serasi	T. Serasi
Peringkat	11	11	11	10	9	11
<b>Kota Bengkulu</b>						
RBRPAD (%)	39,99	40,76	42,48	43,88	38,99	41,22
RBPPAD (%)	11,23	9,60	6,80	4,79	8,08	8,10
Rasio Aktivitas (%)	25,61	25,18	24,64	24,34	23,54	24,66
Kriteria	T. Serasi	T. Serasi	T. Serasi	T. Serasi	T. Serasi	T. Serasi
Peringkat	4	4	6	8	11	8
<b>Kab. Bengkulu Selatan</b>						
RBRPAD (%)	40,06	44,22	42,00	41,61	45,55	42,69
RBPPAD (%)	18,27	5,50	7,80	7,32	7,37	9,25
Rasio Aktivitas (%)	29,17	24,86	24,90	24,47	26,46	25,97
Kriteria	T. Serasi	T. Serasi	T. Serasi	T. Serasi	T. Serasi	T. Serasi
Peringkat	1	7	2	7	3	2
<b>Kab. Bengkulu Tengah</b>						
RBRPAD (%)	44,15	30,90	36,12	40,59	39,51	38,25
RBPPAD (%)	3,98	16,00	15,17	9,55	12,66	11,47
Rasio Aktivitas (%)	24,07	23,45	25,65	25,07	26,09	24,86
Kriteria	T. Serasi	T. Serasi	T. Serasi	T. Serasi	T. Serasi	T. Serasi
Peringkat	10	10	1	2	4	5
<b>Kab. Bengkulu Utara</b>						
RBRPAD (%)	38,79	40,32	37,21	38,69	40,67	39,14
RBPPAD (%)	10,83	9,55	10,04	13,07	9,35	10,57
Rasio Aktivitas (%)	24,81	24,94	23,63	25,88	25,01	24,85
Kriteria	T. Serasi	T. Serasi	T. Serasi	T. Serasi	T. Serasi	T. Serasi
Peringkat	7	6	9	1	7	6
<b>Kab. Mukomuko</b>						
RBRPAD (%)	29,48	38,86	37,32	38,80	38,03	36,50
RBPPAD (%)	20,11	11,62	9,53	10,47	10,63	12,47
Rasio Aktivitas (%)	24,80	25,24	23,43	24,64	24,33	24,49
Kriteria	T. Serasi	T. Serasi	T. Serasi	T. Serasi	T. Serasi	T. Serasi
Peringkat	8	2	10	5	10	9
<b>Kab. Kaur</b>						
RBRPAD (%)	34,52	38,53	38,01	38,59	38,86	37,70

RBPPAD (%)	16,91	11,37	11,30	10,56	11,46	12,32
Rasio Aktivitas (%)	25,72	24,95	24,66	24,58	25,16	25,01
Kriteria Peringkat	T. Serasi 3	T. Serasi 5	T. Serasi 5	T. Serasi 6	T. Serasi 6	T. Serasi 3
<b>Kab. Seluma</b>						
RBRPAD (%)	33,29	37,63	33,60	35,38	37,70	35,52
RBPPAD (%)	15,89	14,18	15,98	10,16	12,94	13,83
Rasio Aktivitas (%)	24,59	25,91	24,79	22,77	25,32	24,68
Kriteria Peringkat	T. Serasi 9	T. Serasi 1	T. Serasi 3	T. Serasi 11	T. Serasi 5	T. Serasi 7
<b>Kab. Kepahiang</b>						
RBRPAD (%)	28,66	29,82	34,10	36,22	32,05	32,17
RBPPAD (%)	23,41	20,12	14,82	12,02	20,22	18,12
Rata-rata (%)	26,03	24,97	24,46	24,12	26,14	25,14
Kriteria Peringkat	T. Serasi 2	T. Serasi 5	T. Serasi 7	T. Serasi 9	T. Serasi 4	T. Serasi 10
<b>Kab. Lebong</b>						
RBRPAD (%)	27,54	36,90	35,91	37,15	37,43	34,99
RBPPAD (%)	23,18	13,27	12,53	12,19	12,47	14,73
Rasio Aktivitas (%)	25,36	25,09	24,22	24,67	24,95	24,86
Kriteria Peringkat	T. Serasi 5	T. Serasi 3	T. Serasi 8	T. Serasi 4	T. Serasi 8	T. Serasi 4
<b>Kab. Rejang Lebong</b>						
RBRPAD (%)	36,92	38,95	40,72	40,94	34,30	38,37
RBPPAD (%)	13,48	10,69	8,66	8,53	29,76	14,22
Rasio Aktivitas (%)	25,20	24,82	24,69	24,74	32,03	26,30
Kriteria Peringkat	T. Serasi 6	T. Serasi 8	T. Serasi 4	T. Serasi 3	Serasi 1	T. Serasi 1
Rata-rata/tahun (%)	25,30	24,66	24,27	24,42	25,79	24,89

Sumber: Data Diolah, 2015

Keterangan: RBRPAD = Rasio Belanja Rutin terhadap PAD

: RBPPAD = Rasio Belanja Pembangunan terhadap PAD

Tabel 4.6 menunjukkan rata-rata rasio aktivitas kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu berdasarkan nilai rasio belanja rutin terhadap PAD dan rasio belanja pembangunan terhadap PAD tahun 2009 sebesar 25,30%, tahun 2010 sebesar 24,66%, tahun 2011 sebesar 24,27% (terendah), tahun 2012 sebesar 24,42%, dan tahun 2013 sebesar 25,79% (rasio tertinggi). Selama lima tahun anggaran tersebut terjadi penurunan rasio pada tahun 2010, 2011, dan 2012.

Secara keseluruhan, rasio aktivitas dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 dengan rata-rata rasio tertinggi adalah Kabupaten Rejang Lebong sebesar 26,30% (tidak serasi), rata-rata rasio terendah adalah Provinsi Bengkulu sebesar 22,95% (tidak serasi), dan rata-rata rasio selama 5 tahun tersebut sebesar 24,89% (tidak serasi). Semua daerah (100%) dengan kriteria tidak serasi.

### 5. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Rekapitulasi hasil penghitungan DSCR kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 dapat dilihat pada Tabel 4.7

Tabel 4.7  
Rekapitulasi Hasil Penghitungan DSCR Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013

Keterangan	Tahun Anggaran					Rata-rata/ 5 tahun
	2009	2010	2011	2012	2013	
Provinsi Bengkulu						
DSCR (%)	1,03	-	35,39	-	8,34	14,91
Kota Bengkulu						
DSCR (%)	-	-27,37	-3,18	-1,20	-34,77	-16,63
Kab. Bengkulu Selatan						
DSCR (%)	-	-23,89	0,46	-2,64	-39,12	-16,30
Kab. Bengkulu Tengah						
DSCR (%)	-	34,61	-	-1,22	-36,17	-0,93
Kab. Bengkulu Utara						
DSCR (%)	-	-	-	-	-42,45	-42,45
Kab. Mukomuko						
DSCR (%)	1,81	5,77	-2,30	3,64	17,53	5,29
Kab. Kaur						
DSCR (%)	-	3,39	2,51	7,17	-1,97	2,78
Kab. Seluma						
DSCR (%)	-	-	18,91	-	25,48	22,20
Kab. Kepahiang						
DSCR (%)	-	75,18	1,31	14,86	24,33	28,92
Kab. Lebong						
DSCR (%)	-	2,50	1,99	9,50	0,88	3,72
Kab. Rejang Lebong						
DSCR (%)	8,04	-5,01	-	10,72	31,91	11,41
Rata-rata/tahun (%)	3,63	8,15	6,89	5,10	-4,18	1,18

Sumber: Data Diolah, 2015 (Lampiran 5)

Tabel 4.7 menunjukkan rata-rata DSCR kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu hanya ditentukan berdasarkan tahun anggaran pemerintah daerah memiliki hutang dengan pihak lain (pihak ketiga). Selain itu, tidak semua daerah memiliki hutang (pinjaman), sehingga daerah yang tidak memiliki hutang tidak dapat ditentukan DSCR-nya. Implikasinya, pemeringkatan tidak dapat dilakukan secara keseluruhan (untuk 5 tahun anggaran).

Secara keseluruhan, berdasarkan data yang ada (tahun-tahun tertentu saja), DSCR dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 dengan rata-rata rasio tertinggi adalah Kabupaten Kepahiang sebesar

28,92% dengan kemampuan yang melebihi jumlah hutang yang ada, rata-rata rasio terendah adalah Kabupaten Bengkulu Utara sebesar -42,45% (tidak mampu mengembalikan hutang pada tahun anggaran yang sama), dan rata-rata rasio selama 5 tahun tersebut sebesar 1,18% (mampu mengembalikan hutang selama 5 tahun anggaran tersebut). Terdapat 4 daerah (36,36%) yang tidak mampu mengembalikan hutang dan 7 daerah (63,64%) yang mampu mengembalikan hutang.

#### 6. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan terdiri atas tiga rasio lagi, yaitu (a) Rasio Penerimaan PAD, (b) Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan, dan (c) Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan.

##### a. Rasio Penerimaan PAD

Rekapitulasi hasil penghitungan Rasio Penerimaan PAD kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 dapat dilihat pada Tabel 4.8

Tabel 4.8  
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Rasio Penerimaan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013

Keterangan	Tahun Anggaran					Rata-rata/ 5 tahun
	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Provinsi Bengkulu</b>						
RPPAD (%)	-0,45	22,00	102,87	-32,08	1,29	18,73
Kriteria	Menurun	Meningkat	Meningkat	Menurun	Meningkat	Meningkat
Peringkat	8	3	1	11	10	5
<b>Kota Bengkulu</b>						
RPPAD (%)	9,68	-0,98	47,38	6,08	10,24	14,48
Kriteria	Meningkat	Menurun	Meningkat	Menurun	Meningkat	Meningkat
Peringkat	6	5	2	8	9	9
<b>Kab. Bengkulu Selatan</b>						
RPPAD (%)	72,56	-46,04	24,08	28,14	29,31	21,61
Kriteria	Meningkat	Menurun	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
Peringkat	1	11	6	5	5	4
<b>Kab. Bengkulu Tengah</b>						
RPPAD (%)	-	89,81	41,68	29,22	17,65	44,59
Kriteria	-	Meningkat	Menurun	Menurun	Menurun	Meningkat
Peringkat	-	1	3	4	7	1
<b>Kab. Bengkulu Utara</b>						
RPPAD (%)	-15,39	52,46	-6,17	32,52	18,98	16,48
Kriteria	Menurun	Meningkat	Menurun	Meningkat	Menurun	Meningkat
Peringkat	9	2	11	3	6	8

Kab. Mukomuko						
RPPAD (%)	34,53	0,69	3,39	-1,32	-86,04	-9,75
Kriteria	Meningkat	Menurun	Meningkat	Menurun	Menurun	Menurun
Peringkat	4	4	9	10	11	11
Kab. Kaur						
RPPAD (%)	56,64	-32,91	12,64	14,26	32,89	16,70
Kriteria	Meningkat	Menurun	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
Peringkat	2	10	7	7	4	7
Kab. Seluma						
RPPAD (%)	42,87	-6,94	0,29	93,68	63,85	38,75
Kriteria	Meningkat	Menurun	Meningkat	Meningkat	Menurun	Meningkat
Peringkat	3	6	10	2	2	2
Kab. Kepahiang						
RPPAD (%)	27,38	-19,29	24,38	15,90	39,83	17,64
Kriteria	Meningkat	Menurun	Meningkat	Menurun	Meningkat	Meningkat
Peringkat	5	9	5	6	3	6
Kab. Lebong						
RPPAD (%)	-38,56	-18,64	24,53	-0,53	65,55	6,47
Kriteria	Menurun	Meningkat	Meningkat	Menurun	Meningkat	Meningkat
Peringkat	10	8	4	9	1	10
Kab. Rejang Lebong						
RPPAD (%)	-0,26	-10,04	10,93	137,63	13,39	30,33
Kriteria	Menurun	Menurun	Meningkat	Meningkat	Menurun	Meningkat
Peringkat	7	7	8	1	8	3
Rata-rata/tahun (%)	18,90	2,74	26,00	29,41	18,81	19,64

Sumber: Data Diolah, 2015 (Lampiran 6.1)

Keterangan: RPPAD = Rasio Penerimaan PAD

Tabel 4.8 menunjukkan rata-rata rasio penerimaan PAD kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun 2009 sebesar 18,90%, namun rasio ini tidak dapat dihitung untuk Kabupaten Bengkulu Tengah, karena data LRAPBD tahun 2008 belum ada (baru terbentuk hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara), tahun 2010 sebesar 2,74% (rasio terendah), tahun 2011 sebesar 26,00%, tahun 2012 sebesar 29,41% (rasio tertinggi), dan tahun 2013 sebesar 18,81%.

Secara keseluruhan, rasio penerimaan PAD dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 dengan rata-rata rasio tertinggi adalah Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 44,59% (meningkat), rata-rata rasio terendah adalah Kabupaten Mukomuko sebesar -9,75% (menurun), dan rata-rata rasio selama 5 tahun tersebut sebesar 19,64% (meningkat). Hanya satu daerah (9,09%) yang mengalami penurunan dan 9 daerah (90,91) mengalami peningkatan.

## b. Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan

Rekapitulasi hasil penghitungan rasio pertumbuhan total pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 dapat dilihat pada Tabel 4.9

Tabel 4.9  
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013

Keterangan	Tahun Anggaran					Rata-rata/ 5 tahun
	2009	2010	2011	2012	2013	
Provinsi Bengkulu						
RPTP (%)	-15,53	9,46	16,60	33,89	1,97	9,28
Kriteria	Menurun	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Menurun	Meningkat
Peringkat	9	3	6	1	9	7
Kota Bengkulu						
RPTP (%)	4,97	12,61	14,21	10,69	20,24	12,24
Kriteria	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Menurun	Meningkat	Meningkat
Peringkat	3	2	8	5	1	2
Kab. Bengkulu Selatan						
RPTP (%)	-2,21	7,47	20,00	18,27	5,70	9,84
Kriteria	Menurun	Meningkat	Meningkat	Menurun	Menurun	Meningkat
Peringkat	7	6	3	2	7	6
Kab. Bengkulu Tengah						
RPTP (%)	-	187,14	18,01	3,28	13,60	55,51
Kriteria	-	Meningkat	Menurun	Menurun	Meningkat	Meningkat
Peringkat	-	1	5	9	4	1
Kab. Bengkulu Utara						
RPTP (%)	-18,59	8,69	34,05	-3,30	8,20	5,81
Kriteria	Menurun	Meningkat	Meningkat	Menurun	Meningkat	Meningkat
Peringkat	10	4	1	11	5	9
Kab. Mukomuko						
RPTP (%)	15,18	3,53	5,28	10,67	2,22	7,38
Kriteria	Meningkat	Menurun	Meningkat	Meningkat	Menurun	Meningkat
Peringkat	1	10	11	6	8	8
Kab. Kaur						
RPTP (%)	4,29	7,53	15,58	17,87	7,06	10,47
Kriteria	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Menurun	Meningkat
Peringkat	4	5	7	3	6	4
Kab. Seluma						
RPTP (%)	1,08	1,30	27,35	9,69	18,33	11,55
Kriteria	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Menurun	Meningkat	Meningkat
Peringkat	6	11	2	7	2	3
Kab. Kepahiang						
RPTP (%)	8,41	4,31	9,35	2,76	-15,07	1,95
Kriteria	Meningkat	Menurun	Meningkat	Menurun	Menurun	Meningkat
Peringkat	2	9	9	10	1	11
Kab. Lebong						
RPTP (%)	4,16	4,65	18,54	4,13	16,98	9,69
Kriteria	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Menurun	Meningkat	Meningkat
Peringkat	5	8	4	8	3	5
Kab. Rejang Lebong						
RPTP (%)	-5,77	7,54	8,18	13,00	0,007	4,59
Kriteria	Menurun	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Menurun	Meningkat
Peringkat	8	7	10	4	10	10
Rata-rata/tahun (%)	-0,40	23,11	17,01	11,00	7,20	12,60

Sumber: Data Diolah, 2015 (Lampiran 2.2)

Keterangan : RPTP = Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan

Tabel 4.9 menunjukkan rata-rata rasio pertumbuhan total pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun 2009 sebesar -0,40% (rasio terendah) yang artinya mengalami penurunan selama tahun tersebut, namun rasio ini tidak dapat dihitung untuk Kabupaten Bengkulu Tengah, karena data LRAPBD tahun 2008 belum ada (baru terbentuk hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara), tahun 2010 sebesar 23,11% (rasio tertinggi) selama tahun tersebut, tahun 2011 sebesar 17,01%, tahun 2012 sebesar 11,00%, dan tahun 2013 sebesar 7,20%.

Secara keseluruhan, rasio pertumbuhan total pendapatan dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 dengan rata-rata rasio tertinggi adalah Kabupaten Tengah sebesar 55,51% (meningkat), rata-rata rasio terendah adalah Kabupaten Kepahiang sebesar 1,95% (meningkat), dan rata-rata rasio selama 5 tahun tersebut sebesar 12,60% (meningkat). Seluruh daerah (100%) dengan rasio pertumbuhan total pendapatan yang mengalami peningkatan.

#### c. Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan

Rekapitulasi hasil penghitungan rasio pertumbuhan belanja pembangunan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 dapat dilihat pada Tabel 4.10

Tabel 4.10  
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013

Keterangan	Tahun Anggaran					Rata-rata/ 5 tahun
	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Provinsi Bengkulu</b>						
RPBP (%)	-35,85	-33,74	33,82	31,41	4,52	0,03
Kriteria	Menurun	Meningkat	Meningkat	Menurun	Menurun	Meningkat
Peringkat	9	8	4	2	7	8
<b>Kota Bengkulu</b>						
RPBP (%)	6,72	-5,53	-20,71	-23,11	95,68	10,61
Kriteria	Meningkat	Menurun	Menurun	Menurun	Meningkat	Meningkat
Peringkat	3	4	10	9	1	3
<b>Kab. Bengkulu Selatan</b>						
RPBP (%)	-36,29	-39,28	69,29	7,33	13,47	2,90

Kriteria Peringkat	Menurun 10	Menurun 9	Meningkat 1	Menurun 6	Meningkat 5	Meningkat 7
Kab. Bengkulu Tengah						
RPBP (%)	-	103,33	21,56	-36,44	4,74	23,30
Kriteria Peringkat	-	Meningkat 1	Menurun 5	Menurun 11	Meningkat 8	Meningkat 1
Kab. Bengkulu Utara						
RPBP (%)	-21,98	-3,67	33,87	37,57	-25,27	4,10
Kriteria Peringkat	Menurun 8	Meningkat 2	Meningkat 3	Meningkat 1	Menurun 11	Meningkat 4
Kab. Mukomuko						
RPBP (%)	65,81	-43,74	-13,21	28,16	20,52	11,51
Kriteria Peringkat	Meningkat 1	Menurun 10	Meningkat 9	Meningkat 3	Menurun 3	Meningkat 2
Kab. Kaur						
RPBP (%)	2,36	-30,08	13,54	9,83	18,90	2,91
Kriteria Peringkat	Meningkat 4	Menurun 7	Meningkat 6	Menurun 5	Meningkat 4	Meningkat 6
Kab. Seluma						
RPBP (%)	15,44	-4,63	37,20	-35,10	5,24	3,63
Kriteria Peringkat	Meningkat 2	Menurun 3	Meningkat 2	Menurun 10	Meningkat 6	Meningkat 5
Kab. Kepahiang						
RPBP (%)	-8,86	-14,16	-21,09	-17,75	1,12	-12,15
Kriteria Peringkat	Menurun 5	Menurun 5	Menurun 11	Meningkat 8	Meningkat 9	Menurun 10
Kab. Lebong						
RPBP (%)	-5,65	-94,07	7,97	3,28	-20,55	-21,80
Kriteria Peringkat	Menurun 6	Menurun 11	Meningkat 7	Menurun 7	Menurun 10	Menurun 11
Kab. Rejang Lebong						
RPBP (%)	-21,73	-15,81	-13,00	11,15	30,17	-1,84
Kriteria Peringkat	Menurun 7	Meningkat 6	Meningkat 8	Meningkat 4	Meningkat 2	Menurun 9
Rata-rata/tahun (%)	-4,00	-16,49	13,57	1,48	13,50	2,11

Sumber: Data Diolah, 2015 (Lampiran 6.3)

Keterangan: RPBP = Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan

Tabel 4.10 menunjukkan rata-rata rasio pertumbuhan belanja pembangunan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun 2009 sebesar -4,00%, namun rasio ini tidak dapat dihitung untuk Kabupaten Bengkulu Tengah, karena data LRAPBD tahun 2008 belum ada (baru terbentuk hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara), tahun 2010 sebesar -16,49% (rasio terendah) yang artinya mengalami penurunan selama tahun tersebut, tahun 2011 sebesar 13,57% (rasio tertinggi) yang artinya mengalami peningkatan selama tahun anggaran tersebut, tahun 2012 sebesar 1,48%, dan tahun 2013 sebesar 13,50%.

Secara keseluruhan, rasio pertumbuhan belanja pembangunan dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 dengan rata-rata rasio tertinggi adalah Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 23,30%

(meningkat), rata-rata rasio terendah adalah Kabupaten Lebong sebesar -21,80% (menurun), dan rata-rata rasio selama 5 tahun tersebut sebesar 2,11% (meningkat). Terdapat 3 daerah (27,27%) yang mengalami penurunan dan 8 daerah (72,73%) mengalami pertumbuhan (peningkatan).

Selanjutnya, rekapitulasi hasil penghitungan rasio pertumbuhan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 yang terdiri atas Rasio Penerimaan PAD, Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan, dan Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan dapat dilihat pada Tabel 4.11

Tabel 4.11  
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Rasio Pertumbuhan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013

Keterangan	Tahun Anggaran					Rata-rata/ 5 tahun
	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Provinsi Bengkulu</b>						
RPPAD (%)	-0,45	22,00	102,87	-32,08	1,29	18,73
RPTP (%)	-15,53	9,46	16,60	33,89	1,97	9,28
RPBP (%)	-35,85	-33,74	33,82	31,41	4,52	0,03
Rasio Pertumbuhan (%)	-17,28	-0,76	51,10	11,07	2,59	9,35
Kriteria	Menurun	Meningkat	Meningkat	Menurun	Menurun	Meningkat
Peringkat	9	4	1	7	10	7
<b>Kota Bengkulu</b>						
RPPAD (%)	9,68	-0,98	47,38	6,08	10,24	14,48
RPTP (%)	4,97	12,61	14,21	10,69	20,24	12,24
RPBP (%)	6,72	-5,53	-20,71	-23,11	95,68	10,61
Rasio Pertumbuhan (%)	7,12	2,03	13,63	-2,11	42,05	12,54
Kriteria	Meningkat	Menurun	Meningkat	Menurun	Meningkat	Meningkat
Peringkat	6	3	8	11	1	3
<b>Kab. Bengkulu Selatan</b>						
RPPAD (%)	72,56	-46,04	24,08	28,14	29,31	21,61
RPTP (%)	-2,21	7,47	20,00	18,27	5,70	9,84
RPBP (%)	-36,29	-39,28	69,29	7,33	13,47	2,90
Rasio Pertumbuhan (%)	11,35	-25,95	37,79	17,91	16,16	11,45
Kriteria	Meningkat	Menurun	Meningkat	Menurun	Menurun	Meningkat
Peringkat	4	10	2	4	8	4
<b>Kab. Bengkulu Tengah</b>						
RPPAD (%)	-	89,81	41,68	29,22	17,65	44,59
RPTP (%)	-	187,14	18,01	3,28	13,60	55,51
RPBP (%)	-	103,33	21,56	-36,44	4,74	23,30
Rasio Pertumbuhan (%)	-	126,76	27,08	-1,33	12,00	32,91
Kriteria	-	Meningkat	Menurun	Menurun	Meningkat	Meningkat
Peringkat	-	1	3	10	3	1
<b>Kab. Bengkulu Utara</b>						
RPPAD (%)	-15,39	52,46	-6,17	32,52	18,98	16,48
RPTP (%)	-18,59	8,69	34,05	-3,30	8,20	5,81
RPBP (%)	-21,98	-3,67	33,87	37,57	-25,27	4,10
Rasio Pertumbuhan (%)	-18,65	19,16	20,58	22,26	0,64	8,80
Kriteria	Menurun	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Menurun	Meningkat
Peringkat	10	2	4	2	11	10
<b>Kab. Mukomuko</b>						
RPPAD (%)	34,53	0,69	3,39	-1,32	-86,04	-9,75
RPTP (%)	15,18	3,53	5,28	10,67	2,22	7,38

RPPAD (%)	65,81	-43,74	-13,21	28,16	20,52	11,51
Rasio Pertumbuhan (%)	38,51	-13,17	-1,51	12,50	-21,10	3,04
Kriteria Peringkat	Meningkat 1	Menurun 8	Meningkat 11	Meningkat 6	Menurun 9	Meningkat 8
<b>Kab. Kaur</b>						
RPPAD (%)	56,64	-32,91	12,64	14,26	32,89	16,70
RPTP (%)	4,29	7,53	15,58	17,87	7,06	10,47
RPBP (%)	2,36	-30,08	13,54	9,83	18,90	2,91
Rasio Pertumbuhan (%)	21,10	-18,49	13,92	13,99	19,62	10,33
Kriteria Peringkat	Meningkat 2	Menurun 9	Meningkat 7	Meningkat 5	Menurun 7	Meningkat 6
<b>Kab. Seluma</b>						
RPPAD (%)	42,87	-6,94	0,29	93,68	63,85	38,75
RPTP (%)	1,08	1,30	27,35	9,69	18,33	11,55
RPBP (%)	15,44	-4,63	37,20	-35,10	5,24	3,63
Rasio Pertumbuhan (%)	19,80	-3,42	21,61	22,76	29,14	17,98
Kriteria Peringkat	Meningkat 3	Menurun 5	Meningkat 5	Meningkat 3	Meningkat 2	Meningkat 2
<b>Kab. Kepahiang</b>						
RPPAD (%)	27,38	-19,29	24,38	15,90	39,83	17,64
RPTP (%)	8,41	4,31	9,35	2,76	-15,07	1,95
RPBP (%)	-8,86	-14,16	-21,09	-17,75	1,12	-12,15
Rasio Pertumbuhan (%)	8,98	-9,71	4,21	0,30	8,63	2,48
Kriteria Peringkat	Meningkat 5	Menurun 7	Meningkat 9	Menurun 9	Meningkat 4	Meningkat 9
<b>Kab. Lebong</b>						
RPPAD (%)	-38,56	-18,64	24,53	-0,53	65,55	6,47
RPTP (%)	4,16	4,65	18,54	4,13	16,98	9,69
RPBP (%)	-5,65	-94,07	7,97	3,28	-20,55	-21,80
Rasio Pertumbuhan (%)	-13,35	-36,02	17,01	2,29	20,66	-1,88
Kriteria Peringkat	Menurun 8	Menurun 11	Meningkat 6	Menurun 8	Meningkat 5	Menurun 11
<b>Kab. Rejang Lebong</b>						
RPPAD (%)	-0,26	-10,04	10,93	137,63	13,39	30,33
RPTP (%)	-5,77	7,54	8,18	13,00	0,007	4,59
RPBP (%)	-21,73	-15,81	-13,00	11,15	30,17	-1,84
Rasio Pertumbuhan (%)	-9,25	-6,10	2,04	53,93	14,52	11,03
Kriteria Peringkat	Menurun 7	Meningkat 6	Meningkat 10	Meningkat 1	Menurun 6	Meningkat 5
Rata-rata/tahun (%)	4,39	3,12	18,86	13,96	13,17	10,70

Sumber: Data Diolah, 2015

Tabel 4.11 menunjukkan rata-rata rasio pertumbuhan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu berdasarkan nilai rasio penerimaan PAD, rasio pertumbuhan total pendapatan, dan rasio pertumbuhan total pembangunan tahun 2009 sebesar 4,39, pada tahun ini, rasio pertumbuhan Kabupaten Bengkulu Tengah tidak dapat dihitung (ditentukan), karena data LARPBPD tahun 2008 belum ada (kabupaten ini baru terbentuk hasil dari pemekaran Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2008). Tahun 2010 sebesar 3,12% (rasio terendah), tahun 2011 sebesar 18,86% (rasio tertinggi), tahun 2012 sebesar 13,96%, dan tahun 2013 sebesar 13,17%. Selama

lima tahun anggaran tersebut terjadi penurunan rasio pada tahun 2010 dan 2012, dan 2013.

Secara keseluruhan, rasio pertumbuhan dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 dengan rata-rata rasio tertinggi adalah Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 32,91% (meningkat), rata-rata rasio terendah adalah Kabupaten Lebong sebesar -1,88% (menurun), dan rata-rata rasio selama 5 tahun tersebut sebesar 10,70% (meningkat). Terdapat 1 daerah (9,09%) yang mengalami penurunan dan 10 daerah (90,91%) yang mengalami peningkatan.

Selanjutnya, rekapitulasi hasil penghitungan keenam rasio keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 dapat dilihat pada Tabel 4.12

Tabel 4.12  
Rekapitulasi Rata-rata Hasil Penghitungan Rasio Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013

Daerah	Rasio Keuangan Daerah								
	RK (%)	RE (%)	REF (%)	RA		DSCR (%)	RP		
				RBR (%)	RBP (%)		RPPAD (%)	RPTP (%)	RPBP (%)
Provinsi Bengkulu	33,21	94,83	87,39	35,75	10,16	14,92	18,73	9,28	0,03
Rata-rata (%)				22,95			9,35		
Kota Bengkulu	5,78	98,17	95,05	41,22	8,10	-16,63	14,48	12,54	10,61
Rata-rata (%)				24,66			12,54		
Kab. Beng. Selatan	3,92	100,51	94,54	42,69	9,25	-16,30	21,61	9,84	2,90
Rata-rata (%)				25,97			11,45		
Kab. Beng. Tengah	1,28	99,93	92,81	38,25	11,47	-0,93	44,59	55,51	23,30
Rata-rata (%)				24,86			32,91		
Kab. Beng. Utara	3,66	103,51	94,75	39,14	10,57	-42,45	16,48	5,81	4,10
Rata-rata (%)				24,85			8,80		
Kab. Mukomuko	2,24	95,85	86,93	36,50	12,47	5,29	-9,75	7,38	11,51
Rata-rata (%)				24,49			3,04		
Kab. Kaur	2,18	98,55	95,11	37,70	12,32	2,78	16,70	10,47	2,91
Rata-rata (%)				25,01			10,03		
Kab. Seluma	1,96	97,99	88,46	35,52	13,83	22,2	38,75	11,55	3,63
Rata-rata (%)				24,68			17,98		
Kab. Kepahiang	3,46	97,73	91,44	32,17	18,12	28,92	17,64	1,95	-12,15
Rata-rata (%)				25,14			2,48		
Kab. Lebong	2,21	98,93	88,64	34,99	14,73	3,72	6,47	9,69	-21,80
Rata-rata (%)				24,86			-1,88		
Kab. Rejang Lebong	5,41	100,99	94,71	38,37	14,22	11,42	30,33	4,59	-1,84
Rata-rata (%)				26,30			11,03		

Sumber: Data Diolah, 2015

Keterangan:

RK	= Rasio Kemandirian;	RPPAD	= Rasio Penerimaan PAD
RE	= Rasio Efektivitas;	RPTP	= Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan
REf	= Rasio Efisiensi;	RBPB	= Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan
RBR	= Rasio Belanja Rutin;		
RBP	= Rasio Belanja Pembangunan;		
DSCR	= <i>Debt Service Coverage Ratio</i>		

Tabel 4.12 menunjukkan rata-rata hasil penghitungan keenam rasio keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 yang meliputi (1) rasio kemandirian dengan rasio tertinggi adalah Provinsi Bengkulu sebesar 33,21% (sedang) dan rasio terendah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 1,28% (sangat rendah); (2) rasio efektivitas dengan rasio tertinggi adalah Kabupaten Bengkulu Utara sebesar 103,51% (sangat efektif) dan rasio terendah adalah Provinsi Bengkulu sebesar 94,83% (efektif); (3) rasio efisiensi dengan rasio tertinggi adalah Kabupaten Mukomuko sebesar 86,93% (cukup efisien) dan rasio terendah adalah Kabupaten Kaur sebesar 95,11% (kurang efisien); (4) rasio aktivitas dengan rasio tertinggi adalah Kabupaten Rejang Lebong sebesar 26,30% (tidak serasi) dan rasio terendah adalah Provinsi Bengkulu sebesar 22,95% (tidak serasi); (5) DSCR atau rasio kemampuan pemenuhan hutang dengan rasio tertinggi Kabupaten Kepahiang sebesar 28,92% (sangat mampu melunasi hutang) adalah dan rasio terendah adalah Bengkulu Utara sebesar -42,45% (sangat tidak mampu melunasi hutang), dan (6) rasio pertumbuhan dengan rasio tertinggi adalah Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 32,91% dan rasio terendah adalah Kabupaten Lebong sebesar -1,88%.

4.1.3.2 Pengaruh kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah digunakan metode analisis Regresi Linier Berganda. Hasil analisis data dengan metode analisis tersebut diuraikan sebagai berikut:

### 1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif rasio keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 dapat dilihat pada Tabel 4.13

Tabel 4.13  
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Maximum	Minimum	Mean
Rasio Kemandirian	55	33,28	1,23	5,77
Rasio Efektivitas	44	103,51	94,83	98,67
Rasio Efisiensi	44	95,10	86,92	91,79
Rasio Aktivitas	55	28,47	22,27	24,67
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	36	106,28	-42,45	11,76
Rasio Pertumbuhan	54	41,85	-2,75	12,22
Pertumbuhan Ekonomi	54	33,25	3,48	13,05

Sumber: Data Diolah, 2015 (Lampiran 9)

Tabel 4.13 menunjukkan rasio kemandirian dari 55 data, nilai maksimum 33,28%, nilai minimum 1,23%, dan nilai rata-rata 5,77%. Rasio efektivitas dari 44 data, nilai maksimum 103,51%, nilai minimum 94,83%, dan nilai rata-rata 98,67%. Rasio efisiensi dari 44 data, nilai maksimum 95,10%, nilai minimum 86,92%, dan nilai rata-rata 91,79%. Rasio aktivitas dari 55 data, nilai maksimum 28,47%, nilai minimum 22,27%, dan nilai rata-rata 24,67%. *Debt Service Coverage Ratio* dari 36 data, nilai maksimum 106,28%, nilai minimum -42,45%, dan nilai rata-rata 11,76%. Rasio pertumbuhan dari 54 data, nilai maksimum 41,85%, nilai minimum -2,75%, dan nilai rata-rata 12,22%. Pertumbuhan ekonomi dari 54 data, nilai maksimum 33,25%, nilai minimum 3,48%, dan nilai rata-rata 13,05%.

## 2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

### a. Hasil Uji Normalitas

Hasil uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi data terdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan data *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* yang dapat dilihat pada Tabel 4.14

Tabel 4.14  
Hasil Uji Normalitas

Variabel	<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	Keterangan
Rasio Kemandirian	0,161	Normal
Rasio Efektivitas	0,185	Normal
Rasio Efisiensi	0,154	Normal
Rasio Aktivitas	0,068	Normal
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	0,076	Normal
Rasio Pertumbuhan	0,140	Normal
Pertumbuhan Ekonomi	0,394	Normal

Sumber: Data Diolah, 2015 (Lampiran 10)

Tabel 4.14 menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* atau signifikansi lebih besar daripada 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel penelitian terdistribusi secara normal.

### b. Hasil Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen dengan menggunakan data dari *Collinearity Statistics* dapat dilihat pada Tabel 4.15

Tabel 4.15  
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	<i>Collinearity Statistics</i>		Keterangan
	<i>Tolerance</i>	VIF	
Rasio Kemandirian	0,774	1,291	Bebas Multikolinearitas

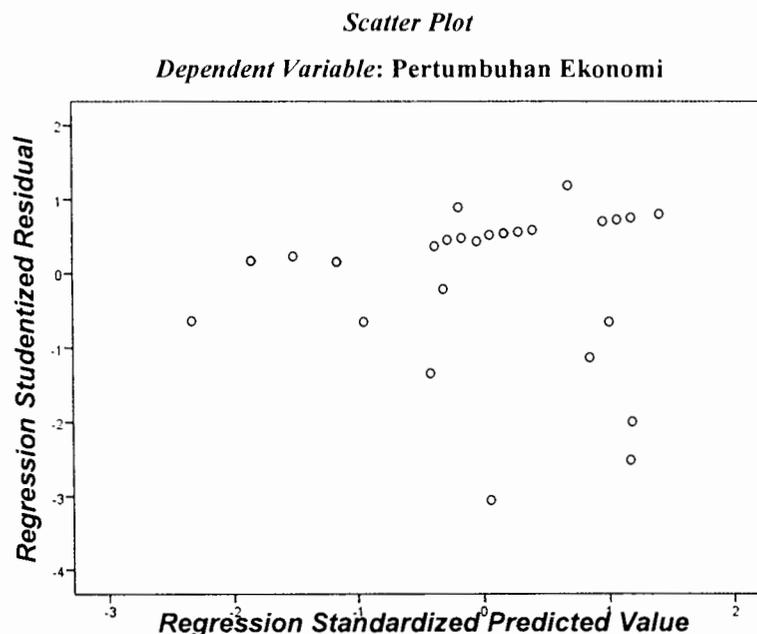
Rasio Efektivitas	0,891	1,325	Bebas Multikolinearitas
Rasio Efisiensi	0,953	1,019	Bebas Multikolinearitas
Rasio Aktivitas	0,987	1,013	Bebas Multikolinearitas
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	0,965	1,036	Bebas Multikolinearitas
Rasio Pertumbuhan	0,826	1,458	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Data Diolah, 2015 (Lampiran 11)

Tabel 4.15 menunjukkan nilai *tolerance* dari keenam variabel independen lebih besar daripada 0,10. Tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih dari 10. Berdasarkan hasil dari kedua nilai tersebut dapat dinyatakan bahwa dalam model regresi tidak terjadi (bebas) multikolinearitas antar variabel independen tersebut.

#### c. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* suatu pengamatan ke pengamatan yang lain dengan menggunakan Grafik *Scatterplot* dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut ini:



Grafik 4.1. Grafik *Scatter Plot*  
Sumber: Data Diolah, 2015

Gambar 4.1 menunjukkan tidak adanya pola yang jelas serta titik-titik menyebar yang di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan dalam model regresi tidak terjadi (bebas) heteroskedastisitas.

#### d. Hasil Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya) dengan melihat nilai *Durbin-Watson* yang dapat dilihat pada Tabel 4.16

Tabel 4.16  
Hasil Uji Autokorelasi

Model	<i>Durbin-Watson</i>	Keterangan
1	1.707	Bebas Autokorelasi

Sumber: Data Diolah, 2015 (Lampiran 12)

Tabel 4.16 menunjukkan nilai *Durbin-Watson* (D-W) sebesar 1,707 yang terletak di antara nilai -2 s.d. +2. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan dalam model regresi ini tidak terjadi (bebas) autokorelasi.

#### 4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Hasil uji Regresi Linier Berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu berdasarkan keenam rasio keuangan tahun anggaran 2009 s.d. 2013 terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah dapat dilihat pada Tabel 4.17

Tabel 4.17  
Hasil Regresi Linier Berganda

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>
	B
Rasio Kemandirian	0,263
Rasio Efektivitas	-0,013
Rasio Efisiensi	0,096
Rasio Aktivitas	0,114

<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	-0,002
Rasio Pertumbuhan	0,241

Sumber: Data Diolah, 2015 (Lampiran 13)

Tabel 4.17 menunjukkan hasil uji Regresi Linier Berganda dengan tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05) diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$PE = 0,263RK - 0,013RE + 0,096REf + 0,114RA - 0,002DSCR + 0,172RP + e$$

Dari hasil Uji Regresi Linier Berganda tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- Nilai koefisien regresi +0,263RK. Artinya, setiap peningkatan Rasio Kemandirian (RK) sebesar 1%, maka pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu akan meningkat sebesar 26,3%.
- Nilai koefisien regresi -0,013RE. Artinya, setiap penurunan Rasio Efektivitas (RE) sebesar 1%, maka pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu akan menurun sebesar 1,3%.
- Nilai koefisien regresi +0,096RE. Artinya, setiap peningkatan Rasio Efisiensi (REf) sebesar 1%, maka pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu akan meningkat sebesar 9,6%.
- Nilai koefisien regresi +0,114RA. Artinya, setiap peningkatan Rasio Aktivitas (RA) sebesar 1%, maka pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu akan meningkat sebesar 11,4%.
- Nilai koefisien regresi -0,002DSCR. Artinya, setiap penurunan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) sebesar 1%, maka pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu akan menurun sebesar 0,2%.
- Nilai koefisien regresi +0,172RP. Artinya, setiap peningkatan Rasio Pertumbuhan (RP) sebesar 1%, maka pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu akan meningkat sebesar 17,2%.

## 5. Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan melalui Uji F (*F-Test*), Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ), dan Uji t (*t-Test*). Hasil ketiga uji statistik tersebut diuraikan sebagai berikut:

### a. Hasil Uji F (*F-Test*)

Hasil uji F (*F-Test*) bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan menggunakan uji simultan ANOVA. Hasil uji statistik F dapat dilihat pada Tabel 4.18

Tabel 4.18  
Hasil Uji F (*F-Test*)

Model	F	Sig.	Keterangan
Regression	8,179	0,007 <sup>a</sup>	Berpengaruh Simultan

Sumber: Data Diolah, 2015 (Lampiran 14)

Tabel 4.18 menunjukkan nilai F yang diperoleh dalam model regresi sebesar 8,179 dengan tingkat signifikansi 0,007 lebih kecil daripada 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 berdasarkan enam rasio keuangan daerah secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah.

### b. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen berdasarkan data yang terdapat dalam *Model Summary* yang dapat dilihat pada Tabel 4.19

Tabel 4.19  
Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model	<i>Adjusted R Square</i>	Keterangan
1	0,670	Berpengaruh sebesar 67%

Sumber: Data Diolah, 2015 (Lampiran 12)

Tabel 4.19 menunjukkan nilai *Adjusted R Square* atau koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,670. Hal ini menunjukkan bahwa 67% variabel pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu dipengaruhi oleh keenam variabel independen, yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, DSCR, dan rasio pertumbuhan. Sisanya sebesar 33% dipengaruhi oleh variabel-variabel independen lainnya diluar penelitian.

c. Hasil Uji t (*t-Test*)

Hasil uji t (*t-Test*) bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen yang terdapat dalam persamaan regresi secara individual berpengaruh terhadap nilai variabel dependen. Hasil uji parsial (Uji t) berdasarkan *Coefficients* dapat dilihat pada Tabel 4.20

Tabel 4.20  
Hasil Uji t

Variabel Penelitian	<i>Sig.</i>	Keterangan	Hipotesis
Rasio Kemandirian	0,012	Berpengaruh	Diterima
Rasio Efektivitas	0,063	Tidak Berpengaruh	Ditolak
Rasio Efisiensi	0,045	Berpengaruh	Diterima
Rasio Aktivitas	0,014	Berpengaruh	Diterima
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	0,086	Tidak Berpengaruh	Ditolak
Rasio Pertumbuhan	0,021	Berpengaruh	Diterima

Sumber: Data Diolah, 2015 (Lampiran 14)

Tabel 4.20 menunjukkan nilai signifikansi variabel rasio kemandirian sebesar 0,012 lebih kecil daripada 0,05. Berdasarkan hasil ini dapat dinyatakan bahwa kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 berdasarkan rasio kemandirian berpengaruh positif secara

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah, sehingga **H<sub>1</sub> (hipotesis pertama)** diterima.

Tabel 4.20 juga menunjukkan nilai signifikansi variabel rasio efektivitas sebesar 0,063 lebih besar daripada 0,05. Berdasarkan hasil ini dapat dinyatakan bahwa kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 berdasarkan rasio efektivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah, sehingga **H<sub>2</sub> (hipotesis kedua)** ditolak.

Tabel 4.20 juga menunjukkan nilai signifikansi variabel rasio efisiensi sebesar 0,045 lebih kecil daripada 0,05. Berdasarkan hasil ini dapat dinyatakan bahwa kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 berdasarkan rasio efisiensi berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah, sehingga **H<sub>3</sub> (hipotesis ketiga)** diterima.

Tabel 4.20 juga menunjukkan nilai signifikansi variabel rasio aktivitas sebesar 0,014 lebih kecil daripada 0,05. Berdasarkan hasil ini dapat dinyatakan bahwa kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 berdasarkan rasio aktivitas berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah, sehingga **H<sub>4</sub> (hipotesis keempat)** diterima.

Tabel 4.20 juga menunjukkan nilai signifikansi variabel DSCR sebesar 0,086 lebih besar daripada 0,05. Berdasarkan hasil ini dapat dinyatakan bahwa kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d.

2013 berdasarkan DSCR tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah, sehingga **H<sub>5</sub> (hipotesis kelima)** ditolak.

Tabel 4.20 juga menunjukkan nilai signifikansi variabel rasio pertumbuhan sebesar 0,021 lebih kecil daripada 0,05. Berdasarkan hasil ini dapat dinyatakan bahwa kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 berdasarkan rasio pertumbuhan berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah, sehingga **H<sub>6</sub> (hipotesis keenam)** diterima.

## 4.2 Pembahasan

Dalam subbab ini dibahas mengenai kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu berdasarkan hasil penghitungan masing-masing rasio keuangan daerah tahun anggaran 2009 s.d. 2013 dan pengaruh kinerja keuangan daerah tersebut sebagai variabel independen (bebas) terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah sebagai variabel dependen (terikat).

### 4.2.1 Kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013

Hasil penghitungan rasio kemandirian keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 diketahui bahwa rata-rata rasio tertinggi adalah Provinsi Bengkulu sebesar 33,21% (sedang), rata-rata rasio terendah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 1,28% (sangat rendah), dan rata-rata rasio selama 5 tahun anggaran tersebut sebesar 5,94% (sangat rendah). Hanya 1 daerah (9,09) dengan kriteria sedang, yaitu Provinsi Bengkulu dan 10 daerah (90,91%) dengan kriteria sangat rendah. Hasil penelitian ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Kurniadi (2014) yang membuktikan bahwa Provinsi Bengkulu dengan rasio tertinggi (33,82%) dan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan rasio terendah (1,23%) selama tahun anggaran 2009 s.d. 2012.

Hasil tersebut di atas menunjukkan bahwa kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu belum mandiri. Artinya, pemerintah daerah sangat menggantungkan diri kepada sumber pendapatan daerah lainnya selain PAD untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, seperti (1) Pendapatan Transfer yang terdiri atas dua komponen, yaitu (a) Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) yang diterima oleh semua daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang meliputi dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan (b) Transfer Pemerintah Provinsi yang diterima oleh kabupaten dan kota berupa pendapatan bagi hasil pajak dan (2) Lain-lain Pendapatan yang Sah yang terdiri atas (a) pendapatan hibah dan (b) pendapatan dana darurat.

Kinerja kemandirian keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu dalam kriteria belum mandiri juga menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah juga tergolong rendah, yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dinyatakan oleh Insukindro, *dkk* (2004: 1) bahwa "Pendapatan Asli Daerah dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap pemerintah pusat".

Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya PAD yang diperoleh daerah yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah. PAD selalu dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD kepada APBD, maka semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah dari prinsip secara nyata dan bertanggungjawab (Halim, 2002).

Untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah perlu dioptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dengan memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif, yaitu sektor yang dapat menghasilkan PAD lebih besar kepada daerah. Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin, seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Kelompok belanja ini meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, serta belanja aset lainnya. Namun, dalam setiap tahun anggaran, keenam jenis belanja tersebut tidak selalu ada (Pambudi, 2007).

Salah satu faktor yang dapat mendorong semakin tingginya keuangan daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Saragih (2003: 105) menyatakan bahwa "Kenaikan PAD akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah". Suryana (2000: 70) menyatakan bahwa "Pertumbuhan ekonomi adalah proses pembangunan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil

produksi dan hasil pendapatan”. Menurut Asfia (2006: 173), “Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi terjadinya perkembangan *Gross National Product* (GNP) potensial yang mencerminkan adanya pertumbuhan *output* per kapita dan meningkatnya standar hidup masyarakat”.

Suatu wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) riil di wilayah tersebut. Apabila tingkat pertumbuhan ekonomi bernilai negatif berarti kegiatan perekonomian menunjukkan penurunan, sebaliknya jika tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut bernilai positif berarti kegiatan perekonomian mengalami peningkatan (Arsyad, 2010).

Hasil penghitungan rasio efektivitas keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 diketahui bahwa rata-rata rasio tertinggi adalah Bengkulu Utara sebesar 103,51% (sangat efektif), rata-rata rasio terendah Provinsi Bengkulu adalah sebesar 94,82% (efektif), dan rata-rata rasio selama 5 tahun tersebut sebesar 98,82% (efektif). Terdapat 8 daerah (72,73%) dengan kriteria efektif dan 3 daerah (27,27%) dengan kriteria sangat efektif. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniadi (2014) yang membuktikan bahwa Kabupaten Bengkulu Utara dengan rasio tertinggi (103,51%) dan Provinsi Bengkulu dengan rasio terendah (94,83%) selama tahun anggaran 2009 s.d. 2012. Perbedaan hasil ini terjadi karena rentang tahun anggaran yang diteliti selama 5 tahun, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniadi (2014) hanya selama 4 tahun.

Hasil tersebut di atas menunjukkan bahwa kinerja kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan dan

ditargetkan (dalam bentuk anggaran) berdasarkan potensi nyata (riil) daerah, khususnya melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah tergolong efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa perbandingan realisasi dengan anggaran yang ditargetkan pemerintah daerah berdasarkan potensi riil daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu mendekati 1 atau dengan persentase hampir mendekati 100% (Mahmudi, 2011). Artinya, semakin besar anggaran PAD yang mampu dicapai dari target yang telah direncanakan, maka kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), khususnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah masing-masing daerah akan semakin baik.

Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu juga tergolong efektif. Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berpengaruh besar terhadap kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan SPM kabupaten/kota di Indonesia (Wahyuni, 2008).

Hasil perhitungan rasio efisiensi keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 diketahui bahwa rata-rata rasio tertinggi adalah Kabupaten Mukomuko sebesar 86,93% (cukup efisien), rata-rata rasio terendah adalah Kabupaten Kaur sebesar 95,11% (kurang efisien), dan rata-rata rasio selama 5 tahun tersebut sebesar 91,80% (kurang efisien). Terdapat 4 daerah (36,36%) dengan kriteria cukup efisien dan 7 daerah (64,64%) dengan kriteria kurang efisien. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniadi (2014) yang membuktikan bahwa Kabupaten Mukomuko dengan rasio tertinggi (86,93%) dan Kabupaten Kaur dengan rasio terendah (95,11%) selama

tahun anggaran 2009 s.d. 2012. Perbedaan hasil ini terjadi karena rentang tahun anggaran yang diteliti selama 5 tahun, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniadi (2014) hanya selama 4 tahun.

Hasil tersebut di atas menunjukkan bahwa tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tergolong kurang efisien. Artinya, alokasi belanja daerah yang terdiri atas Belanja Operasi (Belanja Wajib), Belanja Modal (Belanja Pembangunan), Belanja tidak Terduga yang mampu direalisasikan pemerintah daerah lebih kecil daripada yang telah dianggarkan. Hal ini merupakan implikasi dari rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah yang masih menggantungkan diri dengan dana dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan, khususnya DAU. Selain itu, hasil ini mengindikasikan bahwa tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tergolong tidak efisien.

Tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tergolong tidak efisien. Artinya, penggunaan dana APBD untuk belanja daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik tergolong tidak efisien, khususnya dana yang dialokasikan untuk belanja langsung. Biaya yang dikeluarkan dalam bentuk belanja daerah untuk merealisasikan target penerimaan PAD lebih besar daripada realisasi pendapatan itu sendiri.

Secara umum, belanja daerah dibagi dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

dinyatakan bahwa belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah yang telah dianggarkan (Vegirawati, 2012). Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung terdiri atas belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga (Vegirawati, 2012).

Menurut Budiarto (2007: 91), faktor penentu efisiensi keuangan daerah meliputi:

1. Faktor sumber daya, baik berupa Sumber Daya Manusia (SDM), seperti tenaga kerja, kemampuan kerja (kinerja) maupun sumber daya fisik, seperti peralatan kerja, tempat kerja, serta dana keuangan.
2. Faktor struktur organisasi, yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan, baik jabatan struktural maupun fungsional.
3. Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan.
4. Faktor dukungan masyarakat terhadap aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
5. Faktor pimpinan, yaitu kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor di atas kedalam suatu bentuk usaha yang berdaya guna untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai.

Berdasarkan uraian di atas perlu dilakukan evaluasi yang ketat oleh setiap SDM yang terlibat dalam penyusunan anggaran keuangan daerah dan para

pemangku kepentingan (*stakeholders*) kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu dalam merealisasikan anggaran belanja yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penggunaan dana APBD diperlukan kualitas SDM yang kompeten dalam hal manajemen, sehingga anggaran belanja yang dikeluarkan mampu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan pembangunan dan mampu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakatnya.

Hasil penghitungan rasio aktivitas (keserasian belanja) kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 diketahui bahwa rata-rata rasio tertinggi adalah Kabupaten Rejang Lebong sebesar 26,30% (tidak serasi), rata-rata rasio terendah adalah Provinsi Bengkulu sebesar 22,95% (tidak serasi), dan rata-rata rasio selama 5 tahun tersebut sebesar 24,89% (tidak serasi). Semua daerah (100%) dengan kriteria tidak serasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniadi (2014) yang membuktikan bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan dengan rasio tertinggi (83,71%) dan Kabupaten Kepahiang dengan rasio terendah (64,03%) selama tahun anggaran 2009 s.d. 2012. Perbedaan hasil ini terjadi karena rentang tahun anggaran yang diteliti selama 5 tahun, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniadi (2014) hanya selama 4 tahun.

Hasil tersebut di atas mengindikasikan bahwa dana APBD yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu untuk membiayai kegiatan belanja daerah, baik belanja modal maupun belanja pembangunan tergolong tidak serasi. Artinya, dana APBD yang ada mengalami banyak kebocoran untuk alokasi yang tidak jelas, yaitu alokasi dana yang berunsur KKN, khususnya unsur korupsi.

Selain itu, hasil ini menunjukkan bahwa kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tidak atau belum melakukan belanja rutin (belanja operasi) yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan secara proporsional terhadap total APBD tiap tahunnya. Alokasi belanja operasi yang tidak proporsional yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah dapat dilihat dari total belanja operasi yang lebih besar dibandingkan dengan total belanja modal maupun belanja tidak terduga berdasarkan data yang dalam LRAPBD selama keempat periode tahun anggaran.

Kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu selama tahun anggaran 2009 s.d. 2013 belum sepenuhnya mengalihkan fokus aktivitas wilayah pemerintahannya agar mengarah kepada belanja pembangunan yang tentunya ini akan memberikan dampak kepada usaha peningkatan pendapatan daerah dari segi pembangunan daerah. Aktivitas wilayah merupakan rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan dari pengembangan dan pembangunan wilayah dan merupakan suatu pengembangan yang terpadu dengan memanfaatkan saling keterkaitan antar sektor yang membentuk struktur ruang wilayah. Wilayah sebagai wadah kegiatan ekonomi memiliki peran penting bagi wilayahnya sendiri maupun daerah disekitar wilayah. Memahami sistem aktivitas wilayah, pola perilaku manusia merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan wilayah, yaitu sistem kegiatan yang menyangkut hubungan yang lebih kompleks (*cross relationship*) dengan berbagai sistem kegiatan yang lain, baik dengan perorangan, kelompok, maupun lembaga (Hirawan, 2010).

Hasil penghitungan *Debt Service Coverage Ratio* atau Rasio Kemampuan Pemenuhan Hutang kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 diketahui bahwa rata-rata rasio tertinggi adalah Kabupaten Kepahiang sebesar 28,92% dengan kemampuan yang melebihi jumlah hutang yang ada, rata-rata rasio terendah adalah Kabupaten Bengkulu Utara sebesar -42,45% (tidak mampu mengembalikan hutang pada tahun anggaran yang sama), dan rata-rata rasio selama 5 tahun tersebut sebesar 1,18% (mampu mengembalikan hutang selama 5 tahun anggaran tersebut). Terdapat 4 daerah (36,36%) yang tidak mampu mengembalikan hutang dan 7 daerah (63,64%) yang mampu mengembalikan hutang.

Hasil tersebut di atas menunjukkan bahwa rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu memiliki kemampuan untuk mengembalikan hutang (pinjaman) dengan pihak luar (pihak ketiga). Hal ini dikarenakan hasil selisih antara hasil penjumlahan PAD, bagian daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil bukan Pajak (Sumber Daya Alam) dengan Belanja Wajib (Belanja Pegawai) lebih besar daripada total pengeluaran daerah dikali dengan bunga pinjaman berdasarkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang sedang berlaku.

Hasil penghitungan rasio pertumbuhan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 diketahui bahwa rata-rata rasio tertinggi adalah Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 32,91% (meningkat), rata-rata rasio terendah adalah Kabupaten Lebong sebesar -1,88% (menurun), dan rata-rata rasio selama 5 tahun tersebut sebesar 10,70% (meningkat). Terdapat 1 daerah (9,09%)

yang mengalami penurunan dan 10 daerah (90,91%) yang mengalami peningkatan.

Hasil tersebut di atas menunjukkan bahwa selama 5 tahun anggaran tersebut, rata-rata realisasi penerimaan PAD, rata-rata realisasi penerimaan total pendapatan, dan rata-rata realisasi belanja pembangunan yang mampu dicapai oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan.

#### 4.2.2 Pengaruh kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 terhadap pertumbuhan ekonomi

Kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 berdasarkan rasio kemandirian berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,012 yang lebih kecil daripada 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Solikhah (2011) yang membuktikan bahwa rasio kemandirian berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2000 s.d. 2009 dan Kurniawan (2008) yang membuktikan bahwa rasio kemandirian berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat dalam era otonomi daerah.

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio kemandirian, maka pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah akan semakin meningkat atau sebaliknya. Rasio kemandirian keuangan daerah atau rasio desentralisasi fiskal menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD yang diterima daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber pendapatan yang lain, misalnya bantuan pusat dan pinjaman. Artinya, rasio kemandirian keuangan suatu daerah erat kaitannya dengan PAD daerah itu sendiri.

Jika PDRB merupakan indikator makro dari laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka semakin meningkat nilai PDRB suatu daerah dari tahun ke tahun, maka dapat dinyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tersebut semakin meningkat. Peningkatan ini merupakan implikasi dari peningkatan PAD yang diterima oleh daerah setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Saragih (2003: 33) yang menyatakan bahwa “Peningkatan PAD sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi”. Artinya, daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan untuk meningkatkan PAD-nya.

Kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 berdasarkan rasio efektivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,063 yang lebih besar daripada 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ani (2014) yang membuktikan bahwa rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Bali tahun anggaran 2007 s.d. 2011 dan Kurniawan (2008) yang membuktikan bahwa rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat dalam era otonomi daerah.

Hasil ini menunjukkan bahwa besar kecilnya rasio efektivitas tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada masing-masing daerah. Rasio

efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi nyata (*riil*) daerah. Namun, jika PAD yang diterima tersebut tidak dialokasikan untuk kegiatan yang dapat memacu perkembangan kegiatan perekonomian di suatu daerah yang menyebabkan bertambahnya produksi barang dan jasa dan kemakmuran masyarakat yang meningkat, seperti belanja modal (belanja pembangunan), maka berapapun besarnya PAD yang diterima oleh suatu daerah tidak akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Artinya, rasio efisiensi memiliki hubungan yang erat dengan rasio aktivitas, khususnya rasio belanja pembangunan terhadap PAD.

Kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 berdasarkan rasio efisiensi berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,045 yang lebih kecil daripada 0,05. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ani (2014) yang membuktikan bahwa rasio efisiensi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Bali tahun anggaran 2007 s.d. 2011 dan Kurniawan (2008) yang membuktikan bahwa rasio efisiensi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat dalam era otonomi daerah.

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio efisiensi, maka pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah akan semakin meningkat atau sebaliknya. Rasio efisiensi keuangan daerah merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah

yang diukur dengan membandingkan realisasi belanja terhadap anggaran belanja yang telah ditetapkan. Artinya, rasio efisiensi memiliki hubungan yang erat dengan rasio aktivitas, khususnya rasio belanja pembangunan terhadap PAD. Pengaruh rasio efisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu dapat diketahui dengan terdapatnya 4 daerah (36,36%) dengan kriteria cukup efisien.

Kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 berdasarkan rasio aktivitas berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,014 yang lebih kecil daripada 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2008) yang membuktikan bahwa rasio aktivitas yang terdiri atas rasio keserasian belanja operasional (rasio belanja rutin terhadap PAD) dan rasio keserasian belanja modal (rasio belanja pembangunan terhadap PAD) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat dalam era otonomi daerah.

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio aktivitas, maka pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah akan semakin meningkat atau sebaliknya. Artinya, semakin besar dana APBD yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk kegiatan belanja rutin dan belanja pembangunan, maka akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena rasio aktivitas dalam bentuk belanja pembangunan khususnya, identik dengan belanja yang dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti jalan, jembatan, fasilitas umum lainnya. Dengan adanya

kelengkapan semua fasilitas tersebut, maka akan mampu memicu laju pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 berdasarkan DSCR atau Rasio Kemampuan Pemenuhan Hutang tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,086 yang lebih besar daripada 0,05.

Hasil ini menunjukkan bahwa besar kecilnya DSCR tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada masing-masing daerah. Artinya, walaupun pemerintah kabupaten/kota di Provinsi memiliki kemampuan untuk melunasi semua bentuk pinjaman (hutang) dengan pihak luar (pihak ketiga), namun hal ini tidak ada kaitannya dengan peningkatan PDRB sebagai indikator ekonomi makro yang menggambarkan ada atau tidaknya pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan nilai PDRB dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tersebut meningkat setiap tahunnya. Nilai PDRB lebih ditentukan oleh peningkatan produksi pada berbagai sektor lapangan usaha yang ada (Asfia, 2006).

Kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d. 2013 berdasarkan rasio pertumbuhan berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,021 yang lebih kecil daripada 0,05. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ani (2014) yang membuktikan bahwa rasio pertumbuhan pendapatan (salah satu rasio

pertumbuhan) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Bali tahun anggaran 2007 s.d. 2011.

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio pertumbuhan, maka pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah akan semakin meningkat atau sebaliknya. Artinya, semakin meningkatnya rasio penerimaan PAD, rasio pertumbuhan total pendapatan, dan rasio pertumbuhan belanja pembangunan, maka akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Hal ini dapat diketahui dari rata-rata dari ketiga rasio pertumbuhan tersebut selama 5 tahun anggaran, yaitu rasio penerimaan PAD sebesar 21,13% (meningkat), rasio pertumbuhan total pendapatan sebesar 8,90% (meningkat), dan rasio pertumbuhan belanja pembangunan sebesar 3,31% (meningkat)

Secara simultan, kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu berdasarkan keenam rasio keuangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Hal ini dapat diketahui dari keenam rasio keuangan sebagai indikator kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu selama tahun anggaran 2009 s.d. 2013 sebanyak empat rasio berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah yang meliputi rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan dan hanya dua rasio yang tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin baik kinerja keuangan daerah, khususnya melalui keempat rasio keuangan tersebut, maka pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu akan semakin meningkat atau sebaliknya.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2009 s.d 2013 dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi pada masing-masing daerah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Semakin tinggi rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan maka pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah akan semakin meningkat atau sebaliknya, sedangkan besar kecilnya rasio efektivitas dan rasio DSCR tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada masing-masing daerah.
2. Rasio kemandirian merupakan sentral rasio dikarenakan semakin besar rasio kemandirian berarti pemerintah daerah lebih leluasan dalam pengelolaan keuangan daerah, apabila pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tepat maka akan meningkatkan rasio-rasio lainnya yang berarti secara langsung berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja keuangan daerah dengan menggunakan rasio keuangan daerah perlu dilakukan oleh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu yang dapat dilakukan secara rutin untuk rentang waktu setiap 5 tahun agar hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan bagi seluruh pemerintah daerah pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Hasil pengukuran kinerja tersebut juga dapat dijadikan sebagai masukan untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas publik. Untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah pada masa yang akan datang, maka pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota perlu mengoptimalkan potensi pendapatan riil daerah yang dimiliki dengan memberikan proporsi belanja modal (belanja pembangunan) yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif. Selain itu dapat dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur dengan indikator Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).
2. Faktor lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan daerah dengan melakukan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam hal ini, yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah dalam bentuk sosialisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ani, N.L.N.P., & Dwirandra, A.A.N.B. (2014). Pengaruh kinerja keuangan daerah pada pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan kabupaten dan kota. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 6(3), 481-497.
- Alkaf, M.R. (2009). *Analisis rasio kinerja keuangan daerah Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi pembangunan edisi ke-5*. Yogyakarta: UPP STIE YKPN.
- Asfia, M. (2006). *Ekonomi makro*. Yogyakarta: Reflika Aditama.
- Azhar, M.K.S. (2008). *Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum dan setelah otonomi daerah*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar*. Jakarta: Salemba Empat.
- Batafor, G.G. (2011). *Evaluasi kinerja keuangan dan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lembata Provinsi NTT*. Diambil tanggal 4 Maret 2015, [http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf\\_thesis/unud-434-976970535-tesis.pdf](http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-434-976970535-tesis.pdf)
- Boedi, S. (2012). Analisis kinerja keuangan pada APBD Pemerintah Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. *Jurnal Spread Oktober 2012*, 2 (2), 183-190.
- Budiarto, A. (2007). *Jasa-jasa audit*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dwiranra, D. (2007). *Analisis APBD sebagai alat ukur efektivitas kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dan Pemerintah Daerah Rejang Lebong*. Bengkulu: Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
- Ghozali, I. (2013). *Analisis multivariate dengan program IBM SPSS 21 edisi-7*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2002). *Manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan. YKPN.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamzah, A. (2008). Analisis kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan: Pendekatan analisis jalur ( Studi pada 29 kabupaten dan 9 kota di Provinsi Jawa Timur periode 2001-2006).

*Simposium Nasional Akuntansi XI*. Diambil tanggal 3 Maret 2015, <https://priyohari.files.wordpress.com/2009/06/analisa-kinerja-keuangan-terhadap-pertumbuhan-ekonomi.pdf>

- Harianto, D., & Adi, P.H. (2007). Hubungan antara dana alokasi umum, belanja modal, pendapatan asli daerah, dan pendapatan per kapita. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Universitas Hasanudin, 26-28 Juli 2007, 1-26.
- Hendriyadi, S. (2011). *Perbandingan indikator kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah antara tahun 2008-2009*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hirawan, H. (2010). *Pelaksanaan Pembangunan pada era otonomi daerah*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Insukindro, M., Wahyu, W.K.J., Purwanto, A.H., John, S., & Budi, P. (2004). Peranan pengelolaan keuangan daerah dalam usaha peningkatan PAD. *Laporan hasil penelitian KKD*. Yogyakarta: FE UGM.
- Kuncoro, M. (2004). *Desentralisasi fiskal di Indonesia: Dilema otonomi dan ketergantungan*. Jakarta: Prisma.
- Kurniadi, N. (2014). *Analisis perbandingan kinerja keuangan kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu*. Diambil tanggal 6 Maret 2015, <http://repository.unib.ac.id/9480/>
- Kurniati, S. (2012). *Analisis perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten kota se-Jawa Tengah sebelum dan sesudah krisis ekonomi 2008*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kurniawan, D. (2010). *Pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi kota/kabupaten di Sumatera Barat dalam era otonomi daerah*. Padang: Universitas Andalas.
- Mahmudi (2011). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press.
- Mardiasmo (2002). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mulyadi (2001). *Balanced scorecard alat manajemen kontemporer untuk pelipatganda kinerja keuangan perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Najiah, L. (2013). *Analisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap PDRB di Kota Depok periode 2001-2010*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

- Pambudi, T. (2007). *Flypaper effect pada dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Bali*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Patikawa, E. (2011). *Pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pasca pelaksanaan undang-undang otonomi daerah (Studi pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kementerian Sekretaris Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang *Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah*. Jakarta: Kementerian Sekretaris Negara.
- Poerwadarminta, W.J.S. (2002). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Prakosa (2008). *Analisis pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap prediksi belanja daerah (Studi empiris di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Putro, N.S. (2010). *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal (Studi kasus pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah)*. Diambil tanggal 7 Maret 2015, <http://eprints.undip.ac.id/26411/2/jurnal.pdf>
- Rahmawati, N.I. (2010). *Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap alokasi belanja langsung (Studi pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Saragih, J.P. (2003). *Desentralisasi fiskal dan keuangan daerah dalam otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Solikhah, R. (2011). *Analisis kemampuan kemandirian keuangan daerah dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2000-2009*. Diambil tanggal 6 Maret 2015, <http://eprints.uns.ac.id/4979/1/208481611201104331.pdf>
- Sugiyono (2012). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno (2008). *Mikro ekonomi: Teori pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Suparmoko (2002). *Ekonomi publik untuk keuangan dan pembangunan daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Suprasto, B. (2003). Peluang dan tantangan implementasi anggaran berbasis kinerja. *Buletin Studi Ekonomi*, 11, 270-281.
- Suryana (2000). Determinan pertumbuhan kota di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*. 5(1), 61-82.
- Susantih, H., & Saftiana, Y. (2008). *Perbandingan indikator kinerja keuangan Pemerintah Provinsi se-Sumatera Bagian Selatan*. Diambil tanggal 5 Maret 2015, <http://eprints.unsri.ac.id/2506/2/article3.pdf>
- Tarigan, R. (2005). *Ekonomi regional: Teori dan aplikasi* edisi revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 tentang *Pembentukan Provinsi Bengkulu*. Jakarta: Kementerian Sekretaris Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Kementerian Sekretaris Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kementerian Sekretaris Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang *Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu*. Jakarta: Kementerian Sekretaris Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Kementerian Sekretaris Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang *Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu*. Jakarta: Kementerian Sekretaris Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 tentang *Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu*. Jakarta: Kementerian Sekretaris Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kementerian Sekretaris Negara.

- Vegirawati, T. (2012). Pengaruh alokasi belanja langsung terhadap kualitas pembangunan manusia (Studi kasus pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan). *Jurnal Ekonomi dan Informatika Akuntansi (Jenius) Universitas IBA Palembang*. Vol. 2 No. 1 Januari 2012.
- Wahyuni, N. (2008). *Analisis rasio untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah Kota Malang*. Malang: Universitas Islam Negeri Maliki.
- Yustikasari, Y. (2007). *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap alokasi belanja modal pada provinsi di Pulau Jawa*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

**Lampiran 1**  
**Tabulasi Data Hasil Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013**

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Tahun Anggaran					Rata-rata Rasio Kemandirian
		2009	2010	2011	2012	2013	
1	<b>Provinsi Bengkulu</b>						
	Total PAD	287.781.580.630,84	351.091.488.316,00	440.920.183.714,43	483.768.274.997,19	490.027.933.000,00	410.717.892.131,69
	Total Pendapatan Daerah	914.357.986.547,18	1.000.860.633.676,22	1.166.982.246.117,93	1.562.525.395.259,19	1.593.284.879.000,00	1.428.775.743.255,80
	Rasio Kemandirian (%)	31,47	35,08	37,78	30,96	30,76	33,21
	Kriteria	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
	Peringkat	1	1	1	1	1	1
2	<b>Kota Bengkulu</b>						
	Total PAD	26.941.305.683,11	26.677.744.840,91	39.318.037.209,63	41.709.552.051,54	45.979.828.000,00	36.125.293.557,04
	Total Pendapatan Daerah	475.664.056.169,03	535.671.744.733,62	611.815.153.447,27	677.219.227.884,87	814.306.261.000,00	622.935.288.646,96
	RK (%)	5,67	4,98	6,43	6,16	5,65	5,78
	Kriteria	S. Rendah	S. Rendah	S. Rendah	S. Rendah	S. Rendah	S. Rendah
	Peringkat	3	2	2	3	3	2
3	<b>Kab. Bengkulu Selatan</b>						
	Total PAD	22.042.030.166,95	11.894.036.693,62	14.758.401.174,70	18.911.016.577,54	24.454.023.000,00	18.411.901.522,56
	Total Pendapatan Daerah	367.515.091.913,42	394.967.751.169,42	473.978.187.300,48	560.560.557.651,90	592.513.236.800,00	477.906.964.967,04
	Rasio Kemandirian (%)	6	3,01	3,11	3,37	4,13	3,92
	Kriteria	S. Rendah	S. Rendah	S. Rendah	S. Rendah	S. Rendah	S. Rendah
	Peringkat	2	5	4	5	6	4
4	<b>Kab. Bengkulu Tengah</b>						
	Total PAD	1.652.713.172,72	3.137.025.712,68	4.444.531.263,22	5.743.484.323,56	6.756.990.000,00	4.346.948.894,44
	Total Pendapatan Daerah	115.435.944.408,29	331.467.251.982,75	391.166.071.575,62	404.008.617.700,15	458.965.742.300,00	340.208.725.593,36
	Rasio Kemandirian (%)	1,43	0,95	1,14	1,42	1,47	1,28
	Kriteria	S. Rendah	S. Rendah	S. Rendah	S. Rendah	S. Rendah	S. Rendah
	Peringkat	11	11	11	11	11	11
5	<b>Kab. Bengkulu Utara</b>						
	Total PAD	13.350.500.134,91	20.354.406.066,04	19.099.215.920,70	25.311.027.531,89	30.114.221.900,00	17.829.851.110,71
	Total Pendapatan Daerah	452.255.879.286,35	491.578.362.701,48	658.968.050.834,11	637.197.151.792,06	689.468.952.000,00	585.893.679.322,80
	Rasio Kemandirian (%)	2,95	4,14	2,89	3,97	4,37	3,66
	Kriteria	S. Rendah	S. Rendah	S. Rendah	S. Rendah	S. Rendah	S. Rendah
	Peringkat	7	3	5	4	5	5

No	Keterangan	Tahun Anggaran					Rata-rata Rasio Kemandirian
		2009	2010	2011	2012	2013	
6	<b>Kab. Mukomuko</b>						
	Total PAD	8.973.011.076,60	9.034.573.730,36	9.341.068.798,75	9.217.503.958,91	11.286.295.900,00	75.70.490.692,92
	Total Pendapatan Daerah	384.099.956.026,41	397.649.695.233,52	418.638.587.193,48	463.290.436.824,93	473.580.908.200,00	427.451.916.695,67
	Rasio Kemandirian (%)	2,34	2,27	2,23	1,99	2,38	2,24
	Kriteria Peringkat	S. Rendah 9	S. Rendah 7	S. Rendah 7	S. Rendah 8	S. Rendah 9	S. Rendah 7
7	<b>Kab. Kaur</b>						
	Total PAD	9.012.332.810,80	6.046.143.975,79	6.810.591.506,25	7.781.828.801,72	10.341.333.200,00	7.998.446.058,91
	Total Pendapatan Daerah	293.018.794.929,45	316.148.803.900,25	365.412.752.616,15	430.696.678.776,42	461.126.824.400,00	373.280.770.924,45
	Rasio Kemandirian (%)	3,08	1,91	1,86	1,80	2,24	2,18
	Kriteria Peringkat	S. Rendah 6	S. Rendah 9	S. Rendah 9	S. Rendah 10	S. Rendah 10	S. Rendah 9
8	<b>Kab. Seluma</b>						
	Total PAD	5.931.374.613,80	5.519.577.177,46	5.535.533.741,35	10.751.155.674,78	17.566.639.600,00	9.060.856.161,48
	Total Pendapatan Daerah	342.548.224.324,81	348.194.074.751,43	443.436.814.889,58	486.402.190.725,83	575.579.661.700,00	439.232.193.278,33
	Rasio Kemandirian (%)	1,73	1,58	1,24	2,21	3,05	1,96
	Kriteria Peringkat	S. Rendah 10	S. Rendah 10	S. Rendah 10	S. Rendah 7	S. Rendah 7	S. Rendah 10
9	<b>Kab. Kepahiang</b>						
	Total PAD	11.943.947.476,50	9.639.855.811,83	11.969.653.357,14	13.896.281.348,17	19.467.833.700,00	13.383.514.338,73
	Total Pendapatan Daerah	364.641.691.911,33	380.348.105.067,26	415.929.103.351,76	427.421.378.601,93	363.018.004.600,00	390.089.856.706,46
	Rasio Kemandirian (%)	3,28	2,53	2,87	3,25	5,36	3,46
	Kriteria Peringkat	S. Rendah 5	S. Rendah 6	S. Rendah 6	S. Rendah 6	S. Rendah 4	S. Rendah 6
10	<b>Kab. Lebong</b>						
	Total PAD	7.680.588.328,60	6.255.400.998,83	7.790.174.032,14	7.749.144.879,31	12.828.933.500,00	8.460.848.347,78
	Total Pendapatan Daerah	311.395.371.741,06	325.878.637.650,30	386.300.497.723,93	402.267.188.552,47	470.564.114.000,00	379.281.161.933,55
	Rasio Kemandirian (%)	2,47	1,92	2,01	1,92	2,73	2,21
	Kriteria Peringkat	S. Rendah 8	S. Rendah 8	S. Rendah 8	S. Rendah 9	S. Rendah 8	S. Rendah 8
11	<b>Kab. Rejang Lebong</b>						
	Total PAD	19.892.527.742,24	17.894.582.123,25	19.851.004.770,20	47.171.759.045,92	53.490.305.300,00	31.660.035.796,32
	Total Pendapatan Daerah	479.808.456.319,22	516.012.940.894,90	558.241.358.035,27	630.815.936.603,71	635.081.809.100,00	563.992.100.190,62
	Rasio Kemandirian (%)	4,15	3,47	3,55	7,48	8,42	5,41
	Kriteria Peringkat	S. Rendah 4	S. Rendah 4	S. Rendah 3	S. Rendah 2	S. Rendah 2	S. Rendah 3

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2015

**Lampiran 2**  
**Tabulasi Data Hasil Penghitungan Rasio Efektivitas Keuangan Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013**

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Tahun Anggaran					Rata-rata Rasio Efektivitas
		2009	2010	2011	2012	2013	
1	<b>Provinsi Bengkulu</b>						
	Realisasi Pendapatan	914.357.986.547,18	1.000.860.633.676,22	1.166.982.246.117,93	1.562.525.395.259,19	1.593.284.879.000,00	1.247.602.228.120,10
	Anggaran Pendapatan	1.071.240.554.845,75	1.074.903.895.189,00	1.160.076.493.031,00	1.558.319.652.151,00	-	1.216.135.148.804,19
	Rasio Efektivitas (%)	85,35	93,11	100,59	100,27	-	94,83
	Kriteria	C. Efektif	Efektif	S. Efektif	S. Efektif	-	Efektif
	Peringkat	11	9	3	7	-	11
2	<b>Kota Bengkulu</b>						
	Realisasi Pendapatan	475.664.056.169,03	535.671.774.733,62	611.815.153.447,27	677.219.227.884,87	814.306.261.000,00	622.935.294.646,96
	Anggaran Pendapatan	491.162.327.128,79	545.397.764.555,15	615.877.514.247,10	679.024.009.266,11	-	582.865.403.827,04
	Rasio Efektivitas (%)	96,84	98,22	99,34	98,26	-	98,17
	Kriteria	Efektif	Efektif	Efektif	Efektif	-	Efektif
	Peringkat	8	6	5	10	-	7
3	<b>Kab. Bengkulu Selatan</b>						
	Realisasi Pendapatan	367.515.091.913,42	394.967.751.169,42	473.978.187.300,48	560.560.557.651,90	592.513.236.800,00	477.906.964.967,04
	Anggaran Pendapatan	362.304.354.998,00	396.450.120.447,00	478.527.250.879,92	552.128.920.442,00	-	447.352.661.691,73
	Rasio Efektivitas (%)	101,44	99,62	99,46	101,52	-	100,51
	Kriteria	S. Efektif	Efektif	Efektif	S. Efektif	-	S. Efektif
	Peringkat	4	5	4	4	-	3
4	<b>Kab. Bengkulu Tengah</b>						
	Realisasi Pendapatan	115.435.944.408,29	331.467.251.982,75	391.166.071.575,62	404.008.617.700,15	458.965.742.300,00	340.208.725.593,36
	Anggaran Pendapatan	114.301.376.101,00	329.184.964.259,00	395.925.566.166,00	406.997.514.778,02	-	311.602.355.326,00
	Rasio Efektivitas (%)	100,99	100,69	98,79	99,26	-	99,93
	Kriteria	S. Efektif	S. Efektif	Efektif	Efektif	-	Efektif
	Peringkat	5	3	9	8	-	4
5	<b>Kab. Bengkulu Utara</b>						
	Realisasi Pendapatan	452.255.879.286,35	491.578.362.701,48	658.968.050.834,11	637.197.151.792,06	689.468.952.000,00	585.893.679.322,80
	Anggaran Pendapatan	441.064.855.500,00	481.610.868.600,00	651.022.670.974,00	588.867.816.266,22	-	540.641.552.835,06
	Rasio Efektivitas (%)	102,54	102,07	101,22	108,20	-	103,51
	Kriteria	S. Efektif	S. Efektif	S. Efektif	S. Efektif	-	S. Efektif
	Peringkat	2	2	1	1	-	1

No	Keterangan	Tahun Anggaran					Rata-rata Rasio Efektivitas
		2009	2010	2011	2012	2013	
6	<b>Kab. Mukomuko</b>						
	Realisasi Pendapatan	384.099.956.026,41	397.649.695.233,52	418.638.587.193,48	463.290.436.824,93	473.580.908.200,00	427.451.916.695,67
	Anggaran Pendapatan	424.025.935.116,00	433.719.122.153,63	415.154.129.429,19	461.809.139.945,00	-	433.677.081.660,96
	Rasio Efektivitas (%)	90,58	91,68	100,83	100,32	-	95,85
	Kriteria	Efektif	Efektif	S. Efektif	S. Efektif	-	Efektif
	Peringkat	10	10	2	6	-	10
7	<b>Kab. Kaur</b>						
	Realisasi Pendapatan	293.018.794.929,45	316.148.803.900,25	365.412.752.616,15	430.696.678.776,42	461.126.824.400,00	373.280.770.924,45
	Anggaran Pendapatan	301.688.171.283,00	325.321.669.582,76	369.652.195.362,74	426.347.868.786,00	-	355.752.476.253,62
	Rasio Efektivitas (%)	97,13	97,18	98,85	101,02	-	98,55
	Kriteria	Efektif	Efektif	Efektif	S. Efektif	-	Efektif
	Peringkat	7	7	8	5	-	6
8	<b>Kab. Seluma</b>						
	Realisasi Pendapatan	342.548.224.324,81	348.194.074.751,43	443.436.814.889,58	486.402.190.725,89	575.579.661.700,00	439.232.193.278,34
	Anggaran Pendapatan	333.485.399.010,00	384.549.976.557,75	457.523.507.688,03	477.961.700.478,00	-	413.380.145.933,44
	Rasio Efektivitas (%)	102,72	90,54	96,92	101,76	-	97,99
	Kriteria	S. Efektif	Efektif	Efektif	S. Efektif	-	Efektif
	Peringkat	1	11	11	3	-	8
9	<b>Kab. Kepahiang</b>						
	Realisasi Pendapatan	364.641.691.911,33	380.348.105.067,26	415.929.103.351,76	427.421.378.601,93	363.018.004.600,00	390.271.656.706,46
	Anggaran Pendapatan	374.530.532.880,50	397.358.048.672,31	420.376.314.095,34	432.174.284.859,43	-	406.109.795.126,90
	Rasio Efektivitas (%)	97,36	95,72	98,94	98,90	-	97,73
	Kriteria	Efektif	Efektif	Efektif	Efektif	-	Efektif
	Peringkat	6	8	7	9	-	9
10	<b>Kab. Lebong</b>						
	Realisasi Pendapatan	311.395.371.741,06	325.878.637.650,30	386.300.497.723,93	402.267.188.552,47	470.564.114.000,00	379.281.161.933,55
	Anggaran Pendapatan	321.695.999.979,00	318.240.102.690,63	389.292.783.875,46	413.429.566.960,97	-	360.664.613.376,51
	Rasio Efektivitas (%)	96,80	102,40	99,23	97,30	-	98,93
	Kriteria	Efektif	S. Efektif	Efektif	Efektif	-	Efektif
	Peringkat	9	1	6	11	-	5
11	<b>Kab. Rejang Lebong</b>						
	Realisasi Pendapatan	479.808.456.319,22	516.012.940.894,90	558.241.358.035,27	630.815.936.603,71	635.081.809.100,00	563.992.100.190,62
	Anggaran Pendapatan	469.650.116.932,87	515.833.249.033,95	567.207.040.383,73	610.355.125.735,71	-	540.761.383.021,57
	Rasio Efektivitas (%)	102,16	100,03	98,41	103,35	-	100,99
	Kriteria	S. Efektif	S. Efektif	Efektif	S. Efektif	-	S. Efektif
	Peringkat	3	4	10	2	-	2

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2015

**Lampiran 3**  
**Tabulasi Data Hasil Penghitungan Rasio Efisiensi Keuangan Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013**

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Tahun Anggaran					Rata-rata Rasio Efisiensi
		2009	2010	2011	2012	2013	
1	<b>Provinsi Bengkulu</b>						
	Realisasi Belanja	855.891.102.535,50	872.093.175.026,00	908.399.387.237,00	1.364.614.993.898,00	1.735.160.259.000,00	1.147.231.783.539,30
	Anggaran Belanja	982.022.392.363,00	965.888.745.713,00	1.064.467.111.260,00	1.572.440.796.132,00	-	1.146.204.761.367,00
	Rasio Efisiensi (%)	87,15	90,28	85,33	86,78	-	87,39
	Kriteria	C. Efisien	K. Efisien	C. Efisien	C. Efisien	-	C. Efisien
	Peringkat	2	5	2	3	-	2
2	<b>Kota Bengkulu</b>						
	Realisasi Belanja	500.997.884.400,00	543.456.354.281,00	595.218.619.343,00	642.273.933.972,28	722.970.001.000,00	620.983.358.599,26
	Anggaran Belanja	534.398.327.128,79	570.363.945.292,00	616.116.485.821,82	680.584.694.537,20	-	600.365.863.194,95
	Rasio Efisiensi (%)	93,75	95,28	96,60	94,37	-	95,05
	Kriteria	K. Efisien	K. Efisien	K. Efisien	K. Efisien	-	K. Efisien
	Peringkat	6	11	11	6	-	10
3	<b>Kab. Bengkulu Selatan</b>						
	Realisasi Belanja	374.572.123.786,00	396.438.100.417,36	476.746.036.992,95	539.683.242.575,00	666.100.419.500,00	490.707.984.654,26
	Anggaran Belanja	397.228.403.709,16	421.854.512.326,58	501.860.672.098,97	568.709.795.233,70	-	472.413.345.842,10
	Rasio Efisiensi (%)	94,30	93,97	94,99	94,89	-	94,54
	Kriteria	K. Efisien	K. Efisien	K. Efisien	K. Efisien	-	K. Efisien
	Peringkat	8	8	10	8	-	7
4	<b>Kab. Bengkulu Tengah</b>						
	Realisasi Belanja	107.097.771.979,22	295.387.207.149,61	412.594.151.673,00	407.528.362.748,79	434.965.138.500,00	331.514.526.410,12
	Anggaran Belanja	114.201.376.101,00	336.522.476.688,07	438.273.643.619,00	426.550.874.214,45	-	328.887.092.655,63
	Rasio Efisiensi (%)	93,78	87,78	94,14	95,54	-	92,81
	Kriteria	K. Efisien	C. Efisien	K. Efisien	K. Efisien	-	K. Efisien
	Peringkat	7	1	7	9	-	6
5	<b>Kab. Bengkulu Utara</b>						
	Realisasi Belanja	446.627.395.474,00	490.609.418.121,01	591.123.231.934,40	685.187.145.395,12	691.488.762.000,00	581.007.190.603,11
	Anggaran Belanja	482.478.937.733,94	528.653.434.646,00	699.020.786.100,56	703.561.930.988,22	-	482.743.017.893,74
	Rasio Efisiensi (%)	104,24	92,80	84,56	97,38	-	94,75
	Kriteria	T. Efisien	K. Efisien	C. Efisien	K. Efisien	-	K. Efisien
	Peringkat	11	7	1	11	-	9

No	Keterangan	Tahun Anggaran					Rata-rata Rasio Efisiensi
		2009	2010	2011	2012	2013	
6	<b>Kab. Mukomuko</b>						
	Realisasi Belanja	382.305.531.824,00	348.703.079.222,00	371.383.295.192,00	458.136.740.893,00	488.450.996.000,00	409.795.928.626,20
	Anggaran Belanja	420.748.737.558,56	390.439.651.647,00	392.572.404.842,68	628.159.292.115,00	-	457.980.021.540,81
	Rasio Efisiensi (%)	90,86	89,31	94,60	72,93	-	86,93
	Kriteria Peringkat	K. Efisien 4	C. Efisien 3	K. Efisien 8	Efisien 1	-	C. Efisien 1
7	<b>Kab. Kaur</b>						
	Realisasi Belanja	312.788.076.001,06	314.892.584.268,00	355.460.934.019,00	416.397.338.772,00	467.309.294.900,00	373.369.645.592,01
	Anggaran Belanja	326.714.739.966,00	331.274.713.188,86	374.337.359.139,09	439.785.219.535,50	-	368.028.007.957,36
	Rasio Efisiensi (%)	95,74	95,05	94,95	94,68	-	95,11
	Kriteria Peringkat	K. Efisien 10	K. Efisien 10	K. Efisien 9	K. Efisien 7	-	K. Efisien 11
8	<b>Kab. Seluma</b>						
	Realisasi Belanja	333.379.945.722,00	374.296.429.018,60	436.143.807.440,30	411.675.204.275,00	504.413.211.700,00	411.981.719.631,18
	Anggaran Belanja	370.304.375.971,00	423.992.589.249,75	469.835.230.585,03	497.566.430.824,00	-	440.424.656.657,44
	Rasio Efisiensi (%)	90,03	88,27	92,82	82,73	-	88,46
	Kriteria Peringkat	K. Efisien 3	C. Efisien 2	K. Efisien 4	C. Efisien 2	-	C. Efisien 3
9	<b>Kab. Kepahiang</b>						
	Realisasi Belanja	396.252.714.846,00	379.497.366.924,22	398.351.739.722,00	398.435.261.413,00	319.020.779.900,00	378.311.572.561,04
	Anggaran Belanja	425.549.431.586,89	415.196.073.443,68	427.581.824.609,75	451.167.400.877,79	-	429.873.682.629,53
	Rasio Efisiensi (%)	92,90	91,40	93,16	88,31	-	91,44
	Kriteria Peringkat	K. Efisien 5	K. Efisien 6	K. Efisien 5	C. Efisien 4	-	K. Efisien 5
10	<b>Kab. Lebong</b>						
	Realisasi Belanja	320.913.553.070,00	329.195.841.949,00	362.944.155.427,00	391.834.087.744,80	420.795.838.300,00	365.136.695.298,16
	Anggaran Belanja	378.853.837.085,81	368.316.589.887,98	396.874.148.890,00	440.128.582.737,29	-	396.043.289.650,27
	Rasio Efisiensi (%)	84,71	89,37	91,45	89,03	-	88,64
	Kriteria Peringkat	C. Efisien 1	C. Efisien 4	K. Efisien 3	C. Efisien 5	-	C. Efisien 4
11	<b>Kab. Rejang Lebong</b>						
	Realisasi Belanja	491.779.699.481,83	515.789.760.859,77	549.491.742.575,35	619.437.289.544,37	542.884.702.700,00	543.876.639.032,26
	Anggaran Belanja	519.285.092.141,49	544.985.346.561,73	589.731.583.763,72	643.094.548.521,49	-	574.274.142.747,11
	Rasio Efisiensi (%)	94,70	94,64	93,17	96,32	-	94,71
	Kriteria Peringkat	K. Efisien 9	K. Efisien 9	K. Efisien 6	K. Efisien 10	-	K. Efisien 8

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2015

**Lampiran 4**  
**Tabulasi Data Hasil Penghitungan Rasio Aktivitas (Keserasian Belanja) Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013**

**1. Rasio Belanja Rutin terhadap PAD**

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Tahun Anggaran					Rata-rata RBRPAD
		2009	2010	2011	2012	2013	
1	<b>Provinsi Bengkulu</b>						
	Total Belanja Rutin	600.310.222.734,00	699.631.743.696,00	687.509.827.964,00	1.074.350.334.690,00	1.365.655.567.000,00	885.491.539.216,80
	Total APBD	1.846.848.290.586,14	1.972.059.194.798,88	2.075.381.633.354,93	2.927.140.389.157,19	3.328.445.138.000,00	1.764.285.901.579,43
	RBRPAD (%)	32,50	35,38	33,13	36,70	41,03	35,75
	Kriteria Peringkat	C. Serasi 8	C. Serasi 9	C. Serasi 11	C. Serasi 9	Serasi 2	C. Serasi 8
2	<b>Kota Bengkulu</b>						
	Total Belanja Rutin	390.570.594.059,00	439.828.514.848,00	512.758.199.887,00	579.041.219.136,00	599.325.068.000,00	504.304.719.186,00
	Total APBD	976.661.940.569,03	1.079.128.129.014,62	1.207.033.772.790,27	1.319.493.161.857,15	1.537.276.262.000,00	1.223.918.653.246,22
	RBRPAD (%)	39,99	40,76	42,48	43,88	38,99	41,22
	Kriteria Peringkat	C. Serasi 3	Serasi 2	Serasi 1	Serasi 1	C. Serasi 5	Serasi 2
3	<b>Kab. Bengkulu Selatan</b>						
	Total Belanja Rutin	297.277.172.426,00	349.930.177.263,36	399.315.419.775,00	457.874.992.461,00	573.314.512.500,00	415.542.454.885,07
	Total APBD	742.087.215.699,42	791.405.851.586,78	950.724.224.293,43	1.100.243.800.226,90	1.258.613.656.300,00	968.614.949.621,31
	RBRPAD (%)	40,06	44,22	42,00	41,61	45,55	42,69
	Kriteria Peringkat	Serasi 2	Serasi 1	Serasi 2	Serasi 2	Serasi 1	Serasi 1
4	<b>Kab. Bengkulu Tengah</b>						
	Total Belanja Rutin	98.247.957.102,22	193.704.911.565,01	290.337.705.457,00	329.438.234.717,79	353.226.780.800,00	252.991.117.928,40
	Total APBD	222.534.376.387,51	626.854.459.131,76	803.760.223.248,62	811.536.980.448,94	893.930.880.800,00	671.723.384.003,37
	RBRPAD (%)	44,15	30,90	36,12	40,59	39,51	38,25
	Kriteria Peringkat	Serasi 1	C. Serasi 10	C. Serasi 7	Serasi 4	C. Serasi 4	C. Serasi 5
5	<b>Kab. Bengkulu Utara</b>						
	Total Belanja Rutin	348.727.170.988,00	396.025.749.050,00	465.109.750.875,94	511.625.626.813,12	561.696.183.100,00	456.634.896.165,41
	Total APBD	898.883.274.760,35	982.187.780.822,49	1.250.091.282.768,51	1.322.384.297.187,18	1.380.957.714.000,00	1.166.900.869.907,71
	RBRPAD (%)	38,79	40,32	37,21	38,69	40,67	39,14
	Kriteria Peringkat	C. Serasi 4	Serasi 3	C. Serasi 6	C. Serasi 6	Serasi 3	C. Serasi 3

No	Keterangan	Tahun Anggaran					Rata-rata RBRPAD
		2009	2010	2011	2012	2013	
6	<b>Kab. Mukomuko</b>						
	Total Belanja Rutin	225.918.810.401,00	260.156.696.599,00	294.830.484.564,00	357.498.951.742,00	365.870.929.900,00	300.855.174.641,20
	Total APBD	766.405.487.849,41	746.352.774.455,52	790.021.882.385,48	921.427.177.717,93	962.031.904.200,00	837.247.845.321,67
	RBRPAD (%)	29,48	38,86	37,32	38,80	38,03	36,50
	Kriteria	T. Serasi	C. Serasi	C. Serasi	C. Serasi	C. Serasi	C. Serasi
7	<b>Kab. Kaur</b>						
	Total Belanja Rutin	209.498.851.509,06	243.135.267.628,00	273.997.555.077,00	326.922.424.252,00	360.826.001.100,00	282.876.019.913,21
	Total APBD	606.806.870.930,51	631.041.388.168,25	720.873.686.635,15	847.094.017.548,92	928.436.119.300,00	746.850.416.516,57
	RBRPAD (%)	34,52	38,53	38,01	38,59	38,86	37,70
	Kriteria	C. Serasi	C. Serasi	C. Serasi	C. Serasi	C. Serasi	C. Serasi
8	<b>Kab. Seluma</b>						
	Total Belanja Rutin	225.000.701.730,60	271.847.341.617,00	295.519.458.760,00	317.755.212.144,00	407.176.781.200,00	303.459.899.090,32
	Total APBD	675.928.170.046,81	722.490.503.770,03	879.579.622.329,88	898.077.395.000,83	1.079.992.873.400,00	851.213.712.909,51
	RBRPAD (%)	33,29	37,63	33,60	35,38	37,70	35,52
	Kriteria	C. Serasi	C. Serasi	C. Serasi	C. Serasi	C. Serasi	C. Serasi
9	<b>Kab. Kepahiang</b>						
	Total Belanja Rutin	218.054.450.155,00	226.595.215.712,00	277.694.029.789,00	299.156.400.882,00	218.579.131.800,00	248.015.845.667,60
	Total APBD	760.894.406.757,33	759.845.471.991,48	814.280.843.073,76	825.856.640.014,93	682.038.784.500,00	768.583.229.267,50
	RBRPAD (%)	28,66	29,82	34,10	36,22	32,05	32,17
	Kriteria	T. Serasi	T. Serasi	C. Serasi	C. Serasi	C. Serasi	C. Serasi
10	<b>Kab. Lebong</b>						
	Total Belanja Rutin	174.130.798.403,00	241.742.767.435,00	269.091.642.467,00	295.000.636.172,80	332.868.432.700,00	262.566.855.435,56
	Total APBD	632.308.924.811,06	655.074.479.599,30	749.244.653.150,93	794.101.206.297,27	891.359.952.300,00	744.417.843.231,71
	RBRPAD (%)	27,54	36,90	35,91	37,15	37,43	34,99
	Kriteria	T. Serasi	C. Serasi	C. Serasi	C. Serasi	C. Serasi	C. Serasi
11	<b>Kab. Rejang Lebong</b>						
	Total Belanja Rutin	358.726.404.243,60	401.935.535.760,77	451.131.647.974,35	511.919.007.752,00	404.072.788.500,00	425.557.076.846,14
	Total APBD	971.588.155.801,05	1.031.802.701.754,67	1.107.733.100.610,62	1.250.253.226.148,08	1.177.966.511.800,00	1.107.868.739.222,88
	RBRPAD (%)	36,92	38,95	40,72	40,94	34,30	38,37
	Kriteria	C. Serasi	C. Serasi	Serasi	Serasi	C. Serasi	C. Serasi
	Peringkat	5	4	3	3	10	4

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2015

Keterangan : Total Belanja Rutin = Jumlah Belanja Operasi; RBRPAD = Rasio Belanja Rutin terhadap PAD

## 2. Rasio Belanja Pembangunan terhadap PAD

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Tahun Anggaran					Rata-rata RPPAD
		2009	2010	2011	2012	2013	
1	<b>Provinsi Bengkulu</b>						
	Total Belanja Pembangunan	249.114.367.266,00	165.861.964.330,00	220.889.559.273,00	290.264.659.208,00	277.378.859.069,00	240.701.881.829,20
	Total APBD	1.846.848.290.586,14	1.972.059.194.798,88	2.075.381.633.354,93	2.927.140.389.157,19	3.328.445.138.000,00	2.429.974.929.179,43
	RBPPAD (%)	13,49	8,41	10,64	9,92	8,33	10,16
	Kriteria Peringkat	S.T. Serasi 7	S.T. Serasi 10	S.T. Serasi 6	S.T. Serasi 7	S.T. Serasi 9	S.T. Serasi 9
2	<b>Kota Bengkulu</b>						
	Total Belanja Pembangunan	109.642.344.741,00	103.582.739.433,00	82.133.098.256,00	63.152.680.636,28	124.277.386.287,00	96.557.649.870,66
	Total APBD	976.661.940.569,03	1.079.128.129.014,62	1.207.033.772.790,27	1.319.493.161.857,15	1.537.276.262.000,00	1.223.918.653.246,22
	RBPPAD (%)	11,23	9,60	6,80	4,79	8,08	8,10
	Kriteria Peringkat	S.T. Serasi 9	S.T. Serasi 8	S.T. Serasi 11	S.T. Serasi 11	S.T. Serasi 10	S.T. Serasi 11
3	<b>Kab. Bengkulu Selatan</b>						
	Total Belanja Pembangunan	74.103.206.985,00	44.997.459.154,00	76.175.630.262,95	81.760.404.114,00	92.770.057.197,80	73.961.351.542,75
	Total APBD	742.087.215.699,42	791.405.851.586,78	950.724.224.293,43	1.100.243.800.226,90	1.258.613.656.300,00	968.614.949.621,31
	RBPPAD (%)	18,27	5,50	7,80	7,32	7,37	9,25
	Kriteria Peringkat	T. Serasi 4	S.T. Serasi 11	S.T. Serasi 10	S.T. Serasi 10	S.T. Serasi 11	S.T. Serasi 10
4	<b>Kab. Bengkulu Tengah</b>						
	Total Belanja Pembangunan	8.849.814.877,00	100.300.202.584,00	121.922.739.162,00	77.494.882.709,00	113.169.701.117,14	84.347.468.089,83
	Total APBD	222.534.376.387,51	626.854.459.131,76	803.760.223.248,62	811.536.980.448,94	893.930.880.800,00	671.723.384.003,37
	RBPPAD (%)	3,98	16,00	15,17	9,55	12,66	11,47
	Kriteria Peringkat	S.T. Serasi 11	T. Serasi 2	T. Serasi 2	S.T. Serasi 8	S.T. Serasi 4	S.T. Serasi 7
5	<b>Kab. Bengkulu Utara</b>						
	Total Belanja Pembangunan	97.368.142.486,00	93.796.369.071,01	125.568.631.058,46	172.774.148.882,00	129.086.066.505,00	123.718.671.600,49
	Total APBD	898.883.274.760,35	982.187.780.822,49	1.250.091.282.768,51	1.322.384.297.187,18	1.380.957.714.000,00	1.166.900.869.907,71
	RBPPAD (%)	10,83	9,55	10,04	13,07	9,35	10,57
	Kriteria Peringkat	S.T. Serasi 10	S.T. Serasi 9	S.T. Serasi 7	S.T. Serasi 1	S.T. Serasi 8	S.T. Serasi 8

No	Keterangan	Tahun Anggaran					Rata-rata RPPAD
		2009	2010	2011	2012	2013	
6	<b>Kab. Mukomuko</b>						
	Total Belanja Pembangunan	154.152.307.934,00	86.720.376.656,00	75.261.833.174,00	96.458.376.617,00	102.271.277.293,00	147.709.750.444,12
	Total APBD	766.405.487.849,41	746.352.774.455,52	790.021.882.385,48	921.427.177.717,93	962.031.904.200,00	837.247.845.321,67
	RBPPAD (%)	20,11	11,62	9,53	10,47	10,63	12,47
	Kriteria Peringkat	T. Serasi 3	S.T. Serasi 5	S.T. Serasi 8	S.T. Serasi 5	S.T. Serasi 7	S.T. Serasi 5
7	<b>Kab. Kaur</b>						
	Total Belanja Pembangunan	102.616.810.992,00	71.749.816.640,00	81.463.378.942,00	89.474.914.520,00	106.387.856.837,00	90.338.555.586,20
	Total APBD	606.806.870.930,51	631.041.388.168,25	720.873.686.635,15	847.094.017.548,92	928.436.119.300,00	746.850.416.516,57
	RBPPAD (%)	16,91	11,37	11,30	10,56	11,46	12,32
	Kriteria Peringkat	T. Serasi 5	S.T. Serasi 6	S.T. Serasi 5	S.T. Serasi 4	S.T. Serasi 6	S.T. Serasi 6
8	<b>Kab. Seluma</b>						
	Total Belanja Pembangunan	107.427.341.216,40	102.449.087.401,60	140.558.256.180,30	91.214.819.589,00	139.750.400.361,00	116.279.980.949,66
	Total APBD	675.928.170.046,81	722.490.503.770,03	879.579.622.329,88	898.077.395.000,83	1.079.992.873.400,00	851.213.712.909,51
	RBPPAD (%)	15,89	14,18	15,98	10,16	12,94	13,83
	Kriteria Peringkat	T. Serasi 6	S.T. Serasi 3	T. Serasi 1	S.T. Serasi 6	S.T. Serasi 3	S.T. Serasi 4
9	<b>Kab. Kepahiang</b>						
	Total Belanja Pembangunan	178.123.264.691,00	152.902.151.212,22	120.657.709.933,00	99.238.530.531,00	137.904.638.747,00	137.765.259.022,84
	Total APBD	760.894.406.757,33	759.845.471.991,48	814.280.843.073,76	825.856.640.014,93	682.038.784.500,00	768.583.229.267,50
	RBPPAD (%)	23,41	20,12	14,82	12,02	20,22	18,12
	Kriteria Peringkat	T. Serasi 1	T. Serasi 1	S.T. Serasi 3	S.T. Serasi 3	T. Serasi 2	T. Serasi 1
10	<b>Kab. Lebong</b>						
	Total Belanja Pembangunan	146.575.011.467,00	86.925.458.114,00	93.852.512.960,00	96.833.451.572,00	111.139.918.041,00	107.065.270.430,80
	Total APBD	632.308.924.811,06	655.074.479.599,30	749.244.653.150,93	794.101.206.297,27	891.359.952.300,00	744.417.843.231,71
	RBPPAD (%)	23,18	13,27	12,53	12,19	12,47	14,73
	Kriteria Peringkat	T. Serasi 2	S.T. Serasi 4	S.T. Serasi 4	S.T. Serasi 2	S.T. Serasi 5	S.T. Serasi 2
11	<b>Kab. Rejang Lebong</b>						
	Total Belanja Pembangunan	130.993.941.238,23	110.280.247.099,00	95.939.347.692,00	106.638.596.740,00	350.577.298.922,45	230.770.166.057,38
	Total APBD	971.588.155.801,05	1.031.802.701.754,67	1.107.733.100.610,62	1.250.253.226.148,08	1.177.966.511.800,00	1.107.868.739.222,88
	RBPPAD (%)	13,48	10,69	8,66	8,53	29,76	14,22
	Kriteria Peringkat	S.T. Serasi 8	S.T. Serasi 7	S.T. Serasi 9	S.T. Serasi 9	T. Serasi 1	S.T. Serasi 3

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2015

Keterangan : Total APBD = Jumlah Pendapatan + Jumlah Belanja + Jumlah Pembiayaan *Netto*; RBPPAD = Rasio Belanja Pembangunan terhadap PAD

**Lampiran 5**  
**Hasil Penghitungan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013**  
**(dalam rupiah)**

No	Keterangan	Tahun Anggaran					Rata-rata DSCR
		2009	2010	2011	2012	2013	
1	<b>Provinsi Bengkulu</b>						<b>14,91</b> (Mampu Mengembalikan Hutang)
	PAD	287.781.580.630,84	351.091.488.316,00	440.920.183.714,43	483.768.274.997,19	490.027.933.000,00	
	Bagian Daerah	48.881.381.916,34	54.774.236.879,00	68.266.688.698,00	79.064.896.752,00	80.483.143.000,00	
	DAU	487.339.494.000,00	523.041.290.000,00	607.388.036.000,00	775.311.166.000,00	794.647.828.000,00	
	Belanja Wajib	600.310.222.734,00	699.631.743.696,00	687.509.827.964,00	1.074.350.334.690,00	1.365.655.567.000,00	
	<b>Jumlah 1</b>	<b>223.692.233.813,18</b>	<b>225.275.271.499,00</b>	<b>429.065.080.448,43</b>	<b>263.794.003.059,19</b>	<b>570.511.076.000,00</b>	
	Pokok Angsuran	190.000.000.000,00	-	106.339.950,00	-	60.000.000.000,00	
	Bunga Pinjaman	14% x 190.000.000.000,00 26.600.000.000,00	-	14% x 106.339.950,00 14.887.593,00	-	14% x 60.000.000.000,00 8.400.000.000,00	
	<b>Jumlah 2</b>	<b>216.600.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>121.227.543,00</b>	<b>-</b>	<b>68.400.000.000,00</b>	
	DSCR (%)	1,03	-	35,39	-	8,34	
2	<b>Kota Bengkulu</b>						<b>-16,63</b> (Tidak Mampu Mengembalikan Hutang)
	PAD	16.941.305.683,11	26.677.744.840,91	39.318.037.209,63	41.709.552.051,54	45.979.828.000,00	
	Bagian Daerah	25.372.549.133,00	30.481.823.744,00	31.065.714.821,00	38.864.925.424,00	97.937.143.000,00	
	DAU	340.287.159.000,00	351.461.812.000,00	397.054.908.000,00	475.745.500.000,00	59.072.218.000,00	
	Belanja Wajib	390.570.594.059,00	439.828.514.848,00	512.758.199.887,00	579.041.219.136,00	599.325.068.000,00	
	<b>Jumlah 1</b>	<b>-7.969.580.242,89</b>	<b>-31.207.134.263,09</b>	<b>-45.319.539.856,37</b>	<b>-22.721.241.660,46</b>	<b>-396.335.879.000,00</b>	
	Pokok Angsuran	-	1.000.000.000,00	12.500.000.000,00	16.648.731.153,00	1.000.000.000,00	
	Bunga Pinjaman	-	14% x 1.000.000.000,00 140.000.000,00	14% x 12.500.000.000,00 1.750.000.000,00	14% x 16.648.731.153,00 2.330.822.361,42	14% x 1.000.000.000,00 140.000.000,00	
	<b>Jumlah 2</b>	<b>-</b>	<b>1.140.000.000,00</b>	<b>14.250.000.000,00</b>	<b>18.979.553.514,42</b>	<b>1.140.000.000,00</b>	
	DSCR (%)	-	-27,37	-3,18	-1,20	-34,77	
3	<b>Kab. Beng. Selatan</b>						<b>-16,30</b> (Tidak Mampu Mengembalikan Hutang)
	PAD	22.042.030.166,95	11.894.036.693,62	14.758.401.174,70	18.911.016.577,54	24.454.023.000,00	
	Bagian Daerah	289.132.028.084,00	20.191.778.953,00	22.999.153.693,00	23.597.301.976,00	24.926.837.400,00	
	DAU	272.434.666.000,00	285.481.509.000,00	322.293.917.000,00	396.665.102.000,00	50.186.000.000,00	
	Belanja Wajib	297.377.172.426,00	349.930.177.263,36	399.315.419.775,00	457.874.992.461,00	573.314.512.500,00	
	<b>Jumlah 1</b>	<b>286.231.551.824,95</b>	<b>-32.362.852.616,74</b>	<b>35.705.385.375,70</b>	<b>-18.701.571.907,46</b>	<b>-473.747.652.100,00</b>	
	Pokok Angsuran	-	1.188.061.005,59	67.732.888.970,00	6.203.453.625,01	10.623.911.300,00	
	Bunga Pinjaman	-	14% x 1.188.061.005,59 166.328.540,78	14% x 67.732.888.970,00 9.482.604.455,80	14% x 6.203.453.625,01 868.483.507,50	14% x 10.623.911.300,00 1.487.347.582,00	
	<b>Jumlah 2</b>	<b>-</b>	<b>1.354.389.546,37</b>	<b>77.215.493.425,80</b>	<b>7.071.937.132,51</b>	<b>12.111.258.882,00</b>	
	DSCR (%)	-	-23,89	0,46	-2,64	-39,12	

No	Keterangan	Tahun Anggaran					Rata-rata DSCR
		2009	2010	2011	2012	2013	
4	<b>Kab. Beng. Tengah</b>						<b>-0,93</b> (Tidak Mampu Mengembalikan Hutang)
	PAD	1.652.713.172,72	3.137.025.712,68	4.444.531.263,22	5.743.484.323,56	6.756.990.000,00	
	Bagian Daerah	12.032.258.177,00	21.597.793.656,00	29.928.264.308,00	32.298.244.257,00	38.720.108.900,00	
	DAU	79.376.104.000,00	208.427.792.000,00	249.976.279.000,00	288.875.390.000,00	30.202.000.000,00	
	Belanja Wajib	98.247.957.102,22	193.704.911.565,01	290.337.705.457,00	329.438.234.717,79	353.226.780.800,00	
	<b>Jumlah 1</b>	<b>-5.186.881.752,50</b>	<b>39.457.699.803,67</b>	<b>-5.988.630.885,78</b>	<b>-2.521.116.137,23</b>	<b>-277.547.681.900,00</b>	
	Pokok Angsuran	-	1.000.000.000,00	-	1.815.136.209,00	6.731.201.600,00	
	Bunga Pinjaman	-	14% x 1.000.000.000,00	-	14% x 1.815.136.209,00	14% x 6.731.201.600,00	
		-	140.000.000,00	-	254.119.069,26	942.368.224,00	
	<b>Jumlah 2</b>	<b>-</b>	<b>1.140.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.069.255.278,26</b>	<b>7.673.569.824,00</b>	
DSCR (%)	-	34,61	-	-1,22	-36,17		
5	<b>Kab. Beng. Utara</b>						<b>-42,45</b> (Tidak Mampu Mengembalikan Hutang)
	PAD	13.350.500.134,91	20.354.406.066,04	19.099.215.920,70	25.311.027.531,89	30.114.221.900,00	
	Bagian Daerah	21.288.613.218,00	30.949.321.312,40	43.297.384.196,00	49.432.509.367,00	26.013.603.300,00	
	DAU	306.069.861.000,00	327.441.782.000,00	374.334.712.000,00	448.065.642.000,00	483.142.211.000,00	
	Belanja Wajib	348.727.170.988,00	396.025.749.050,00	465.109.750.875,94	511.625.626.513,12	561.696.183.100,00	
	<b>Jumlah 1</b>	<b>-8.018.196.635,09</b>	<b>-17.280.239.671,96</b>	<b>-28.378.438.759,24</b>	<b>11.183.553.385,77</b>	<b>-22.426.146.900,00</b>	
	Pokok Angsuran	-	-	-	-	20.000.000.000,00	
	Bunga Pinjaman	-	-	-	-	14% x 20.000.000.000,00	
		-	-	-	-	1.140.000.000,00	
	<b>Jumlah 2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.140.000.000,00</b>	
DSCR (%)	-	-	-	-	-42,45		
6	<b>Kab. Mukomuko</b>						<b>5,29</b> (Mampu Mengembalikan Hutang)
	PAD	8.973.011.076,60	9.034.573.730,36	9.341.068.798,75	9.217.503.958,91	11.286.295.900,00	
	Bagian Daerah	27.917.848.852,00	29.999.704.563,00	29.559.183.037,00	31.790.119.164,00	15.252.824.300,00	
	DAU	234.105.397.000,00	249.926.507.000,00	281.889.471.000,00	338.203.452.000,00	423.756.452.000,00	
	Belanja Wajib	225.918.810.401,00	260.156.696.599,00	294.830.484.564,00	357.498.951.742,00	365.870.929.900,00	
	<b>Jumlah 1</b>	<b>45.077.446.527,60</b>	<b>28.804.088.694,36</b>	<b>-74.040.761.728,25</b>	<b>21.712.123.380,91</b>	<b>80.424.642.300,00</b>	
	Pokok Angsuran	21.875.000.000,00	43.796.212.308.000,00	28.242.652.644,00	5.224.716.729,00	3.520.178.000,00	
	Bunga Pinjaman	14% x 21.875.000.000,00	14% x 43.796.212.308.000,00	14% x 28.242.652.644,00	14% x 5.224.716.729,00	14% x 3.520.178.000,00	
		3.062.500.000,00	6.131.469.723.120,00	3.953.971.370,16	731.460.342,06	1.068.595.488,80	
	<b>Jumlah 2</b>	<b>24.937.500.000,00</b>	<b>49.927.682.031.120,00</b>	<b>32.196.624.014,16</b>	<b>5.956.177.071,06</b>	<b>4.588.773.488,80</b>	
DSCR (%)	1,81	5,77	-2,30	3,64	17,53		

No	Keterangan	Tahun Anggaran					Rata-rata DSCR
		2009	2010	2011	2012	2013	
7	<b>Kab. Kaur</b>						<b>2,78</b> (Mampu Mengembalikan Hutang)
	PAD	9.012.332.810,80	6.046.143.975,79	6.810.591.506,25	7.781.828.801,72	10.341.333.200,00	
	Bagian Daerah	22.394.756.915,00	26.671.766.912,00	24.707.843.583,00	27.917.254.555,00	28.351.145.700,00	
	DAU	204.909.166.000,00	218.613.498.000,00	248.742.460.000,00	301.076.661.000,00	302.326.020.300,00	
	Belanja Wajib	209.498.851.509,06	243.135.267.628,00	273.997.555.077,00	326.922.424.252,00	360.826.001.100,00	
	<b>Jumlah 1</b>	<b>26.817.404.216,74</b>	<b>819.141.259,79</b>	<b>6.263.340.012,25</b>	<b>9.853.320.104,72</b>	<b>-19.807.501.900,00</b>	
	Pokok Angsuran	-	212.082.400,00	2.191.586.070,00	1.205.737.965,00	8.811.019.800,00	
	Bunga Pinjaman	-	14% x 212.082.400,00	14% x 2.191.586.070,00	14% x 1.205.737.965,00	14% x 8.811.019.800,00	
		-	29.691.536,00	306.822.049,80	168.803.315,10	1.233.542.772,00	
<b>Jumlah 2</b>	-	<b>241.773.936,00</b>	<b>2.498.408.119,80</b>	<b>1.374.541.280,10</b>	<b>10.044.562.572,00</b>		
DSCR (%)	-	3,39	2,51	7,17	-1,97		
8	<b>Kab. Seluma</b>						<b>22,20</b> (Mampu Mengembalikan Hutang)
	PAD	5.931.374.613,80	5.519.577.177,46	5.535.533.741,35	10.751.155.674,78	17.566.639.600,00	
	Bagian Daerah	21.240.904.293,00	24.473.528.242,00	24.790.275.127,00	27.915.767.578,00	41.361.145.700,00	
	DAU	247.378.848.000,00	257.750.821.000,00	286.760.123.667,00	349.783.377.000,00	400.861.633.000,00	
	Belanja Wajib	225.000.701.730,60	271.867.343.627,00	295.519.458.760,00	317.755.212.144,00	407.176.781.200,00	
	<b>Jumlah 1</b>	<b>49.550.425.176,20</b>	<b>15.876.582.792,46</b>	<b>21.566.473.775,35</b>	<b>70.695.088.108,78</b>	<b>52.612.637.100,00</b>	
	Pokok Angsuran	-	-	1.000.000.000,00	-	1.811.019.800,00	
	Bunga Pinjaman	-	-	14% x 1.000.000.000,00	-	14% x 1.811.019.800,00	
		-	-	140.000.000,00	-	253.542.772,00	
<b>Jumlah 2</b>	-	-	<b>1.140.000.000,00</b>	-	<b>2.064.562.572,00</b>		
DSCR (%)	-	-	18,91	-	25,48		
9	<b>Kab. Kepahiang</b>						<b>28,92</b> (Mampu Mengembalikan Hutang)
	PAD	11.943.947.476,50	9.639.855.811,83	11.969.653.357,14	13.896.281.348,17	19.467.833.700,00	
	Bagian Daerah	20.646.138.123,00	25.311.992.976,00	24.734.200.280,00	25.421.200.025,00	23.351.145.700,00	
	DAU	215.415.025.000,00	234.497.386.000,00	264.545.031.000,00	317.102.587.000,00	200.861.633.000,00	
	Belanja Wajib	218.054.450.155,00	225.595.215.712,00	277.694.029.789,00	299.156.400.882,00	218.579.131.800,00	
	<b>Jumlah 1</b>	<b>2.950.660.444,50</b>	<b>43.854.019.075,83</b>	<b>23.554.854.848,14</b>	<b>57.263.667.491,17</b>	<b>25.101.480.600,00</b>	
	Pokok Angsuran	-	511.650.400,00	15.757.617.455,81	3.379.566.771,00	7.370.500.000,00	
	Bunga Pinjaman	-	14% x 511.650.400,00	14% x 15.757.617.455,81	14% x 3.379.566.771,00	14% x 7.370.500.000,00	
		-	71.631.056,00	2.206.066.443,81	473.139.347,94	1.031.870.000,00	
<b>Jumlah 2</b>	-	<b>583.281.456,00</b>	<b>17.963.683.899,62</b>	<b>3.852.706.118,94</b>	<b>8.402.370.000,00</b>		
DSCR (%)	-	75,18	1,31	14,86	24,33		

No	Keterangan	Tahun Anggaran					Rata-rata DSCR
		2009	2010	2011	2012	2013	
10	<b>Kab. Lebong</b>						<b>3,72</b> (Mampu Mengembalikan Hutang)
	PAD	7.680.588.328,60	6.255.400.998,83	7.790.174.032,14	7.749.144.879,31	12.828.933.500,00	
	Bagian Daerah	85.474.608.471,00	34.763.716.447,00	29.986.361.968,00	31.028.696.511,00	108.410.055.200,00	
	DAU	207.907.459.000,00	218.618.650.000,00	249.640.578.600,00	312.273.768.000,00	250.497.935.700,00	
	Belanja Wajib	174.130.798.403,00	241.742.767.435,00	269.091.642.467,00	295.000.636.172,80	332.868.432.700,00	
	<b>Jumlah 1</b>	<b>126.931.857.396,60</b>	<b>17.895.000.010,83</b>	<b>18.325.472.133,14</b>	<b>56.050.973.217,51</b>	<b>38.868.491.700,00</b>	
	Pokok Angsuran	-	6.275.202.348,00	8.074.173.569,35	5.172.287.300,00	4.269.620.000,00	
	Bunga Pinjaman	-	14% x 6.275.202.348,00	14% x 8.074.173.569,35	14% x 5.172.287.300,00	14% x 4.269.620.000,00	
		-	878.528.328,72	1.130.384.299,71	724.120.222,00	597.746.800,00	
	<b>Jumlah 2</b>	<b>-</b>	<b>7.153.730.676,72</b>	<b>9.204.557.869,06</b>	<b>5.896.407.522,00</b>	<b>4.867.366.800,00</b>	
DSCR (%)	-	2,50	1,99	9,50	0,88		
11	<b>Kab. Rejang Lebong</b>						<b>11,41</b> (Mampu Mengembalikan Hutang)
	PAD	19.892.527.742,24	17.894.582.123,25	19.851.004.770,20	47.171.759.045,92	53.490.305.300,00	
	Bagian Daerah	19.213.947.809,00	24.113.758.640,00	25.422.585.228,00	26.641.231.149,00	18.544.318.100,00	
	DAU	321.216.933.000,00	333.093.797.000,00	374.496.506.000,00	448.469.185.000,00	453.542.153.400,00	
	Belanja Wajib	358.726.404.243,60	401.935.538.760,77	451.131.647.974,35	511.919.007.752,00	404.072.788.500,00	
	<b>Jumlah 1</b>	<b>1.597.004.307,64</b>	<b>-26.833.400.997,52</b>	<b>-31.361.551.976,15</b>	<b>10.363.167.442,92</b>	<b>121.503.988.300,00</b>	
	Pokok Angsuran	174.176.205,40	4.699.894.418,00	-	848.182.214,22	3.339.762.400,00	
	Bunga Pinjaman	14% x 174.176.205,40	14% x 4.699.894.418,00	-	14% x 848.182.214,22	14% x 3.339.762.400,00	
		24.384.668,75	657.985.218,52	-	118.745.509,99	467.566.736,00	
	<b>Jumlah 2</b>	<b>198.560.874,15</b>	<b>5.357.879.636,52</b>	<b>-</b>	<b>966.927.724,21</b>	<b>3.807.329.136,00</b>	
DSCR (%)	8,04	-5,01	-	10,72	31,91		

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2015

Keterangan:

1. Bagian Daerah = Dana Bagi Hasil Pajak + Dana Bagi Hasil bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
2. Jumlah 1 = (PAD + Bagian Daerah + DAU) - Belanja Wajib
3. Pokok Angsuran = Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
4. Bunga Pinjaman = 14%/tahun (suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang sedang berlaku) x Pokok Angsuran
5. Jumlah 2 = Pokok Angsuran + Bunga Pinjaman
6.  $DSCR = \frac{\text{Jumlah 1}}{\text{Jumlah 2}}$
7. Tidak semua daerah memiliki hutang (pinjaman) yang beri tanda strip (-), sehingga daerah yang tidak memiliki hutang tidak dapat ditentukan DSCR-nya. Implikasinya, pemeringkatan juga tidak dapat dilakukan secara keseluruhan (untuk 5 tahun anggaran).

**Lampiran 6**  
**Tabulasi Data Hasil Penghitungan Rasio Pertumbuhan Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013**

**1. Rasio Penerimaan PAD**

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Tahun Anggaran					Rata-rata RPPAD
		2009	2010	2011	2012	2013	
1	<b>Provinsi Bengkulu</b>						
	Total PAD <i>i</i>	287.781.580.630,84	351.091.488.316,22	712.264.183.714,43	483.768.274.997,19	490.027.933.000,00	464.986.692.131,74
	Total PAD <i>r</i>	289.078.259.587,03	287.781.580.630,84	351.091.488.316,22	712.264.183.714,43	483.768.274.997,19	354.648.678.049,14
	RPPAD (%)	-0,45	22,00	102,87	-32,08	1,29	18,73
	Kriteria Peringkat	Menurun 8	Meningkat 3	Meningkat 1	Menurun 11	Meningkat 10	Meningkat 5
2	<b>Kota Bengkulu</b>						
	Total PAD <i>i</i>	26.941.305.683,11	26.677.744.840,00	39.318.037.209,63	41.709.552.051,54	45.979.828.000,00	36.125.293.556,86
	Total PAD <i>r</i>	24.562.456.078,99	26.941.305.683,11	26.677.744.840,00	39.318.037.209,63	41.709.552.051,54	31.841.819.172,65
	RPPAD (%)	9,68	-0,98	47,38	6,08	10,24	14,48
	Kriteria Peringkat	Meningkat 6	Menurun 5	Meningkat 2	Menurun 8	Meningkat 9	Meningkat 9
3	<b>Kab. Bengkulu Selatan</b>						
	Total PAD <i>i</i>	22.042.030.166,95	11.894.036.693,62	14.758.401.174,70	18.911.016.577,54	24.454.023.000,00	18.411.901.522,56
	Total PAD <i>r</i>	12.773.550.718,50	22.042.030.166,95	11.894.036.693,62	14.758.401.174,70	18.911.016.577,54	16.075.807.066,26
	RPPAD (%)	72,56	-46,04	24,08	28,14	29,31	21,61
	Kriteria Peringkat	Meningkat 1	Menurun 11	Meningkat 6	Meningkat 5	Meningkat 5	Meningkat 4
4	<b>Kab. Bengkulu Tengah</b>						
	Total PAD <i>i</i>	1.652.713.172,72	3.137.025.712,68	4.444.531.263,32	5.743.484.323,56	6.756.990.000,00	4.346.948.894,46
	Total PAD <i>r</i>	Tidak Ada	1.652.713.172,72	3.137.025.712,68	4.444.531.263,32	5.743.484.323,56	3.744.438.618,07
	RPPAD (%)	-	89,81	41,68	29,22	17,65	44,59
	Kriteria Peringkat	-	Meningkat 1	Meningkat 3	Menurun 4	Menurun 7	Meningkat 1
5	<b>Kab. Bengkulu Utara</b>						
	Total PAD <i>i</i>	13.350.500.134,91	20.354.406.066,04	19.099.215.920,70	25.311.027.531,89	30.114.221.900,00	21.645.874.310,71
	Total PAD <i>r</i>	15.778.625.459,06	13.350.500.134,91	20.354.406.066,04	19.099.215.920,70	25.311.027.531,89	18.778.755.022,52
	RPPAD (%)	-15,39	52,46	-6,17	32,52	18,98	16,48
	Kriteria Peringkat	Menurun 9	Meningkat 2	Menurun 11	Meningkat 3	Menurun 6	Meningkat 8

No	Keterangan	Tahun Anggaran					Rata-rata RPPAD
		2009	2010	2011	2012	2013	
6	<b>Kab. Mukomuko</b>						
	Total PAD <i>i</i>	8.973.011.076,60	9.034.573.730,36	9.341.068.798,75	9.217.503.958,91	1.286.295.900,00	7.570.490.692,92
	Total PAD <i>r</i>	6.669.952.301,72	8.973.011.076,60	9.034.573.730,36	9.341.068.798,75	9.217.503.958,91	8.647.221.973,27
	RPPAD (%)	34,53	0,69	3,39	-1,32	-86,04	-9,75
	Kriteria Peringkat	Meningkat 4	Menurun 4	Meningkat 9	Menurun 10	Menurun 11	Menurun 11
7	<b>Kab. Kaur</b>						
	Total PAD <i>i</i>	9.012.332.810,80	6.046.143.975,79	6.810.591.506,25	7.781.828.801,72	10.341.333.200,00	7.998.446.058,91
	Total PAD <i>r</i>	5.753.452.806,11	9.012.332.810,80	6.046.143.975,79	6.810.591.506,25	7.781.828.801,72	7.080.869.980,13
	RPPAD (%)	56,64	-32,91	12,64	14,26	32,89	16,70
	Kriteria Peringkat	Meningkat 2	Menurun 10	Meningkat 7	Meningkat 7	Meningkat 4	Meningkat 7
8	<b>Kab. Seluma</b>						
	Total PAD <i>i</i>	5.931.374.613,80	5.519.577.177,46	5.535.533.741,35	10.721.155.674,78	17.566.639.600,00	9.054.856.161,48
	Total PAD <i>r</i>	4.151.633.373,22	5.931.374.613,80	5.519.577.177,46	5.535.533.741,35	10.721.155.674,78	6.371.454.916,12
	RPPAD (%)	42,87	-6,94	0,29	93,68	63,85	38,75
	Kriteria Peringkat	Meningkat 3	Menurun 6	Meningkat 10	Meningkat 2	Menurun 2	Meningkat 2
9	<b>Kab. Kepahiang</b>						
	Total PAD <i>i</i>	11.943.947.476,50	9.639.855.811,83	11.989.653.357,14	13.896.281.348,17	19.467.833.700,00	13.387.514.338,73
	Total PAD <i>r</i>	9.376.460.097,25	11.943.947.476,50	9.639.855.811,83	11.989.653.357,14	13.896.281.348,17	11.369.239.618,18
	RPPAD (%)	27,38	-19,29	24,38	15,90	39,83	17,64
	Kriteria Peringkat	Meningkat 5	Menurun 9	Meningkat 5	Menurun 6	Meningkat 3	Meningkat 6
10	<b>Kab. Lebong</b>						
	Total PAD <i>i</i>	7.688.588.328,60	6.255.400.998,83	7.790.174.032,14	7.749.144.879,31	12.828.933.500,00	8.462.448.347,78
	Total PAD <i>r</i>	12.513.000.963,63	7.688.588.328,60	6.255.400.998,83	7.790.174.032,14	7.749.144.879,31	8.399.261.840,50
	RPPAD (%)	-38,56	-18,64	24,53	-0,53	65,55	6,47
	Kriteria Peringkat	Menurun 10	Meningkat 8	Meningkat 4	Menurun 9	Meningkat 1	Meningkat 10
11	<b>Kab. Rejang Lebong</b>						
	Total PAD <i>i</i>	19.892.527.742,24	17.894.582.123,25	19.851.004.770,20	47.171.759.045,92	53.490.305.300,00	31.660.035.796,32
	Total PAD <i>r</i>	19.944.617.011,47	19.892.527.742,24	17.894.582.123,25	19.851.004.770,20	47.171.759.045,92	24.950.898.138,62
	RPPAD (%)	-0,26	-10,04	10,93	137,63	13,39	30,33
	Kriteria Peringkat	Menurun 7	Menurun 7	Meningkat 8	Meningkat 1	Menurun 8	Meningkat 3

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2015

Keterangan : *i* = Tahun berjalan; *r* = Tahun sebelumnya; RPPAD = Rasio Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

## 2. Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan

No	Keterangan	Tahun Anggaran					Rata-rata RPTP
		2009	2010	2011	2012	2013	
1	<b>Provinsi Bengkulu</b>						
	Total Pendapatan <i>i</i>	914.357.986.547,18	1.000.860.633.676,22	1.166.982.246.117,93	1.562.525.395.259,19	1.593.284.879.000,00	1.247.602.228.120,10
	Total Pendapatan <i>r</i>	1.082.518.266.435,03	914.357.986.547,18	1.000.860.633.676,22	1.166.982.246.117,93	1.562.525.395.259,19	1.145.448.905.607,11
	RPTP (%)	-15,53	9,46	16,60	33,89	1,97	9,28
	Kriteria Peringkat	Menurun 9	Meningkat 3	Meningkat 6	Meningkat 1	Menurun 9	Meningkat 7
2	<b>Kota Bengkulu</b>						
	Total Pendapatan <i>i</i>	475.664.056.169,03	535.671.774.733,62	611.815.153.447,27	677.219.227.884,87	814.306.261.000,00	622.935.294.646,96
	Total Pendapatan <i>r</i>	453.141.761.873,98	475.664.056.169,03	535.671.774.733,62	611.815.153.447,27	677.219.227.884,87	550.702.394.821,75
	RPTP (%)	4,97	12,61	14,21	10,69	20,24	12,24
	Kriteria Peringkat	Meningkat 3	Meningkat 2	Meningkat 8	Menurun 5	Meningkat 1	Meningkat 2
3	<b>Kab. Bengkulu Selatan</b>						
	Total Pendapatan <i>i</i>	367.515.091.913,42	394.967.751.169,42	473.978.187.300,48	560.560.557.651,90	592.513.236.800,00	477.906.964.967,04
	Total Pendapatan <i>r</i>	375.842.005.187,63	367.515.091.913,42	394.967.751.169,42	473.978.187.300,48	560.560.557.651,90	434.572.718.644,57
	RPTP (%)	-2,21	7,47	20,00	18,27	5,70	9,84
	Kriteria Peringkat	Menurun 7	Meningkat 6	Meningkat 3	Menurun 2	Menurun 7	Meningkat 6
4	<b>Kab. Bengkulu Tengah</b>						
	Total Pendapatan <i>i</i>	115.435.944.408,29	331.467.251.982,75	391.166.071.575,62	404.008.617.700,15	458.965.742.300,00	340.208.725.613,36
	Total Pendapatan <i>r</i>	Tidak Ada	115.435.944.408,29	331.467.251.982,75	391.166.071.575,62	404.008.617.700,15	99.366.230.853,34
	RPTP (%)	-	187,14	18,01	3,28	13,60	55,51
	Kriteria Peringkat	- -	Meningkat 1	Menurun 5	Menurun 9	Meningkat 4	Meningkat 1
5	<b>Kab. Bengkulu Utara</b>						
	Total Pendapatan <i>i</i>	452.255.879.286,35	491.578.362.701,48	658.958.050.834,11	637.197.151.792,06	689.468.952.000,00	585.891.679.322,80
	Total Pendapatan <i>r</i>	555.557.048.116,76	452.255.879.286,35	491.578.362.701,48	658.958.050.834,11	637.197.151.792,06	559.109.298.346,15
	RPTP (%)	-18,59	8,69	34,05	-3,30	8,20	5,81
	Kriteria Peringkat	Menurun 10	Meningkat 4	Meningkat 1	Menurun 11	Meningkat 5	Meningkat 9

No	Keterangan	Tahun Anggaran					Rata-rata RPTP
		2009	2010	2011	2012	2013	
6	<b>Kab. Mukomuko</b>						
	Total Pendapatan <i>i</i>	384.099.956.026,41	397.649.695.233,52	418.638.587.193,48	463.290.436.824,93	473.580.908.200,00	427.451.916.695,67
	Total Pendapatan <i>r</i>	333.464.564.722,56	384.099.956.026,41	397.649.695.233,52	418.638.587.193,48	463.290.436.824,93	399.428.648.000,18
	RPTP (%)	15,18	3,53	5,28	10,67	2,22	7,38
	Kriteria Peringkat	Meningkat 1	Menurun 10	Meningkat 11	Meningkat 6	Menurun 8	Meningkat 8
7	<b>Kab. Kaur</b>						
	Total Pendapatan <i>i</i>	294.018.794.929,45	316.148.803.900,25	365.412.752.616,15	430.696.678.776,42	461.126.824.400,00	373.480.770.944,45
	Total Pendapatan <i>r</i>	281.927.136.088,12	294.018.794.929,45	316.148.803.900,25	365.412.752.616,15	430.696.678.776,42	337.640.833.262,08
	RPTP (%)	4,29	7,53	15,58	17,87	7,06	10,47
	Kriteria Peringkat	Meningkat 4	Meningkat 5	Meningkat 7	Meningkat 3	Menurun 6	Meningkat 4
8	<b>Kab. Seluma</b>						
	Total Pendapatan <i>i</i>	342.548.224.324,81	348.194.074.751,43	443.435.814.889,58	486.402.190.725,83	575.579.661.700,00	439.231.793.278,33
	Total Pendapatan <i>r</i>	338.880.016.956,42	342.548.224.324,81	348.194.074.751,43	443.435.814.889,58	486.402.190.725,83	391.892.064.329,61
	RPTP (%)	1,08	1,30	27,35	9,69	18,33	11,55
	Kriteria Peringkat	Meningkat 6	Meningkat 11	Meningkat 2	Menurun 7	Meningkat 2	Meningkat 3
9	<b>Kab. Kepahiang</b>						
	Total Pendapatan <i>i</i>	364.641.691.911,33	380.348.105.067,26	415.929.103.351,76	427.421.378.601,93	363.018.004.600,00	390.271.656.706,46
	Total Pendapatan <i>r</i>	336.349.130.876,83	364.641.691.911,33	380.348.105.067,26	415.929.103.351,76	427.421.378.601,93	384.937.881.961,82
	RPTP (%)	8,41	4,31	9,35	2,76	-15,07	1,95
	Kriteria Peringkat	Meningkat 2	Menurun 9	Meningkat 9	Menurun 10	Menurun 1	Meningkat 11
10	<b>Kab. Lebong</b>						
	Total Pendapatan <i>i</i>	311.395.371.741,06	325.878.637.650,30	386.300.497.723,93	402.267.118.552,47	470.564.114.000,00	379.281.147.933,55
	Total Pendapatan <i>r</i>	298.947.719.275,99	311.395.371.741,06	325.878.637.650,30	386.300.497.723,93	402.267.118.552,47	344.957.868.988,75
	RPTP (%)	4,16	4,65	18,54	4,13	16,98	9,69
	Kriteria Peringkat	Meningkat 5	Meningkat 8	Meningkat 4	Menurun 8	Meningkat 3	Meningkat 5
11	<b>Kab. Rejang Lebong</b>						
	Total Pendapatan <i>i</i>	479.808.456.319,22	516.012.940.894,90	558.241.358.035,27	630.815.936.603,71	635.081.809.100,00	563.992.100.190,62
	Total Pendapatan <i>r</i>	509.210.205.320,74	479.808.456.319,22	516.012.940.894,90	558.241.358.035,27	630.815.936.603,71	538.817.779.434,77
	RPTP (%)	-5,77	7,54	8,18	13,00	0,007	4,59
	Kriteria Peringkat	Menurun 8	Meningkat 7	Meningkat 10	Meningkat 4	Menurun 10	Meningkat 10

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2015

Keterangan : *i* = Tahun berjalan; *r* = Tahun sebelumnya; RPTP = Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan

### 3. Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan

No	Keterangan	Tahun Anggaran					Rata-rata RPBP
		2009	2010	2011	2012	2013	
1	<b>Provinsi Bengkulu</b>						
	Belanja Pembangunan <i>i</i>	249.114.223.801,50	165.061.964.330,00	220.889.559.273,00	290.264.659.208,00	303.378.856.000,00	245.741.852.522,50
	Belanja Pembangunan <i>r</i>	388.314.528.657,00	249.114.223.801,50	165.061.964.330,00	220.889.559.273,00	290.264.659.208,00	262.728.987.053,90
	RPBP (%)	-35,85	-33,74	33,82	31,41	4,52	0,03
	Kriteria Peringkat	Menurun 9	Menurun 8	Meningkat 4	Menurun 2	Menurun 7	Meningkat 8
2	<b>Kota Bengkulu</b>						
	Belanja Pembangunan <i>i</i>	109.642.344.741,00	103.582.739.433,00	82.133.098.256,00	63.152.680.636,28	123.577.383.000,00	96.417.649.213,26
	Belanja Pembangunan <i>r</i>	102.732.788.683,00	109.642.344.741,00	103.582.739.433,00	82.133.098.256,00	63.152.680.636,28	92.248.730.349,86
	RPBP (%)	6,72	-5,53	-20,71	-23,11	95,68	10,61
	Kriteria Peringkat	Meningkat 3	Menurun 4	Menurun 10	Menurun 9	Meningkat 1	Meningkat 3
3	<b>Kab. Bengkulu Selatan</b>						
	Total Belanja Pembangunan	74.103.206.985,00	44.997.459.154,00	76.175.630.262,95	81.760.404.114,00	92.770.057.000,00	73.961.351.503,19
	Total APBD	116.313.915.863,00	74.103.206.985,00	44.997.459.154,00	76.175.630.262,95	81.760.404.114,00	78.670.123.275,79
	RBPPAD (%)	-36,29	-39,28	69,29	7,33	13,47	2,90
	Kriteria Peringkat	Menurun 10	Menurun 9	Meningkat 1	Menurun 6	Meningkat 5	Meningkat 7
4	<b>Kab. Bengkulu Tengah</b>						
	Belanja Pembangunan <i>i</i>	8.849.814.877,00	100.300.202.584,00	121.922.739.162,00	77.494.882.709,00	81.166.701.100,00	77.946.868.086,40
	Belanja Pembangunan <i>r</i>	Tidak Ada	8.849.814.877,00	100.300.202.584,00	121.922.739.162,00	77.494.882.709,00	77.141.909.833,00
	RPBP (%)	-	103,33	21,56	-36,44	4,74	23,30
	Kriteria Peringkat	- -	Meningkat 1	Menurun 5	Menurun 11	Meningkat 8	Meningkat 1
5	<b>Kab. Bengkulu Utara</b>						
	Belanja Pembangunan <i>i</i>	97.368.142.486,00	93.796.369.071,00	125.568.631.058,46	172.744.148.882,00	129.086.064.300,00	123.712.671.600,49
	Belanja Pembangunan <i>r</i>	124.799.607.544,00	97.368.142.486,00	93.796.369.071,00	125.568.631.058,46	172.744.148.882,00	122.855.379.808,29
	RPBP (%)	-21,98	-3,67	33,87	37,57	-25,27	4,10
	Kriteria Peringkat	Menurun 8	Meningkat 2	Meningkat 3	Meningkat 1	Menurun 11	Meningkat 4

No	Keterangan	Tahun Anggaran					Rata-rata RPBP
		2009	2010	2011	2012	2013	
6	<b>Kab. Mukomuko</b>						
	Belanja Pembangunan <i>i</i>	154.152.307.934,00	86.720.376.656,00	75.261.833.174,00	96.458.376.617,00	116.257.076.200,00	105.769.994.116,20
	Belanja Pembangunan <i>r</i>	92.971.277.293,00	154.152.307.934,00	86.720.376.656,00	75.261.833.174,00	96.458.376.617,00	101.112.834.334,80
	RPBP (%)	65,81	-43,74	-13,21	28,16	20,52	11,51
	Kriteria	Meningkat	Menurun	Meningkat	Meningkat	Menurun	Meningkat
	Peringkat	1	10	9	3	3	2
7	<b>Kab. Kaur</b>						
	Belanja Pembangunan <i>i</i>	102.616.810.992,00	71.749.816.640,00	81.463.378.942,00	89.474.914.520,00	106.387.855.800,00	90.338.555.378,80
	Belanja Pembangunan <i>r</i>	100.246.210.347,00	102.616.810.992,00	71.749.816.640,00	81.463.378.942,00	89.474.914.520,00	89.110.226.288,20
	RPBP (%)	2,36	-30,08	13,54	9,83	18,90	2,91
	Kriteria	Meningkat	Menurun	Meningkat	Menurun	Meningkat	Meningkat
	Peringkat	4	7	6	5	4	6
8	<b>Kab. Seluma</b>						
	Belanja Pembangunan <i>i</i>	107.427.341.216,40	102.449.087.401,60	140.558.256.180,30	91.214.819.589,00	95.998.020.100,00	107.529.504.897,46
	Belanja Pembangunan <i>r</i>	127.048.032.446,00	107.427.341.216,40	102.449.087.401,60	140.558.256.180,30	91.214.819.589,00	113.739.507.366,66
	RPBP (%)	15,44	-4,63	37,20	-35,10	5,24	3,63
	Kriteria	Meningkat	Menurun	Meningkat	Menurun	Meningkat	Meningkat
	Peringkat	2	3	2	10	6	5
9	<b>Kab. Kepahiang</b>						
	Belanja Pembangunan <i>i</i>	178.123.264.691,00	152.902.151.212,22	120.657.709.933,00	99.238.530.531,00	100.346.210.100,00	130.253.573.293,44
	Belanja Pembangunan <i>r</i>	195.447.615.468,70	178.123.264.691,00	152.902.151.212,22	120.657.709.933,00	99.238.530.531,00	149.273.854.367,18
	RPBP (%)	-8,86	-14,16	-21,09	-17,75	1,12	-12,15
	Kriteria	Menurun	Menurun	Menurun	Meningkat	Meningkat	Menurun
	Peringkat	5	5	11	8	9	10
10	<b>Kab. Lebong</b>						
	Belanja Pembangunan <i>i</i>	146.575.011.467,00	86.925.458.114,00	93.852.512.960,00	96.833.451.572,00	76.931.645.600,00	100.223.615.942,60
	Belanja Pembangunan <i>r</i>	155.348.396.565,00	146.575.011.467,00	86.925.458.114,00	93.852.512.960,00	96.833.451.572,00	115.906.966.135,60
	RPBP (%)	-5,65	-94,07	7,97	3,28	-20,55	-21,80
	Kriteria	Menurun	Menurun	Meningkat	Menurun	Menurun	Menurun
	Peringkat	6	11	7	7	10	11
11	<b>Kab. Rejang Lebong</b>						
	Belanja Pembangunan <i>i</i>	130.993.941.238,23	110.280.247.099,00	95.939.347.692,00	106.638.596.740,00	138.811.914.200,00	116.532.809.393,85
	Belanja Pembangunan <i>r</i>	167.364.814.088,49	130.993.941.238,23	110.280.247.099,00	95.939.347.692,00	106.638.596.740,00	122.243.389.371,54
	RPBP (%)	-21,73	-15,81	-13,00	11,15	30,17	-1,84
	Kriteria	Menurun	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Menurun
	Peringkat	7	6	8	4	2	9

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2015

Keterangan : *i* = Tahun berjalan; *r* = Tahun sebelumnya; RPBP = Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan

**Lampiran 7**  
**Pendapatan Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013**

(dalam rupiah)

Daerah	TA	PPD	BP	PP	SILPA	PDRB
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 + 5 + 6
Provinsi Bengkulu	2009	203.676.210.499,00	332.155.015.835,00	190.000.000.000,00	10.570.145.969,86	736.401.372.303,86
	2010	259.804.030.509,00	373.371.358.338,00	553.500.000,00	39.678.718.523,42	673.407.607.370,42
	2011	333.095.936.272,00	420.941.990.890,00	106.339.950,00	197.339.470.817,67	951.483.737.929,67
	2012	370.247.702.785,00	480.477.357.766,00	0,00	241.412.061.284,26	1.092.137.121.835,26
	2013	373.158.670.000,00	486.096.954.000,00	60.000.000.000,00	243.975.006.000,00	1.163.230.630.000,00
Kota Bengkulu	2009	13.544.381.210,90	284.122.146.008,00	1.000.000.000,00	18.664.720.466,20	317.331.247.685,10
	2010	13.059.423.641,00	342.141.520.021,00	2.500.000.000,00	14.739.305.106,82	372.440.248.768,82
	2011	22.608.291.563,00	386.233.629.048,00	12.500.000.000,00	17.967.639.421,09	439.309.560.032,09
	2012	29.103.378.185,84	437.795.578.379,00	16.648.731.153,00	1.756.866.043,00	485.304.553.760,84
	2013	30.562.328.000,00	446.474.471.000,00	1.000.000.000,00	102.780.171.400,00	580.816.970.400,00
Kabupaten Bengkulu Selatan	2009	1.771.707.506,82	208.689.714.519,00	0,00	27.904.391.879,58	238.365.813.905,40
	2010	2.169.125.050,60	263.023.570.447,00	1.188.061.005,59	25.401.154.108,05	291.781.910.611,24
	2011	2.756.021.275,00	298.439.020.519,00	67.732.888,97	22.819.140.590	324.801.915.273,58
	2012	3.280.921.642,00	351.371.605.720,00	6.203.453.625,01	37.493.002.042,50	398.348.983.029,51
	2013	2.624.705.700,00	373.303.869.800,00	10.623.911.300,00	1.187.704.700,00	387.740.191.500,00
Kabupaten Bengkulu Tengah	2009	1.652.713.172,72	82.740.990.580,00	100.000.000,00	8.337.512.429,07	92.831.216.181,79
	2010	640.917.363,82	139.438.924.191,01	1.000.000.000,00	43.417.557.262,81	184.497.398.817,64
	2011	1.174.560.256,17	177.377.495.048,00	0,00	21.988.755.145,43	200.540.810.449,60
	2012	1.756.866.043,00	216.849.419.884,00	1.815.136.209,00	16.653.873.887,79	237.075.296.023,79
	2013	1.910.139.600,00	226.898.738.500,00	6.731.201.600,00	105.269.902.200,00	340.809.981.900,00
Kabupaten Bengkulu Utara	2009	2.626.619.141,00	227.205.015.787,00	0,00	48.042.566.046,09	277.874.200.974,09
	2010	2.532.823.756,00	277.353.981.703,00	0,00	48.998.115.126,56	328.884.920.585,56
	2011	4.352.559.017,00	335.187.464.687,00	0,00	114.990.981.072,27	454.531.004.776,27
	2012	4.609.725.527,00	382.262.773.957,00	0,00	67.000.987.469,21	453.873.486.953,21
	2013	7.259.751.000,00	424.069.752.100,00	20.000.000.000,00	24.453.703.900,00	475.783.207.000,00
Kabupaten Mukomuko	2009	1.980.637.617,00	150.316.828.941,00	21.875.000.000,00	562.254.493,97	174.734.721.051,97
	2010	1.884.321.806,00	183.501.714.440,00	43.796.212.308,00	5.712.650.413,49	234.894.898.967,49
	2011	2.819.985.979,50	210.361.731.315,00	28.242.652.644,00	23.961.152.870,97	265.385.522.809,47
	2012	3.277.739.334,00	258.029.961.894,00	5.224.716.729,00	34.039.309.688,97	300.571.727.645,97
	2013	3.288.079.300,00	295.138.788.700,00	3.520.178.000,00	5.428.217.800,00	307.375.263.800,00
Kabupaten Kaur	2009	1.017.018.729,00	121.273.796.104,06	1.000.000.000,00	6.179.787.614,10	129.470.602.447,16
	2010	1.018.644.803,00	149.807.278.742,00	212.082.400,00	6.880.249.846,3	157.918.255.791,30
	2011	1.263.905.585,32	180.929.263.053,00	2.191.586.070,00	14.554.351.714,50	198.939.106.422,82
	2012	2.294.086.059,67	198.802.806.327,00	1.205.737.965,00	27.508.527.689,92	229.811.158.041,59
	2013	2.494.401.900,00	203.402.127.000,00	8.811.019.800,00	4.677.565.000,00	219.385.113.700,00
Kabupaten Seluma	2009	1.609.234.160,96	166.231.517.508,60	0,00	39.442.612.692,23	207.283.364.361,79
	2010	2.367.292.628,71	200.958.155.052,00	0,00	13.311.722.897,66	216.637.170.578,37
	2011	2.822.239.120,96	227.098.747.678,00	1.000,00	19.604.730.346,94	250.525.717.145,90
	2012	3.395.490.091,05	256.099.042.435,00	0,00	94.331.716.797,77	353.826.249.323,82
	2013	7.721.708.300,00	339.249.776.400,00	1.811.019.800,00	93.020.231.100,00	441.802.735.600,00

Dacrah	TA	PPD	BP	PP	SILPA	PDRB
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 + 5 + 6
Kabupaten Kepahiang	2009	1.625.940.245,43	118.305.397.779,00	0,00	19.407.875.771,37	139.339.213.795,80
	2010	1.902.060.658,72	149.800.625.017,00	511.650.400,00	19.746.963.514,41	171.961.299.590,13
	2011	2.286.960.285,07	186.234.220.558,00	15.757.617.455,81	21.553.422.018,36	225.832.220.317,24
	2012	2.432.543.729,67	208.042.397.596,00	0,00	47.159.972.436,29	257.634.913.761,96
	2013	3.087.116.600,00	113.402.127.000,00	7.370.500.000,00	79.560.457.200,00	203.420.200.800,00
Kabupaten Lebong	2009	1.151.228.772,00	118.525.051.905,00	1.422.543.388,00	26.986.869.150,65	148.085.693.215,65
	2010	1.222.123.778,00	148.255.816.924,00	6.275.202.348,00	16.782.237.502,95	172.535.380.552,95
	2011	1.600.697.822,00	169.304.432.242,00	8.074.173.569,35	31.973.037.980,53	210.952.341.613,88
	2012	1.875.809.472,00	200.996.103.746,80	5.172.287.300,00	35.781.500.631,20	243.825.701.150,00
	2013	921.354.200,00	234.093.687.500,00	4.269.620.000,00	68.330.913.700,00	307.615.575.400,00
Kabupaten Rejang Lebong	2009	2.778.581.701,00	244.115.184.301,60	174.176.205,40	35.888.698.252,76	282.956.640.460,76
	2010	3.062.405.510,00	278.078.879.763,10	4.699.894.418,00	31.411.983.869,89	316.983.163.560,99
	2011	4.186.628.583,00	317.487.508.567,95	402.907.472,82	40.049.167.924,99	362.126.212.548,76
	2012	5.282.365.933,00	359.195.350.520,00	848.182.124,22	50.306.132.502,11	415.632.031.079,33
	2013	5.958.321.000,00	214.892.393.500,00	3.339.762.400,00	131.188.811.000,00	355.379.287.900,00

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2015

Keterangan:

TA = Tahun Anggaran

PPD = Pendapatan Pajak Daerah

BP = Belanja Pegawai

PP = Pengeluaran Pembiayaan

SILPA = Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

**Lampiran 8**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu**  
**Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013 Berdasarkan Nilai Pendapatan Domestik**  
**Regional Bruto (PDRB)**

No	Daerah	TA	PDRB <sub>t</sub> (Rupiah)	PDRB <sub>t-1</sub> (Rupiah)	PE (%)
1	Provinsi Bengkulu	2009	736.401.372.303,86	760.829.146.655,64	-3,21
		2010	673.407.607.370,42	736.401.372.303,86	-8,55
		2011	951.483.737.929,67	673.407.607.370,42	41,29
		2012	1.092.137.121.835,26	951.483.737.929,67	14,78
		2013	1.163.230.630.000,00	1.092.137.121.835,26	6,51
2	Kota Bengkulu	2009	317.331.247.685,10	299.071.781.837,17	6,10
		2010	372.440.248.768,82	317.331.247.685,10	17,37
		2011	439.309.560.032,09	372.440.248.768,82	17,95
		2012	485.304.553.760,84	439.309.560.032,09	10,47
		2013	580.816.970.400,00	485.304.553.760,84	19,68
3	Kabupaten Bengkulu Selatan	2009	238.365.813.905,40	219.821.098.640,74	8,44
		2010	291.781.910.611,24	238.365.813.905,40	22,41
		2011	324.801.915.273,58	291.781.910.611,24	11,32
		2012	398.348.983.029,51	324.801.915.273,58	22,64
		2013	387.740.191.500,00	398.348.983.029,51	-2,66
4	Kabupaten Bengkulu Tengah	2009	92.831.216.181,79	Belum Ada Data	-
		2010	184.497.398.817,64	92.831.216.181,79	98,74
		2011	200.540.810.449,60	184.497.398.817,64	8,70
		2012	237.075.296.023,79	200.540.810.449,60	18,22
		2013	340.809.981.900,00	237.075.296.023,79	43,76
5	Kabupaten Bengkulu Utara	2009	277.874.200.974,09	316.230.818.908,74	-12,13
		2010	328.884.920.585,56	277.874.200.974,09	18,36
		2011	454.531.004.776,27	328.884.920.585,56	38,20
		2012	453.873.486.953,21	454.531.004.776,27	-0,14
		2013	475.783.207.000,00	453.873.486.953,21	4,83
6	Kabupaten Mukomuko	2009	174.734.721.051,97	201.944.848.524,56	-13,47
		2010	234.894.898.967,49	174.734.721.051,97	34,43
		2011	265.385.522.809,47	234.894.898.967,49	12,98
		2012	300.571.727.645,97	265.385.522.809,47	13,26
		2013	307.375.263.800,00	300.571.727.645,97	2,26

No	Daerah	TA	PDRB <sub>t</sub> (Rupiah)	PDRB <sub>t-1</sub> (Rupiah)	PE (%)
7	Kabupaten Kaur	2009	129.470.602.447,16	140.070.737.008,71	-7,57
		2010	157.918.255.791,30	129.470.602.447,16	21,97
		2011	198.939.106.422,82	157.918.255.791,30	25,98
		2012	229.811.158.041,59	198.939.106.422,82	15,52
		2013	219.385.113.700,00	229.811.158.041,59	-4,54
8	Kabupaten Seluma	2009	207.283.364.361,79	222.960.284.080,66	-7,03
		2010	216.637.170.578,37	207.283.364.361,79	4,51
		2011	250.525.717.145,90	216.637.170.578,37	15,64
		2012	353.826.249.323,82	250.525.717.145,90	41,23
		2013	441.802.735.600,00	353.826.249.323,82	24,86
9	Kabupaten Kepahiang	2009	139.339.213.795,80	153.506.226.995,58	-9,23
		2010	171.961.299.590,13	139.339.213.795,80	23,41
		2011	225.832.220.317,24	171.961.299.590,13	31,33
		2012	257.634.913.761,96	225.832.220.317,24	14,08
		2013	203.420.200.800,00	257.634.913.761,96	-21,04
10	Kabupaten Lebong	2009	148.085.693.215,65	141.930.820.855,28	4,34
		2010	172.535.380.552,95	148.085.693.215,65	16,51
		2011	210.952.341.613,88	172.535.380.552,95	22,27
		2012	243.825.701.150,00	210.952.341.613,88	15,58
		2013	307.615.575.400,00	243.825.701.150,00	26,16
11	Kabupaten Rejang Lebong	2009	282.956.640.460,76	266.994.173.284,15	5,98
		2010	316.983.163.560,99	282.956.640.460,76	12,02
		2011	362.126.212.548,76	316.983.163.560,99	14,24
		2012	415.632.031.079,33	362.126.212.548,76	14,78
		2013	355.379.287.900,00	415.632.031.079,33	-14,50

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2015

Keterangan:

TA = Tahun Anggaran

PDRB<sub>t</sub> = Pendapatan Domestik Regional Bruto tahun anggaran yang dihitung

PDRB<sub>t-1</sub> = Pendapatan Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya

PE = Pertumbuhan Ekonomi

Tanda (-) = Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya

**Lampiran 9**  
**Statistik Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

	N	Maximum	Minimum	Mean
Rasio Kemandirian	55	33.28	1.23	5.77
Rasio Efektivitas	44	103.51	94.83	98.67
Rasio Efisiensi	44	95.10	86.92	91.79
Rasio Aktivitas	55	28.47	22.27	24.67
Debt Service Coverage Ratio	36	106.28	-42.45	11.76
Rasio Pertumbuhan	54	41.85	-2.75	12.22
Pertumbuhan Ekonomi	54	33.25	3.48	13.05
Valid N (listwise)	55			

**Lampiran 10**  
**Hasil Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		RK	RE	REf	RA	DSCR	RP	PE
N		55	44	44	55	36	54	54
Normal Parameter <sup>a,b</sup>	Mean	5.77	98.67	91.79	24.67	11.76	12.22	13.05
	Std. Deviation	.064	3.699	3.257	2.461	1.824	1.758	1.206
Most Extreme Differences	Absolute	.068	.181	.178	.113	.072	.075	.087
	Positive	.073	.094	.117	.095	.060	.062	.065
	Negative	-.082	-.181	-.178	-.108	-.069	-.079	-.076
Kolmogorov- Smirnov Z		.724	1.648	1.562	1.003	1.042	1.154	.899
Asymp. Sig. (2-tailed)		.161	.185	.154	.068	.076	.140	.394

- a. Test distribution is Normal.  
b. Calculated from data.

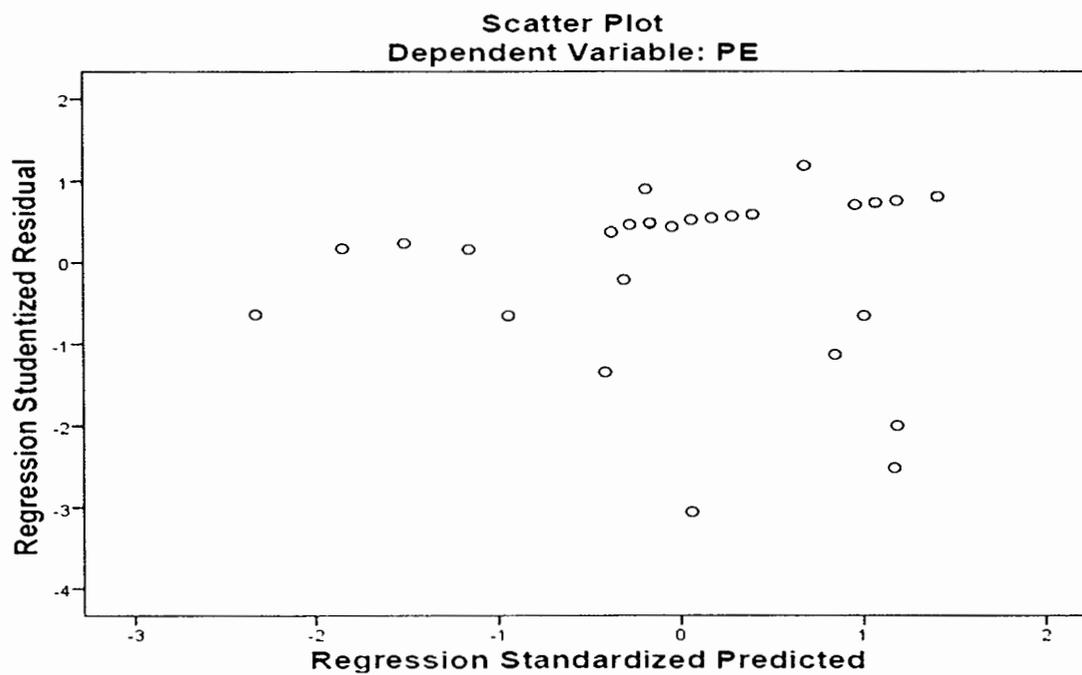
**Lampiran 11**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) dan Autokorelasi**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.419 <sup>a</sup>	.176	.670	6.782	1.707

a. Predictors: (Constant), RK, RE, REf, RA, DSCR, RP

**Lampiran 12**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**



**Lampiran 13**  
**Hasil Uji F (F-Test)**

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1128.576	3	376.192	8.179	.007 <sup>a</sup>
	Residual	2391.740	52	45.995		
	Total	3520.316	55			

a. Predictors: (Constant), RK, RE, REf, RA, DSCR, RP

b. Dependent Variable: PE

**Lampiran 14**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	18.548	8.122		1.256	.026		
RK	.263	.114	.266	1.580	.012	.774	1.291
RE	-.013	.071	.238	1.307	.063	.891	1.325
REf	.096	.111	.208	1.033	.045	.953	1.019
RA	.114	.069	.224	1.233	.014	.987	1.013
DSCR	-.002	.097	.232	1.286	.086	.965	1.036
RP	.172	.107	.116	1.078	.021	.826	1.458

a. Dependent Variable: PE